

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat ridlo dan hidayah-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik dapat selesai sesuai batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, pasal 17 Ayat (1) disebutkan bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Kebijakan Pemerintahan Daerah
- BAB III : Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB IV : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- BAB V : Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
- BAB VI : Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
- BAB VII : Penutup

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2013 kepada DPRD pada dasarnya menginformasikan gambaran kinerja pemerintah daerah secara utuh sepanjang tahun 2013, berdasarkan tolok

ukur kinerja pemerintah daerah sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2011–2015 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2013 yang memuat ruang lingkup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Dalam Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2013 ini, penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2013 ini. Saya berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah di waktu yang akan datang dalam rangka mewujudkan “Gresik Bisa Lebih Baik”.

Gresik, Maret 2014

BUPATI GRESIK

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sambari Halim Radianto', is written over a large, stylized circular stamp or seal.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Dasar Hukum	I-1
B. Gambaran Umum Daerah	I-3
1. Kondisi Geografis Daerah	I-3
2. Gambaran Umum Demografis	I-4
3. Kondisi Ekonomi	I-4
a. Potensi Unggulan Daerah	I-4
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB.....	I-6
 BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH	 II-1
A. Visi dan Misi dan Motto	II-1
B. Tujuan dan Sasaran.....	II-2
1. Tujuan	II-2
2. Sasaran	II-5
3. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	II-33
C. Arah Kebijakan Daerah	II-35
D. Prioritas Daerah.....	II-39
 BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	 III-1
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	III-1
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	III-1
2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	III-2
3. Permasalahan dan Solusi	III-4
B. Pengelolaan Belanja Daerah.....	III-4
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	III-4
2. Target dan Realisasi Belanja.....	III-5
3. Permasalahan dan Solusi	III-6

C. Pembiayaan Daerah	III-6
1. Penerimaan Pembiayaan	III-7
2. Pengeluaran Pembiayaan	III-7
3. Sisa Lebih Pembiayaan	III-7
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	IV-1
A. Program dan Kegiatan pada setiap SKPD	IV-2
B. Urusan Wajib	IV-9
1. Urusan Pendidikan	IV-9
2. Urusan Kesehatan	IV-18
3. Urusan Pekerjaan Umum	IV-24
4. Urusan Perumahan Rakyat	IV-28
5. Urusan Penataan Ruang	IV-31
6. Urusan Perencanaan Pembangunan	IV-33
7. Urusan Perhubungan	IV-35
8. Urusan Lingkungan Hidup	IV-37
9. Urusan Pertanahan	IV-41
10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	IV-42
11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-46
12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	IV-49
13. Urusan Sosial	IV-50
14. Urusan Ketenagakerjaan.....	IV-53
15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	IV-56
16. Urusan Penanaman Modal	IV-58
17. Urusan Kebudayaan	IV-61
18. Urusan Pemuda dan Olahraga	IV-62
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	IV-64
20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	IV-70
21. Urusan Ketahanan Pangan	IV-81

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV-83
23. Urusan Statistik	IV-87
24. Urusan Kearsipan	IV-88
25. Urusan Komunikasi dan Informatika	IV-89
26. Urusan Perpustakaan	IV-91
C. Urusan Pilihan	IV-92
1. Urusan Pertanian	IV-92
2. Urusan Kehutanan	IV-98
3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	IV-98
4. Urusan Pariwisata	IV-100
5. Urusan Kelautan dan Perikanan	IV-101
6. Urusan Perdagangan	IV-103
7. Urusan Industri.....	IV-105
8. Transmigrasi	IV-106
D. Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial	IV-106
E. Pelaksanaan Bantuan Keuangan	IV-110
F. Pelaksanaan Bantuan Partai Politik	IV-111
G. Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga	IV-111
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	V-1
I. Urusan Pemberdayaan Masyarakat	V-1
II. Urusan Tenaga Kerja	V-2
III. Urusan Pertanian	V-6
IV. Urusan Kelautan dan Perikanan	V-12
V. Urusan kesehatan	V-19
VI. Urusan Pekerjaan Umum	V-20
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	VI-1
A. Kerjasama Antar Daerah.....	VI-1
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	VI-3
C. Pembinaan Batas Wilayah	VI-8
D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	VI-8
BAB VII PENUTUP	VII-1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2011–2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan di Daerah;
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2011;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2013.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km². Secara administratif, Kabupaten Gresik terbagi menjadi 18 Kecamatan yang terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjang pantai 140 km, 69 km di daratan memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah dan Panceng serta 71 km di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean.

Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

2. Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2013 sebanyak 1.324.777 jiwa yang terdiri dari 667.601 laki-laki dan 657.176 perempuan, sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 1.307.995 jiwa sehingga dari tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi kenaikan jumlah penduduk sebanyak 16.782 jiwa atau 1,29 %.

Jumlah keluarga di Kabupaten Gresik pada Tahun 2013 sebanyak 364.104 keluarga dan kepadatan penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2013 sebesar 1.112 jiwa/Km². Sedangkan angka rasio jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan pada tahun 2013 sebesar 101,59 %.

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Perkembangan potensi unggulan Kabupaten Gresik pada tahun 2013 antara lain:

- 1) Dalam bidang perindustrian pada tahun 2013 di Kabupaten Gresik telah diterbitkan 25 Tanda Daftar Industri (TDI) untuk Industri Kecil Mikro (IKM) dengan nilai investasi sebesar Rp4.279.220.031,00 yang menyerap 176 orang tenaga kerja.
- 2) Dalam bidang perdagangan di Kabupaten Gresik tahun 2013 telah diterbitkan 1.166 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) baru yang terdiri dari 178 SIUP Perusahaan Mikro, 799 SIUP Perusahaan Kecil dan 170 SIUP Perusahaan Menengah dan 19 SIUP Perusahaan Besar. Jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 12.253 orang dan nilai investasi sebesar Rp2.318.129.000.000,00;
- 3) Dalam bidang pertanian di Kabupaten Gresik tahun 2013, jumlah produksi padi sebanyak 376.546,05 ton, jagung sebanyak 135.280,14 ton dan kedelai sebanyak 1.368,68 ton, kacang tanah sebanyak 5.028,89 ton, kacang hijau sebanyak 2.792,98 ton, ubi kayu sebanyak 13.526,56 ton ubi jalar sebanyak 3.192,72 ton. Sedangkan areal panen padi seluas 61.227 hektar, areal produksi

jagung seluas 23.272 hektar dan areal produksi kedelai seluas 826 hektar.

- 4) Dalam bidang Perkebunan di Kabupaten Gresik pada tahun 2013, jumlah produksi tembakau sebanyak 39 ton, tebu sebanyak 133.399 ton, kelapa sebanyak 14.752.586,40 ton, cengkeh sebanyak 1,88 ton, kopi sebanyak 1,62 ton, jambu mente sebanyak 7,85 ton, kapuk randu sebanyak 10,28 ton, kakao sebanyak 49,37 ton, kunyit sebanyak 2.596,78 ton, dan siwalan sebanyak 144.550 ton. Sedangkan areal produksi kopi seluas 16 hektar, tembakau seluas 52 hektar, tebu seluas 2.134 hektar, Jambu mente seluas 26,16 hektar, Cengkeh seluas 6,27 hektar dan kelapa seluas 3.373 hektar.
- 5) Jumlah populasi ternak di Kabupaten Gresik pada tahun 2013 sebanyak 3.568.270 ekor yang terdiri dari sapi potong 44.270 ekor, sapi perah 433 ekor, kerbau 198 ekor, kuda 236 ekor, kambing 65.270 ekor, domba 30.396 ekor, ayam ras petelur 134.700 ekor, ayam buras 647.762 ekor, ayam ras pedaging 2.603.500 ekor, itik 28.120 ekor, entok dan angsa 13.385 ekor.
Adapun produksi hasil ternak pada tahun 2013 sebanyak 13.491,51 ton yang terdiri dari telur 2.725,26 ton, susu sebanyak 306,14 ton dan daging sebanyak 10.460,11 ton.
- 6) Produksi bidang perikanan di Kabupaten Gresik pada tahun 2013 mencapai 118.541,51 ton yang terdiri dari penangkapan di laut sebesar 18.380,99 ton, sungai sebesar 228,92 ton, waduk sebesar 633,35 ton, budidaya tambak payau sebesar 47.895,18 ton, kolam sebesar 353,69 ton dan tambak tawar sebesar 51.049,38 ton. Jumlah perahu/kapal penangkap ikan sebanyak 4.533 unit dan areal budidaya seluas 33.002,71 hektar yang terdiri dari tambak payau seluas 17.335,02 hektar, tambak tawar seluas 14.629,05 hektar, kolam seluas 100,95 hektar, waduk seluas 617,37 hektar, sungai seluas 320,32 hektar.

7) Investasi daerah di Kabupaten Gresik pada tahun 2012 berdasarkan realisasi persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp3.292.566.000.000,00 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp4.224.287.600.000,00, sedangkan realisasi persetujuan Penanaman Modal Asing Tahun 2012 sebesar US \$ 715.790.700,00 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar US \$727.773.100,00. Keberhasilan dalam peningkatan investasi tersebut karena didukung adanya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada tahun 2012 sebesar 7,43% dan tahun 2013 sebesar 6,98%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 sebesar 7,27% dan pada tahun 2013 sebesar 6,49% maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik masih lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Timur. Lebih lanjut, tingkat inflasi Kabupaten Gresik pada tahun 2013 sebesar 6,56% lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 5,97%. Salah satu penyebab kenaikan inflasi pada tahun 2013 di Kabupaten Gresik yakni adanya kenaikan harga BBM secara nasional.

Inflasi pada tahun 2013 sebesar 6,56%, lebih tinggi dibanding pada tahun 2012 sebesar 5,97%. Hal ini disebabkan adanya kenaikan harga BBM.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2012 sebesar Rp Rp50.185.435.990.000,00, kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp57.209.069.730.000,00. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 pada tahun 2012 sebesar Rp19.424.161.630.000,00, kemudian pada Tahun 2013 meningkat menjadi Rp20.780.170.940.000,00.

Struktur ekonomi Kabupaten Gresik berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2012

didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 50,23%, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 23,23%, dan Sektor Pertanian sebesar 8,88%. Demikian pula pada tahun 2013 masih didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 49,80%, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 23,92%, dan Sektor Pertanian sebesar 8,76%. Sehingga secara ekonomi Kabupaten Gresik adalah daerah Industri dan Perdagangan yang didukung oleh sektor Pertanian.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah pada hakekatnya ditujukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan oleh dan untuk masyarakat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, semua aspirasi dan segala kepentingan daerah yang tumbuh dari masyarakat harus diarahkan untuk menjaga keserasian dan keselarasan antara Pembangunan Daerah, Pembangunan Regional dan Pembangunan Nasional.

Dalam upaya menjaga keserasian dan keselarasan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025, yang kemudian telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun (RPJMD) 2011–2015.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2015 antara lain Visi, Misi, Motto, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Daerah sebagai berikut.

A. Visi, Misi, dan Motto

Visi : **Gresik yang Agamis, Adil, Makmur dan Berkehidupan Yang Berkualitas”.**

Misi : 1. Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri.
2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Motto : "Gresik Bisa Lebih Baik".

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Kabupaten Gresik, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program yang telah ditetapkan.

- a. Untuk melaksanakan Misi 1. Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati yang dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri", ditetapkan tujuan:

- **Meningkatnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun, saling menghormati dan demokratis**

Perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati merupakan harapan setiap warga masyarakat. Kondisi ini selain akan menciptakan kesejahteraan batin bagi masyarakat, juga akan menjadi pendorong proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Sehingga pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengamalan nilai-nilai agama dan moral menjadi sangat penting. Pentingnya pemahaman tentang kehidupan

yang sejuak, santun dan saling menghormati harus senantiasa diberikan kepada masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran–sasaran yang tergabung dalam urusan sosial, urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan kebudayaan.

- b. Untuk melaksanakan Misi 2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik, ditetapkan tujuan:

- **Terwujudnya pelayanan publik yang adil dan merata**

Peran utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanannya pemerintah kabupaten harus berupaya memberikan yang terbaik, adil dan merata. Hal ini sesuai dengan filosofi keberadaan pemerintah sebagai pelayan masyarakat sekaligus bentuk komitmen dari setiap kepala daerah yang berjanji akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap warganya.

Untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran–sasaran yang tergabung dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan sosial, urusan perumahan, urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan komunikasi dan informatika, urusan pertanahan, urusan penataan ruang, urusan perencanaan pembangunan, urusan statistik, urusan kearsipan dan urusan transmigrasi.

- c. Untuk melaksanakan Misi 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan, ditetapkan tujuan:

- **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat**

Peningkatan perekonomian daerah merupakan indikator utama dalam usaha mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian daerah akan mendorong stabilitas perekonomian daerah. Ketidakstabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan memberikan efek terhadap tingkat pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Salah satu tantangan terbesar Pemerintah Kabupaten ke depan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat dan penurunan angka pengangguran.

Untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran–sasaran yang tergabung dalam urusan perdagangan, urusan perindustrian, urusan koperasi dan UKM, urusan penanaman modal, urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan perikanan dan kelautan, urusan lingkungan hidup, urusan perhubungan, urusan ketenagakerjaan, urusan pariwisata, urusan pekerjaan umum dan urusan energi dan sumber daya mineral.

- d. Untuk melaksanakan Misi 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, ditetapkan tujuan:

- **Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya .**

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah tugas utama pemerintah daerah. Kualitas hidup masyarakat diukur dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya berupa pendidikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga dan ketersediaan pangan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut

diharapkan kualitas hidup masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran–sasaran yang tergabung dalam urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, urusan perpustakaan, urusan ketahanan pangan, urusan kepemudaan dan olah raga.

2. Sasaran

Sasaran pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gresik selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

- a. Untuk mencapai tujuan Meningkatnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya aktivitas keagamaan

Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengamalan nilai–nilai agama dan moral serta kesetiakawanan sosial sangat penting, karena dapat menciptakan kesejahteraan batin bagi masyarakat, dan menjadi pendorong proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Jumlah hari besar yang dirayakan pada tahun 2013 ditargetkan 5 kegiatan;
- b) Persentase realisasi bantuan sarana ibadah pada tahun 2013 ditargetkan 90%.

2) Meningkatnya suasana yang sejuk, santun dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Meningkatkan suasana kehidupan yang sejuk, santun dan saling menghormati merupakan harapan seluruh masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten akan melakukan upaya sosialisasi dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang kesatuan bangsa dan kerukunan kehidupan beragama.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Jumlah Parpol yang mendapat sosialisasi pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 11 parpol;
- b) Jumlah LSM/Ormas/OKP yang dibina pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 164 LSM Ormas/ OKP;
- c) Persentase konflik yang dapat diselesaikan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 100%.

3) Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan daerah sebagai produk hukum daerah yang mengatur kehidupan masyarakat pada lingkup kabupaten memerlukan pengawalan dan upaya penegakan agar dapat berfungsi secara efektif. Penegakan hukum tersebut melalui sosialisasi dan operasi oleh satuan kerja terkait.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kab. Gresik pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 60%;
- b) Persentase demo/protes terhadap PERDA/Perbub yang dilaksanakan secara tertib pada tahun 2013 ditargetkan 98,00 % ;

- c) Keberadaan Perda tentang penyelenggaraan Trantibum pada tahun 2013;
- d) Keberadaan Perda tentang PSK dan Miras pada tahun 2013;
- e) Rasio Satpol PP terhadap jumlah penduduk pada tahun 2013 ditargetkan 0,05% per 10.000 penduduk.

4) Meningkatnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan

Pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kampanye terhadap perlindungan terhadap perempuan dan anak perlu dilakukan melalui pemberdayaan perempuan. Perempuan seharusnya bukan hanya sebagai obyek pembangunan tetapi dapat lebih aktif menjadi subyek pembangunan. Perempuan harus dipacu kemampuannya agar terwujud kesetaraan gender di setiap bidang kehidupan dengan tetap menjaga martabat dan kehormatannya. Perlindungan lainnya dilakukan terhadap permasalahan tenaga kerja perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kemungkinan adanya kasus perdagangan (*human trafficking*) terhadap perempuan dan anak.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 100%;
- b) Cakupan anak korban kekerasan yang tuntas mendapatkan penanganan pengaduan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 92 %;

- c) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 100%;
- d) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan Rumah Sakit pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 100%;
- e) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 87%;
- f) Cakupan lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 30%.

5) Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah

Untuk menjaga kekayaan seni dan budaya daerah harus ada upaya untuk melestarikan keberadaannya melalui pelaksanaan even budaya dan pemeliharaan cagar budaya.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 7 kegiatan;
- b) Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang tersedia pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 7 unit;
- c) Persentase peninggalan / Cagar Budaya (Situs) yang dilestarikan ditargetkan sebesar 36,36%.

- b. Untuk mencapai tujuan Terwujudnya pelayanan publik yang adil dan merata ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan

Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan kepada golongan masyarakat miskin ekonomi lemah melalui lembaga kemasyarakatan

desa berupa PKK dan Posyandu yang ada di masyarakat. Masyarakat dibimbing dan dibantu agar mampu mandiri secara ekonomi dan diberikan ketrampilan dan pelayanan dasar kesehatan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Persentase PKK aktif tahun 2013 ditargetkan sebesar 84,04%;
- b) Persentase Posyandu Aktif tahun 2013 ditargetkan sebesar 98,95%;
- c) Persentase keluarga miskin tahun 2013 ditargetkan sebanyak 20,07%.

2) Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial oleh Pemerintah Kabupaten terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilaksanakan melalui pemberian bantuan dan pelatihan untuk meningkatkan kemandirian secara ekonomi sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah PMKS yang ada.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang tersedia pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 19 unit;
- b) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2013 ditargetkan 401 PMKS;
- c) Jumlah PMKS pada tahun 2013 diestimasi sebanyak 70.184 jiwa;
- d) Persentase realisasi bantuan santunan kematian pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 100%;
- e) Penyaluran Raskin ditargetkan pada tahun 2013 sebesar 100%.

3) Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman

Sarana permukiman yang sehat dan layak merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya melalui program dan bantuan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 70%;
- b) Persentase Rumah Layak Huni pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 86,90 %.

4) Terjaminnya kualitas produk hukum dan kepastian hukum

Produk hukum daerah yang dihasilkan, baik yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten atau lembaga legislatif harus mampu dijaga kualitasnya. Produk hukum yang baik harus dapat diaplikasikan di masyarakat sehingga efektivitasnya dapat diandalkan. Sedangkan untuk kepastian hukum diharapkan semua permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten dapat diselesaikan secara tuntas, sehingga harus ada upaya hukum yang jelas pada setiap masalah hukum yang dihadapi.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Jumlah Perda yang ditetapkan pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 10 Perda;
- b) Jumlah Perda yang dibatalkan pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 0 Perda;
- c) Persentase Kasus hukum yang diselesaikan pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 80%;
- d) Persentase Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti/dilaksanakan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 100%;

- e) Persentase Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 100%.

5) Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Guna memperoleh kepastian atas kesuksesan pembangunan daerah, pengawasan merupakan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan bukan hanya bersifat penindakan (represif) tetapi juga bersifat pencegahan (preventif), sehingga diharapkan dapat terwujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan akuntabilitas tersebut dapat diukur tingkat keberhasilan kinerja dari setiap instansi pemerintahan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Persentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 100%;
- b) Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi pada tahun 2013 ditargetkan 25%;
- c) Persentase informasi pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 100%.

6) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, harus dapat diukur dan dievaluasi tingkat keberhasilan kinerjanya.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Jumlah konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah;
- b) Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKK LPPD) pada tahun 2013 ditargetkan baik.

7) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didukung dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik pula, sehingga seiring dengan standarisasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 maka pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan akurasi dan kecepatan pengolahan datanya. Produk akhir pengelolaan keuangan daerah adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan harus selesai selambat lambatnya akhir Maret tahun berikutnya. Selain itu Pengelolaan asset daerah adalah bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban pengelolaan asset daerah ini sehingga pemanfaatannya dapat lebih maksimal.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:

- a) Opini laporan keuangan pada tahun 2013 ditargetkan (Wajar Tanpa Pengecualian) WTP;
- b) Laporan keuangan yang disusun pada tahun 2013 ditargetkan tepat waktu;
- c) Penetapan APBD pada tahun 2013 ditetapkan tepat waktu;
- d) Keberadaan Perubahan PERDA Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e) Persentase peningkatan PAD pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 5,51%;
- f) Rasio keberadaan kemandirian daerah ditargetkan 21,03%;
- g) Jumlah Perusahaan Daerah dalam kondisi sehat pada tahun 2013 ditargetkan 2 buah;

- h) Persentase Aset (Bangunan yang dipelihara dan dimanfaatkan) pada tahun 2013 ditargetkan 92,40%;

8) Meningkatnya peran legislatif dalam tugas pemerintahan

Melalui sekretariat DPRD, Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan layanan atas kebutuhan administrasi dan keuangan lembaga legislatif. Sehingga diharapkan legislatif sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dapat berfungsi secara maksimal khususnya dalam hal penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten yang berfihak kepada kepentingan publik serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Pelaksanaan voting yang dilakukan dalam sidang paripurna ditargetkan 0%;
- b) Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembahasan ranperda ditargetkan 100%;
- c) Jumlah perda inisiatif DPRD ditargetkan sebesar 3 perda.

9) Meningkatnya Pengelolaan Aparatur yang Profesional

Jumlah SDM yang besar memerlukan pengelolaan yang baik sehingga akan terwujud sinergi yang positif serta menghasilkan kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan tersebut meliputi penetapan ketrampilan, keahlian, kesejahteraan sampai dengan sistem karir yang transparan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Rasio pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 96,91 %;
- b) Rasio jabatan yang terisi pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 100%;

- c) Rasio Pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 100%;
- d) Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 100%;
- e) Kesesuaian SOTK SKPD dengan Pedoman / Peraturan tentang SOTK pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 100%;
- f) Persentase SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan pada tahun 2013 ditargetkan 60%.

10) Meningkatnya kerjasama Daerah

Kerjasama Daerah diperlukan untuk semakin meningkatkan kemampuan sumber daya Kabupaten.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : Jumlah MOU Kerjasama dengan Daerah Lain dan Pihak Ketiga pada tahun 2013 ditargetkan 20 buah.

11) Meningkatnya Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh kabupaten harus dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Keberadaan unit pelayanan pengadaan pada tahun 2013;
- b) Keberadaan E-procurement pada tahun 2013;
- c) Jumlah Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada tahun 2013 ditargetkan 25 orang.

12) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Layanan administrasi kependudukan yang dilakukan berupa pelayanan KTP, KK dan akte catatan sipil harus terus ditingkatkan

kualitasnya, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan juga semakin meningkat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Kepemilikan KTP pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 88,90%;
- b) Cakupan Penerbitan Akta kelahiran pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 94,34%;
- c) Lama pengurusan KTP pada tahun 2013 ditargetkan 1 hari.

13) Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa

Komunikasi dan informasi sangat dibutuhkan dalam rangka mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, sehingga dapat terjadi sinergi yang positif dalam pembangunan. Mengingat banyaknya segmen masyarakat, maka sistem komunikasi yang dilakukan juga harus menggunakan berbagai macam metode sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Keberadaan Website Pemerintah Daerah pada tahun 2013 ditargetkan semakin baik;
- b) Pengunjung website tahun 2013 ditargetkan 503.874 netter;
- c) Jumlah Sistem informasi yang tersedia pada tahun 2013 ditargetkan 25 buah;
- d) Jumlah pemberitaan di media pada tahun 2013 ditargetkan 390 kali;
- e) Keberadaan Persuratan secara elektronik pada tahun 2013 ditargetkan ada.

14) Meningkatnya penanganan pertanahan

Pelayanan pertanahan di daerah perlu dikoordinasikan antara pemerintah kabupaten dengan instansi pemerintah pusat badan pertanahan, sehingga diharapkan permasalahan pertanahan yang ada dapat diselesaikan untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : Penyelesaian Kasus Tanah Negara.

15) Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW

Kebijakan penataan ruang daerah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2011. Agar penerapan kebijakan pemanfaatan ruang dapat berhasil dalam pencapaian sasaran sesuai yang diharapkan, maka dalam implementasinya Pemerintah Daerah telah membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) melalui Keputusan Bupati Gresik yang mempunyai tugas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Keberadaan Perda RTRW pada Tahun 2013;
- b) Perubahan pemanfaatan fungsi kawasan RTRW pada tahun 2013.

16) Meningkatnya efektifitas perencanaan Pembangunan

Mengingat adanya keterbatasan sumber daya daerah baik SDM maupun keuangan maka perencanaan daerah harus disusun secara efektif dengan berupaya menyiapkan dokumen perencanaan yang baik sesuai dengan kemampuan SDM dan keuangan yang ada. Selain itu perlu juga adanya keterlibatan secara aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Ketersediaan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada tahun 2013;
- b) Program RKPD yang diakomodasi dalam APBD pada tahun 2013 ditargetkan 85%.

17) Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu

Data pembangunan yang disusun adalah Kabupaten Gresik dalam angka, perhitungan PDRB, pengukuran IPM dan dokumen lainnya. Data ini harus disediakan sebelum laporan pertanggungjawaban tahunan disusun dan sebelum perencanaan tahun berikutnya dibuat. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : Ketersediaan dokumen statistik (Kabupaten dalam Angka dan PDRB Kabupaten) pada tahun 2013.

18) Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal

Pengelolaan arsip oleh satuan kerja perangkat harus tertib, rapi dan handal. Oleh karena itu prioritas yang harus dilakukan adalah menyiapkan sistem dan sarana penyimpanan arsip sesuai standar. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : Penerapan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2013 ditargetkan 56,90%.

19) Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian

Untuk mendapatkan peserta transmigran yang siap diberangkatkan perlu dilakukan sosialisasi dan seleksi yang ketat serta pembinaan yang intensif kepada masyarakat. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : Pembinaan calon transmigran ditargetkan 25 orang.

- c. Untuk mencapai tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya usaha perdagangan

Untuk meningkatkan perekonomian daerah perlu ditingkatkan usaha perdagangan di daerah. Oleh karena itu keberadaan pasar komoditas dan pasar umum harus tersedia di setiap wilayah. Kemudahan akses transportasi dan prasarana yang memadai menjadi suatu kebutuhan untuk meningkatkan sektor ini.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Pertumbuhan penerbitan SIUP pada tahun 2013 ditargetkan 11 %.
- b) Pertumbuhan penerbitan TDP diterbitkan pada tahun 2013 sebanyak 10,2%;
- c) Pertumbuhan penerbitan TDG pada tahun 2013 ditargetkan 16,2 %;
- d) Pertumbuhan nilai investasi perdagangan pada tahun 2013 ditargetkan 1,5 %;
- e) Jumlah Pameran/Ekspo yang diikuti/dilaksanakan pada tahun 2013 ditargetkan 3 even.

2) Meningkatnya sektor industri

Untuk meningkatkan sektor industri perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan para pelaku industri di daerah. Beberapa produk dari industri di wilayah kabupaten perlu mendapatkan perhatian sehingga mampu meningkatkan ekonomi daerah.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Pertumbuhan Industri pada tahun 2013 ditargetkan 2%;
- b) Pertumbuhan Nilai Produksi pada tahun 2013 ditargetkan 3%.

3) Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan sektor yang paling banyak menyerap pelaku ekonomi di kabupaten, sehingga upaya untuk memberdayakan dan melindungi kesinambungan usaha mereka harus dilakukan. Antara lain dengan meningkatkan kemampuan usaha koperasi dan UKM, meningkatkan kualitas kelembagaan, meningkatkan jiwa wirausaha pelaku ekonomi serta memberikan kemudahan akses permodalan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Koperasi aktif yang pada tahun 2013 ditargetkan 85%;
- b) Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang pada tahun 2013 ditargetkan 62%;
- c) Koperasi yang mendapatkan penilaian baik pada tahun 2013 ditargetkan 77%.

4) Meningkatnya investasi di daerah

Untuk meningkatkan investasi di daerah perlu dilakukan berbagai upaya mulai dari promosi potensi daerah, regulasi perijinan, kesiapan infrastruktur sampai dengan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha. Usaha ini harus dilakukan oleh lintas SKPD yang bersangkutan secara simultan sehingga mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Gresik.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator:

- a) Kenaikan Nilai Realisasi PMDN pada tahun 2013 ditargetkan 810,90 milyar rupiah;
- b) Persentase Penyelesaian Permohonan: Ijin Lokasi, Ijin Pertambangan Daerah (SIPD), Ijin Gangguan (HO), Ijin

Mendirikan Bangunan, Ijin Prinsip Ijin Usaha pada tahun 2013 ditargetkan 100%.

5) Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sektor pertanian tanaman pangan merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat. Untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura diperlukan pembinaan yang intensif.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Produksi Pertanian pada tahun 2013 ditargetkan untuk Padi ditargetkan 390.611 ton, Jagung 107.133 ton, kedelai 3.395 ton, Kacang tanah 5.040 ton, Kacang hijau 2.172 ton, Ubi kayu 27.882 ton dan Ubi jalar 5.812 ton.
- b) Produksi Sayur pada tahun 2013 ditargetkan untuk Bawang merah 3.399 ton, Sawi 600 ton, Kacang panjang 513 ton, Cabe 784 ton, Tomat 364 ton, Terong 8.941 ton, Ketimun 793 ton, Labu Siam 600 ton, Kangkung 1.155 ton dan Bayam 617 ton.
- c) Produksi Buah pada tahun 2013 ditargetkan untuk Jambu biji 5.450 Kuintal, Jeruk 1.879 Kuintal, Mangga 321.396 Kuintal, Pepaya 8.671 Kuintal, Pisang 177.658 Kuintal, Belimbing 2.379 Kuintal, Sawo 1.136 Kuintal dan buah Sirsak 971 Kuintal.

6) Meningkatnya Produksi Hasil Perkebunan

Produksi perkebunan di Kabupaten Gresik cukup mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan potensi perkebunan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator : produksi hasil perkebunan pada tahun 2013 ditargetkan untuk tembakau 11 ton, tebu 8.214 ton, kelapa 3.650 ton, kapuk randu 54 ton, kunyit 930 ton dan siwalan 935 ton.

7) Meningkatnya produksi dan populasi peternakan

Untuk menjaga kecukupan gizi masyarakat perlu dilakukan pembangunan di bidang peternakan. Pembangunan ini ditujukan untuk menjaga persediaan kebutuhan daging, susu dan telur serta populasi binatang ternak.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Produksi peternakan pada tahun 2013 ditargetkan untuk daging 12.012,10 ton, telur 2.664,10 ton, dan susu 407,07 ton;
- b) Populasi binatang ternak dan unggas pada tahun 2013 ditargetkan untuk sapi potong 53.042 ekor, sapi perah 1.034 ekor, kerbau 244 ekor, kambing 52.957 ekor, domba 30.272 ekor, kuda 282 ekor, ayam buras 655.001 ekor, ayam ras petelur 131.362 ekor, ayam ras pedaging 2.258.192 ekor, itik 25.760 ekor dan entok 13.421 ekor.

8) Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lingkungan

Untuk menjaga pemanfaatan sumber daya alam agar terjaga kelestariannya maka diperlukan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan. Sehingga pengawasan pada lingkungan eksploitasi alam harus dilakukan secara ketat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada tahun 2013 ditargetkan 0,013 %;
- b) Jumlah Produksi hasil hutan pada tahun 2013 ditargetkan untuk kayu jati 600 m³ dan non kayu jati 46 m³.

9) Meningkatnya Produksi dan produktivitas perikanan

Agar dapat mengembangkan sektor perikanan perlu dilakukan peningkatan produksi perikanan budidaya dan perairan umum. Untuk

itu diperlukan jumlah benih ikan yang cukup. Peningkatan perikanan budidaya dilakukan melalui budidaya kolam dan tambak sedangkan untuk produksi perairan umum dilakukan melalui penyebaran benih ikan pada perairan umum serta hasil tangkapan laut oleh nelayan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Produksi Perikanan Budi daya pada tahun 2013 ditargetkan untuk udang windu 1.765,00 ton, udang vannamee 3.970,00 ton, bandeng 32.370,00 ton, kerapu 10,40 ton, nila 1.080,00 ton;
- b) Produksi Perikanan Budi daya penangkapan pada tahun 2013 ditargetkan 17.200,00 ton;
- c) Produksi Perikanan Budi daya perairan umum pada tahun 2013 ditargetkan 600,00 ton;
- d) Produksi tambak payau pada tahun 2013 ditargetkan 96,11 ton/Ha;
- e) Produksi tambak tawar pada tahun 2013 ditargetkan 111,07 ton/Ha.

10) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan dapat dipicu dari perkembangan industri. Oleh karena itu setiap industri seharusnya memiliki instalasi pengolahan limbah yang baik sehingga dapat meminimalkan pencemaran lingkungan, Hal ini memerlukan ketegasan dari Pemerintah Kabupaten untuk mencegah terjadinya pencemaran tersebut dengan menerapkan sanksi terhadap pelaku industri yang melakukan pencemaran lingkungan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Luas Lahan Kritis pada tahun 2013 ditargetkan seluas 11.492 Ha;

- b) Rasio Luas Kawasan Lindung pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 9%;
- c) Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 58 unit;
- d) Jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 153 unit;
- e) Luas RTH perkotaan ditargetkan pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 716,35 Ha.

11) Meningkatnya penanganan persampahan

Agar kesehatan lingkungan dapat terjaga dengan baik maka setiap sampah yang dihasilkan oleh masyarakat harus mampu terangkut dan terbuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Persentase Penanganan sampah pada tahun 2013 sebesar 90%;
- b) Rasio Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun 2013 sebanyak 0,029 m³/penduduk;
- c) Jumlah tempat pengolahan sampah target 84 unit.

12) Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Aman, Lancar, dan Terjangkau

Agar dapat menjamin terlaksananya lalu lintas orang dan barang di wilayah Kabupaten Gresik diperlukan pelayanan transportasi yang baik. Pelayanan dimaksud bukan hanya berupa sarana angkutan umum yang layak jalan saja tetapi juga sarana lalu lintas seperti rambu, marka, halte dan sebagainya sebagai pendukung keselamatan dan kenyamanan transportasi daerah.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Persentase Ketersediaan Angkutan darat pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 79,83%;
- b) Persentase Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 37,44%;
- c) Persentase Angkutan Umum darat dalam kondisi layak jalan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 66,83%;
- d) Ketersediaan angkutan laut penyeberangan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 100 %;
- e) Pembangunan Bandara Domestik di Pulau Bawean pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 100 %.

13) Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja

Menyediakan lapangan kerja yang layak bagi semua warganya merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten. Sehingga melalui kebijakan publik yang terencana dan jelas harus mampu menurunkan angka pengangguran terbuka kabupaten, menciptakan lapangan kerja baik formal maupun informal yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 67,25%;
- b) Pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 32,40%;
- c) Angka pengangguran penduduk usia 15-24 tahun pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 18,78%.

14) Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja

Agar dapat menjamin setiap pekerja memperoleh hak-haknya maka perlu dilakukan upaya pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha tentang perlindungan terhadap tenaga kerja, yang meliputi keselamatan kerja, kesehatan kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Kepatuhan terhadap Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 60,06%;
- b) Kepatuhan Terhadap Norma kerja pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 74,79%;
- c) Kepatuhan Terhadap Norma Jaminan Sosial Tenaga kerja pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 93,96%;
- d) Angka Kecelakaan Kerja pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 4,32%;
- e) Angka Penuntasan/ penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 100%;
- f) Pemberlakuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 7,94%;
- g) Kepatuhan atas ketentuan mengenai Kepemilikan Lembaga Kerjasama Bipartit pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 3,18%.

15) Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata

Untuk meningkatkan pariwisata daerah salah satu ukurannya adalah jumlah kunjungan wisatawan. Untuk itu perlu dikembangkan obyek-obyek pariwisata daerah yang dapat menarik kunjungan masyarakat. Disamping itu, agar kunjungan dapat meningkat perlu terjalin koordinasi dan kerjasama dengan pengusaha pariwisata baik di dalam maupun luar Kabupaten.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: jumlah kunjungan wisata pada tahun 2013 ditargetkan 1.400.000 orang.

16) Meningkatnya sarana infrastruktur daerah

Pemenuhan infrastuktur jalan dan jembatan dimaksudkan untuk mendukung pengembangan ekonomi di daerah. Ketersediaan jalan dan jembatan yang baik akan mampu mendorong pelaku ekonomi untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu pemerintah kabupaten harus mendorong tersedianya jalan dan jembatan yang memadai terutama untuk daerah pengembangan ekonomi yang telah direncanakan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2013 ditargetkan 72,00%;
- b) Jembatan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2013 ditargetkan 95,35%;
- c) Persentase Jalan Poros Desa Yang Terbangun pada tahun 2013 ditargetkan 80,00%.

17) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi

Pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian. Oleh karena itu upaya prioritas dalam pengelolaan air adalah ketersediaan air untuk pertanian.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Panjang jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2013 ditargetkan 53,00%;
- b) Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik 71,39%.

18) Meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral daerah

Energi dan Sumber daya mineral yang dimiliki oleh daerah merupakan karunia Tuhan yang perlu dijaga kelestariannya. Eksploitasi yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kelestariannya akan menyebabkan potensi tersebut menjadi habis dan hilang. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan terhadap pertambangan yang ada di masyarakat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase ABT berijin yang membayar pajak pada tahun 2013 ditargetkan 72,91%.

- d. Untuk mencapai tujuan Meningkatnya kualitas hidup masyarakat ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah

Pembangunan pendidikan terfokus kepada dua hasil yang ingin dicapai yaitu pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar lebih menekankan kepada kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan peningkatan kualitas pendidikan mengarah kepada kualitas hasil anak didik.

Pemerataan kesempatan belajar dapat dicapai melalui peningkatan dan pemeliharaan gedung sekolah, peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah serta bantuan biaya pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas guru, peningkatan sarana penunjang belajar seperti buku, laboratorium dan ruang praktek, peningkatan manajemen sekolah, peningkatan metodologi pembelajaran.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2013 ditargetkan 73%;
- b) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) pada tahun 2013 ditargetkan 100%;
- c) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A pada tahun 2013 ditargetkan 99,16%;
- d) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 93,06 %;
- e) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/Paket C pada tahun 2013 ditargetkan 78,30%;
- f) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI pada tahun 2013 ditargetkan 0,05%;
- g) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs pada tahun 2013 ditargetkan 0,3%;
- h) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA pada tahun 2013 ditargetkan 0,15%;
- i) Angka Kelulusan (AL) SD/MI pada tahun 2013 ditargetkan 100%;
- j) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs pada tahun 2013 ditargetkan 100%;
- k) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA pada tahun 2013 ditargetkan 100,00%;
- l) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2013 ditargetkan 94,79%;
- m) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2013 ditargetkan 91,20%;
- n) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2013 ditargetkan 93,00%.

2) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diharapkan usia harapan hidup masyarakat juga meningkat. Upaya yang akan

dilakukan adalah dengan meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi, pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah, pelayanan imunisasi, pelayanan pengobatan/perawatan, pelayanan kesehatan jiwa, pemantauan pertumbuhan balita, pelayanan gizi, pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan komprehensif, pelayanan gawat darurat, penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa dan gizi buruk, pencegahan dan pemberantasan penyakit endemis, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan pengendalian vektor, pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum, penyuluhan perilaku sehat, penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (P3 NAPZA) berbasis masyarakat, pelayanan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, pelayanan penggunaan obat generik, penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan, penyelenggaraan pembiayaan untuk keluarga miskin dan masyarakat rentan, pelayanan kesehatan kerja, pelayanan kesehatan lanjut usia, pelayanan gizi, pencegahan dan pemberantasan HIV-AIDS serta pelayanan dasar dan rujukan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 93,00%;
- b) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 80%;
- c) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 93%;
- d) Cakupan Pelayanan Nifas pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 93%;
- e) Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 80%;

- f) Cakupan Pelayanan Anak Balita pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 77%;
- g) Cakupan Kunjungan Bayi pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 90%;
- h) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 96%;
- i) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (BTA+) pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 70%;
- j) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 100%;
- k) Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 85%;
- l) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 100%;
- m) Cakupan Balita yang Mendapat Vitamin A pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 80%;
- n) Persentase Rumah Sehat pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 83%;
- o) Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 98,08%;
- p) Pengadaan Obat Esensial pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 99,19%;
- q) Pengadaan Obat Generik pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 99,55%;
- r) Cakupan Rawat Jalan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 15%;
- s) Cakupan Rawat Inap pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 1,50%;
- t) Cakupan rumah tangga sehat ditargetkan sebesar 65%;
- u) Posyandu Purnama pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 74%.
- v) Pelayanan pasien jamkesmas dan jamkesda pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 1,25%;

- w) *Bed Occupancy Rate* pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 68,77%;
- x) *Average Lenght Of Stay* pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 4,50 hari;
- y) *Turn Over Internal* pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 1,90 hari;
- z) Bed Turn Over pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 49,79 kali.

3) Meningkatnya pelayanan keluarga berencana

Pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diarahkan pada pelayanan peserta KB secara menyeluruh. Sebagai bagian dari program pengendalian jumlah penduduk, maka urusan ini memegang peranan penting dalam menekan pertumbuhan penduduk. Dengan didasari oleh kesadaran yang tinggi dari masyarakat tentang pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk maka pelayanan alat KB kepada pasangan usia subur harus ditingkatkan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Prevalensi peserta KB Aktif pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 78,40 %;
- b) Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 1,14%;
- c) Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need) pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 21,45%;
- d) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 21,25%;
- e) Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa/Kelurahan pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 100%.

4) Meningkatnya minat baca masyarakat

Untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dilakukan upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Diantaranya dengan cara meningkatkan aksesibilitas masyarakat kepada perpustakaan umum serta melakukan penambahan buku bacaan dan tempat baca yang lebih banyak di masyarakat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2013 ditargetkan 129.142 buku;
- b) Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2013 ditargetkan 603.827 orang;
- c) Jumlah anggota perpustakaan 28.987 orang.

5) Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat

Dengan dijadikannya urusan pertanian menjadi prioritas pembangunan maka diharapkan surplus stok pangan daerah dapat semakin meningkat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- a) Keberadaan regulasi ketahanan pangan pada tahun 2013;
- b) Ketersediaan pangan pada tahun 2013 ditargetkan 199,18 kg/kapita/tahun;
- c) Rata-rata konsumsi bahan pangan utama pada tahun 2013 ditargetkan 94,35 kg/kapita/tahun.

6) Meningkatnya prestasi olah raga daerah

Untuk meningkatkan prestasi pemuda di daerah perlu dilakukan pembinaan dan ajang prestasi pemuda. Sedangkan untuk meningkatkan prestasi olahraga dilakukan melalui kerja sama dengan KONI kabupaten dan organisasi persatuan olahraga yang ada di

daerah. Dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan diharapkan akan muncul pemuda dan olahragawan yang berprestasi di daerah.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- a) Persentase organisasi kepemudaan yang aktif pada tahun 2013 ditargetkan 100%;
- b) Jumlah gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) pada tahun 2013 ditargetkan 2 unit;
- c) Jumlah Lapangan Olah Raga pada tahun 2013 ditargetkan 26 unit;
- d) Persentase cabang olah raga yang aktif 89,66%.

3. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

a. Strategi

Untuk mencapai tujuan daerah dalam menjalankan misi guna mendukung terwujudnya visi yang dicita-citakan untuk menjadikan Gresik Yang Agamis, Adil, Makmur dan Berkehidupan Yang Berkualitas, maka strategi pembangunan Kabupaten Gresik untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Misi ke-1 :

Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah :

- 1. Meningkatkan kegiatan keagamaan melalui fasilitasi dan bantuan kepada aktivitas keagamaan;
- 2. Membangun suasana yang kondusif bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 3. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam membangun kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku;

4. Melakukan pembinaan kepada pemuda dan masyarakat untuk meningkatkan prestasi dan olah raga di daerah;
5. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui advokasi dan pembinaan secara berkala;
6. Memelihara dan menjaga eksistensi seni dan budaya lokal.

Misi ke-2 :

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan;
2. Memperluas jangkauan pelayanan sosial dan penanganan PMKS;
3. Menyediakan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai;
4. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan secara lebih intensif;
5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pada semua jenjang;
6. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
8. Meningkatkan proses perencanaan pembangunan yang berorientasi kepada kinerja yang baik.

Misi ke-3 :

Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah :

1. Membangun akses yang luas kepada masyarakat dalam mengembangkan industri dan perdagangan di daerah;
2. Mendorong pertumbuhan koperasi dan UMKM yang berbasis pada pengembangan ekonomi lokal;

3. Meningkatkan investasi penanaman modal di daerah melalui pelayanan perijinan yang baik;
4. Meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan;
5. Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan pembinaan pada bidang perikanan dan kelautan;
6. Meningkatkan infrastruktur daerah baik dalam bidang bina marga maupun pengairan.

Misi ke-4 :

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana serta biaya pendidikan yang murah;
2. Meningkatnya kualitas kesehatan melalui pemerataan akses dan keterjangkauan biaya kesehatan bagi masyarakat;
3. Menekan pertumbuhan penduduk melalui pelayanan keluarga berencana yang terjangkau;
4. Menjaga tingkat ketersediaan pangan daerah demi terwujudnya ketahanan pangan di daerah.

C. Arah Kebijakan Daerah

1. **Arah kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan misi “Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati yang dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri” adalah :**

- 1) Membantu/ memfasilitasi peningkatan kegiatan keagamaan di masyarakat;
- 2) Meningkatkan rasa sejuk , santun dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 3) Mengembangkan budaya masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan;
- 4) Meningkatkan prestasi olah raga melalui pembinaan induk organisasi dan komite olah raga;
- 5) Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui pemberdayaan pada lembaga pemerintah, sektor industri dan lembaga non formal;
- 6) Melestarikan dan mengembangkan keragaman kekayaan budaya dengan meningkatkan apresiasi dan peran serta komunitas budaya lokal.

2. Arah kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan misi “Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik” adalah :

- 1) Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat perdesaan;
- 2) Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS dengan peningkatan rehabilitasi dan bantuan dasar kesejahteraan sosial Meningkatkan sarana dan parasarana dasar pemukiman;
- 3) Mendorong percepatan pencapaian good governance melalui pengembangan produk hukum;
- 4) Meningkatkan mutu dan hasil pengawasan melalui peningkatan profesionalisme aparaturnya pengawasan dan monitoring tindak lanjut;
- 5) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
- 6) Meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan peningkatan sumberdaya penerimaan daerah;

- 7) Meningkatkan fungsi legislatif melalui pemberdayaan dan penampungan aspirasi masyarakat;
- 8) Meningkatkan profesionalisme aparat melalui kediklatan dan memberikan hak-hak pegawai sesuai ketentuan;
- 9) Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam administrasi kependudukan;
- 10) Meningkatkan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi (TI);
- 11) Meningkatkan pengelolaan pertanahan;
- 12) Meningkatkan dan mengefektifkan pengendalian tata ruang daerah melalui dokumen tata ruang dan penegakan penerapannya;
- 13) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan;
- 14) Mendokumentasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan informasi hasil-hasil pembangunan;
- 15) Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dan pengelolaan arsip daerah.

3. Arah kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan misi “Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan” adalah :

- 1) Mengembangkan sistem pemasaran produk unggulan/andalan;
- 2) Mengembangkan industri kecil dan menengah;
- 3) Revitalisasi kelembagaan dan usaha koperasi melalui pembinaan intensif;
- 4) Meningkatkan investasi di daerah melalui instrumentasi prosedur pelayanan investasi serta pengembangan kawasan industri dan infrastruktur;
- 5) Mengembangkan jaringan pemasaran produk pertanian;

- 6) Optimalisasi sumberdaya pertanian baik penyuluh maupun petani;
- 7) Mengembangkan komoditas perkebunan, melalui kimbun (kawasan industri masyarakat perkebunan);
- 8) Meningkatkan wilayah pengembangan sentra-sentra produksi dan populasi peternakan serta didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan;
- 9) Optimalisasi pemanfaatan hutan dan lahan serta pengembangan tanamannya secara berkelanjutan;
- 10) Meningkatkan produksi perikanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap perairan umum, kolam, laut dan tambak;
- 11) Meningkatkan pembinaan atas usaha/kegiatan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran pada tanah, air, dan udara;
- 12) Meningkatkan penanganan sampah secara berkelanjutan dengan mendorong swadaya masyarakat;
- 13) Meningkatkan kelancaran angkutan orang, barang dan jasa serta peningkatan keselamatan lalu lintas jalan;
- 14) Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- 15) Mengembangkan produk-produk wisata dan meningkatkan promosi
- 16) Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan ;
- 17) Meningkatkan pelayanan irigasi;
- 18) Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral daerah.

4. Arah kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan misi “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.” adalah :

- 1) Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan;

- 2) Meningkatkan pemerataan dan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, terutama dengan membebaskan biaya pemeriksaan di puskesmas untuk penduduk miskin;
- 3) Meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan akses pelayanan KB kepada masyarakat;
- 4) Menjadikan perpustakaan sebagai sarana penambah pengetahuan;
- 5) Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan dan sumber karbohidrat dan sumber protein.

D. Prioritas Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 sebagaimana Perda Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2011, prioritas pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan.
2. Revitalisasi birokrasi.
3. Pembangunan ekonomi daerah dengan titik berat ekonomi kerakyatan.
4. Revitalisasi pelayanan pendidikan dasar dan menengah.
5. Revitalisasi pelayanan kesehatan.
6. Penanggulangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan hidup.

Didalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2013, prioritas pembangunan daerah pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- 1 Perbaikan Tata Kelola Birokrasi
- 2 Pemantapan pelayanan dasar di bidang Pendidikan dan Kesehatan
- 3 Pengelolaan Infrastruktur dan lingkungan hidup
- 4 Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut diatas, maka pada tahun 2013 ditetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Kebijakan perbaikan tata kelola birokrasi meliputi :
 - a. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan.
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintahan yang memadai dan data kependudukan yang baik.
2. Kebijakan Pemantapan Pelayanan Dasar di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan meliputi :
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - b. Peningkatan Penyediaan sarana dan Prasarana Pendidikan dan kesehatan;
 - c. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan;
 - d. Peningkatan kapasitas SDM dibidang Pendidikan dan Kesehatan;
3. Kebijakan Pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup :
 - a. Peningkatan kemantapan fisik jalan dan jembatan serta penambahan kapasitas jalan dan sistem jaringan jalan dalam upaya meningkatkan kelancaran lalu lintas;
 - b. Peningkatan kualitas dan kuatitas sarana dan prasarana drainase dalam upaya mengantisipasi ancaman bahaya banjir/genangan;
 - c. Perluasan jaringan dan pembangunan utilitas kota secara merata dan terpadu;
 - d. Peningkatan kualitas pembangunan dan rehabilitasi gedung/fasilitas pemerintahan dan pemerintah daerah untuk kinerja dan layanan publik yang lebih prima dan maksimal;
 - e. Peningkatan kuantitas penyediaan dan peningkatan kualitas pengelolaan prasarana lingkungan. Utilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

- f. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau serta penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman;
 - g. Peningkatan kualitas dan kuantitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - h. Peningkatan pelaksanaan penataan ruang secara terpadu mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - i. Pengembangan manajemen sisi permintaan lalu lintas (traffic demand management) dan peningkatan pelayanan angkutan umum melalui pembangunan simpul-simpul transportasi baru;
 - j. Pengurangan sampah melalui pelaksanaan 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle) dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan mulai dari sumber sampah, pengangkutan, sampai pengolahan akhir di TPA;
 - k. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan dampak pencemaran lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup;
 - l. Peningkatan luasan dan kualitas pengelolaan ruang terbuka hijau;
4. Kebijakan Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat meliputi :
- a. Penguatan institusi keagamaan, kajian keagamaan, kegiatan keagamaan dan kerukunan umat beragama;
 - b. Pelestarian seni budaya daerah dan peningkatan prestasi olahraga;
 - c. Mengembangkan potensi wisata daerah;
 - d. Optimalisasi pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - e. Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan kebutuhan dasar penguatan ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat miskin berbasis keterampilan;
 - f. Optimalisasi pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL);
 - g. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja;
 - h. Optimalisasi pengembangan investasi;
 - i. Peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan;

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu unsur penting adalah pendapatan daerah yang mencerminkan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah merupakan pendorong bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga diperlukan kebijakan strategis serta upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara terus menerus. Kebijakan strategis serta upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui program dan kegiatan terukur, terkoordinasi serta berkelanjutan dengan mengedepankan aspek pelayanan publik diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan daerah sejalan dengan perkembangan perekonomian.

Pada dasarnya pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran serta tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara brutto, dalam arti bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ daerah lain dalam rangka bagi hasil. Dari sisi perencanaan, maka pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Upaya-upaya yang ditempuh dalam kaitannya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah meliputi :

- a. Peningkatan manajemen pemungutan pendapatan daerah;
- b. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah untuk memenuhi kewajibannya;

- c. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan melalui kemudahan, ketepatan dan kecepatan sesuai dengan standar pelayanan;
- e. Mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah agar mampu memberikan kontribusi pendapatan kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan fungsi penyertaan modal;
- f. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah;
- g. Melaksanakan evaluasi terhadap peraturan perundangan terkait dengan dasar pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan kondisi terkini;
- h. Peningkatan koordinasi dan dukungan pemungutan bagi hasil pajak pemerintah dan provinsi;
- i. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi pemungutan pendapatan daerah.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah tahun 2013 diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Total Target Pendapatan Daerah tahun 2013 adalah sebesar Rp1.855.532.965.319,56 , sampai dengan akhir tahun anggaran terrealisasi sebesar Rp1.840.555.714.829,17 atau 99,19 %.

Komposisi dari masing-masing sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Total target Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp480.407.340.260,56, terrealisasi sebesar Rp502.766.529.904,17 atau 104,65 %, meliputi :

- Pajak Daerah dengan target sebesar Rp.266.600.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp287.204.002.798,08 atau 107,73 %;
- Hasil Retribusi Daerah dengan target sebesar Rp79.664.493.802,00, terrealisasi sebesar Rp68.748.761.969,35 atau 86,30 %;

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan target sebesar Rp19.230.000.000,00, sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terrealisasi sebesar Rp19.586.929.857,01 atau 101,86 %;
- Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan target sebesar Rp114.912.846.458,56 terrealisasi sebesar Rp127.226.835.279,73 atau 110,72 %.

2) Dana Perimbangan.

Total target Dana Perimbangan sebesar Rp1.024.497.473.173,00 terrealisasi sebesar Rp996.197.113.935,00 atau 97,24 % , meliputi :

- Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dengan target sebesar Rp170.487.782.173,00 terrealisasi sebesar Rp142.187.422.935,00 atau 83,40 %;
- Dana Alokasi Umum (DAU) dengan target sebesar Rp804.903.511.000,00 terrealisasi sebesar Rp804.903.511.000,00 atau 100 %;
- Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan target sebesar Rp49.106.180.000,00 terrealisasi sebesar Rp 49.106.180.000,00 atau 100 %

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, ditargetkan sebesar Rp350.628.151.886,00 terrealisasi sebesar Rp341.592.070.990,00 atau 97,42 %, terdiri atas:

- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dengan target sebesar Rp133.655.814.886,00 terrealisasi sebesar Rp124.619.733.990,00 atau 93,24 %.
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dengan target sebesar Rp199.836.702.000,00 terrealisasi sebesar Rp199.836.702.000,00 atau 100 %;
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dengan target sebesar Rp17.135.635.000,00 terrealisasi sebesar Rp17.135.635.000,00 atau 100 %.

3. Permasalahan dan Solusi

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2013 secara keseluruhan belum dapat memenuhi target yang ditetapkan atau terrealisasi sebesar 99,19 %. Permasalahan tersebut disebabkan tidak tercapainya komponen pendapatan daerah dari dana perimbangan, khususnya bagi hasil pajak/ bukan pajak dari pemerintah serta dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, khususnya dari bagi hasil pajak dari provinsi. Disamping itu masih ada beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum sesuai dengan target yang direncanakan.

Solusi atas permasalahan tersebut adalah :

1. Dengan melihat bahwa komponen dana perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah kewenangan pemerintah dan provinsi, maka dalam hal menetapkan rencana pendapatan diperlukan koordinasi intensif sehingga realisasi dari dana perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah akan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
2. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum dapat mencapai target, diperlukan upaya perhitungan rasional berdasarkan data dasar jenis pendapatan secara rasional sesuai dengan kondisi terkini. Hal tersebut dipakai sebagai dasar penentuan rencana pendapatan, sehingga dalam pelaksanaan optimalisasi pendapatan akan sesuai dengan perkembangan terkini atas setiap jenis pendapatan.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Gresik, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Belanja daerah disusun berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Target dan Realisasi Belanja

Total Belanja Daerah tahun anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp2.090.734.576.459,00, terrealisasi sebesar Rp1.897.270.106.456,32 atau 90,75 %. Belanja Daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

1) Belanja Tidak Langsung :

Total alokasi Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp1.045.911.024.023,00 terrealisasi sebesar Rp992.715.498.549,11 atau 94,91%, terdiri dari :

- Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp739.019.761.757,00, terrealisasi Rp706.915.344.010,00 atau 95,66 %;
- Belanja Bunga direncanakan sebesar Rp705.367.476,00, terrealisasi sebesar Rp329.156.539,11 atau 46,66 %;
- Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp114.180.116.000,00 terrealisasi sebesar Rp107.818.513.200,00 atau 94,43 %;
- Belanja Bantuan Sosial, direncanakan Rp19.373.885.000,00, terrealisasi sebesar Rp16.870.050.000,00 atau 87,08 %;
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemdes direncanakan sebesar Rp169.631.893.790,00, terrealisasi sebesar Rp160.020.833.800,00 atau 94,33 %;
- Belanja Tidak Terduga, direncanakan Rp3.000.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp761.601.000,00 atau 25,39 %.

2) Belanja Langsung :

Total alokasi Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp1.044.823.552.436,00 terrealisasi sebesar Rp904.554.607.907,21 atau 86,57 %, terdiri dari :

- Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp129.962.604.461,00, terrealisasi sebesar Rp120.755.307.751,00 atau 92,92 %;
- Belanja Barang dan Jasa direncanakan Rp399.138.370.547,00, terrealisasi sebesar Rp366.033.201.747,21 atau 91,71%;
- Belanja Modal direncanakan sebesar Rp515.722.577.428,00, terrealisasi sebesar Rp417.766.098.409,00 atau 81,01 %.

3. Permasalahan dan Solusi

Penyerapan anggaran di Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2013 telah cukup baik dengan indikator penyerapan secara keseluruhan mencapai 90,75 %. Pada sisi Belanja Tidak Langsung terdapat penyerapan di bawah 50 % yaitu belanja bunga dan belanja tidak terduga.

Secara umum, kinerja pemerintah dapat berjalan dengan baik. program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun apabila dicermati, dalam melaksanakan program dan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Hal tersebut menyebabkan penyerapan anggaran dilakukan pada triwulan IV atau menjelang berakhirnya tahun anggaran. Oleh karena itu diharapkan setiap SKPD dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun sehingga penyerapan anggaran tidak terakumulasi pada akhir tahun anggaran, serta meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi.

C. Pembiayaan Daerah

Alokasi Pembiayaan Netto berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp235.201.611.139,44, terrealisasi sebesar Rp235.947.231.139,48 atau 100,32 % yang terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp249.199.940.539,44, terrealisasisebesar Rp249.200.440.539,44 atau 100%, terdiri dari:
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) direncanakan sebesar Rp249.199.940.539,44 ,terrealisasi sebesar Rp249.200.440.539,44 atau 100 %;
2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp13.998.329.400,00, terrealisasi sebesar Rp13.253.209.399,96 atau 94,68 % yang terdiri dari:
 - Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah dengan alokasi sebesar Rp10.700.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.680.000.000 atau 99,81 %;
 - Pembayaran Pokok Utang direncanakan sebesar Rp3.298.329.400,00, terrealisasi sebesar Rp2.573.209.399,96 atau 78,02 %.
- 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp179.232.839.512,33.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemandirian pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya daerah dalam meningkatkan kesejahteraan umum merupakan akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang berazaskan desentralisasi. Sejalan dengan azas desentralisasi sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kabupaten Gresik menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013 ini, penyelenggaraan urusan pemerintahan disajikan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana setelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengelompokkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam program dan kegiatan pada setiap SKPD, 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan serta belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

A. Program dan Kegiatan pada setiap SKPD

Program dan kegiatan pada setiap SKPD merupakan belanja operasional rutin pada masing-masing SKPD untuk mendukung penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan yang menjadi tugas SKPD dengan alokasi anggaran untuk seluruh SKPD sebesar Rp108.546.181.021,18 terrealisasi sebesar Rp98.163.481.116,00 tidak terserap Rp10.382.699.905,18.

Adapun rincian jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan masing-masing SKPD serta alokasi anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan melaksanakan 4 program terdiri 41 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.476.012.348,00 terrealisasi sebesar Rp4.209.583.592,00, tidak terserap Rp266.428.756,00;
- 2) Dinas Kesehatan melaksanakan 4 program terdiri 23 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.104.570.221,00, terrealisasi sebesar Rp15.342.170.101,00 tidak terserap Rp762.400.120,00;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 4 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.636.990.920,00 terrealisasi sebesar Rp6.447.332.786,00, tidak terserap Rp189.658.134,00;
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 4 program terdiri 16 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.077.009.000,00, terrealisasi sebesar Rp1.066.832.361,00 tidak terserap Rp10.176.639,00;
- 5) Dinas Perhubungan melaksanakan 4 program terdiri 24 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.311.951.942,00 terrealisasi sebesar Rp3.207.284.019,00, tidak terserap Rp104.667.923,00;
- 6) Badan Lingkungan Hidup melaksanakan 4 program terdiri 19 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.409.334.000,00 terrealisasi sebesar Rp2.293.347.773,00 tidak terserap Rp115.986.227,00;

- 7) Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil melaksanakan 4 program terdiri 23 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.606.672.750,00 terrealisasi sebesar Rp2.038.691.324,00 tidak terserap Rp567.981.426,00;
- 8) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan 4 program terdiri 24 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.803.930.000,00 terrealisasi sebesar Rp1.766.036.992,00, tidak terserap Rp37.893.008,00;
- 9) Dinas Sosial melaksanakan 4 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.145.923.500,00 terrealisasi sebesar Rp1.069.930.951,00, tidak terserap Rp75.992.549,00;
- 10) Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 3 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.232.911.500,00 terrealisasi sebesar Rp1.143.712.779,00, tidak terserap Rp89.198.721,00;
- 11) Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 4 program terdiri 20 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp742.037.000,00 terrealisasi sebesar Rp737.258.990,00 tidak terserap Rp4.778.010,00;
- 12) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 3 program terdiri 19 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.950.553.500,00, terrealisasi sebesar Rp1.871.794.419,00, tidak terserap Rp78.759.081,00;
- 13) Badan Penanaman Modal dan Perizinan melaksanakan 4 program terdiri 15 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.357.200.000,00 terrealisasi sebesar Rp1.249.135.299,00 tidak terserap Rp108.064.701,00;
- 14) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga melaksanakan 4 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.687.800.500,00, terrealisasi sebesar Rp1.600.129.103,00, tidak terserap Rp87.671.397,00;

- 15) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan 3 program terdiri 12 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp287.731.500,00, terrealisasi sebesar Rp288.417.634,00 tidak terserap Rp9.313.866,00;
- 16) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 3 program terdiri 17 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp790.963.000,00 terrealisasi sebesar Rp766.774.203,00, tidak terserap Rp24.188.797,00;
- 17) Sekretariat Daerah melaksanakan 5 program terdiri 37 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp53.532.900.385,00, terrealisasi sebesar Rp51.022.135.550,00 tidak terserap Rp2.510.764.835,00;
- 18) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan 5 program terdiri 25 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.423.866.903,00 terrealisasi sebesar Rp6.642.532.523,00, tidak terserap Rp1.781.334.380,00;
- 19) Inspektorat Kabupaten melaksanakan 3 program terdiri 14 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp343.535.000,00, terrealisasi sebesar Rp337.999.100,00, tidak terserap Rp5.535.900,00;
- 20) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 4 program terdiri 24 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.579.409.800,00, terrealisasi sebesar Rp6.179.943.301,00, tidak terserap Rp1.399.466.499,00;
- 21) Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan 4 program terdiri 18 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.319.188.700,00 terrealisasi sebesar Rp1.268.244.077,00, tidak terserap Rp50.944.623,00;
- 22) Kecamatan Gresik melaksanakan 3 program terdiri 33 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.190.201.440,00, terrealisasi sebesar Rp2.146.657.862,00 tidak terserap Rp43.543.578,00;
- 23) Kecamatan Kebomas melaksanakan 3 program terdiri 26 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.448.359.525,00 terrealisasi sebesar Rp1.416.726.606,00, tidak terserap Rp31.632.919,00;

- 24) Kecamatan Manyar melaksanakan 3 program terdiri 18 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp341.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp338.725.116,00, tidak terserap Rp2.274.884,00;
- 25) Kecamatan Cerme melaksanakan 3 program terdiri 20 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp353.340.000,00 terrealisasi sebesar Rp348.466.008,00, tidak terserap Rp4.873.992,00;
- 26) Kecamatan Benjeng melaksanakan 3 program terdiri 20 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp353.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp349.886.377,00, tidak terserap Rp3.113.623,00;
- 27) Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 3 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp409.610.000,00, terrealisasi sebesar Rp386.952.344,00 tidak terserap Rp22.657.656,00;
- 28) Kecamatan Duduksampeyan melaksanakan 3 program terdiri 20 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp300.740.000,00 terrealisasi sebesar Rp284.303.791,00 tidak terserap Rp16.436.209,00;
- 29) Kecamatan Driyorejo melaksanakan 3 program terdiri 19 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp283.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp275.313.397,00, tidak terserap Rp12.686.603,00;
- 30) Kecamatan Wringinanom melaksanakan 3 program terdiri 19 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp286.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp285.062.100,00, tidak terserap Rp937.900,00;
- 31) Kecamatan Kedamean melaksanakan 3 program terdiri 29 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp272.264.000,00 terrealisasi sebesar Rp262.332.634,00 tidak terserap Rp9.931.366,00;
- 32) Kecamatan Menganti melaksanakan 3 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp365.087.000,00, terrealisasi sebesar Rp347.393.645,00 tidak terserap Rp17.693.355,00;
- 33) Kecamatan Sidayu melaksanakan 3 program terdiri 19 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp321.442.500,00, terrealisasi sebesar Rp320.495.231,00, tidak terserap Rp947.269,00;

- 34) Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 3 program terdiri 20 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp308.550.000,00, terrealisasi sebesar Rp300.952.199,00, tidak terserap Rp7.597.801,00;
- 35) Kecamatan Panceng melaksanakan 3 program terdiri 20 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp374.722.500,00, terrealisasi sebesar Rp371.783.822,00, tidak terserap Rp2.938.678,00;
- 36) Kecamatan Bungah melaksanakan 3 program terdiri 18 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp326.720.000,00, terrealisasi sebesar Rp325.302.129,00, tidak terserap Rp1.417.871,00;
- 37) Kecamatan Dukun melaksanakan 3 program terdiri 20 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp382.590.000,00, terrealisasi sebesar Rp365.599.000,00, tidak terserap Rp16.991.000,00;
- 38) Kecamatan Sangkapura melaksanakan 3 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp416.985.000,00 terrealisasi sebesar Rp267.813.142,00, tidak terserap Rp149.171.858,00;
- 39) Kecamatan Tambak melaksanakan 3 program terdiri 19 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp331.500.000,00, terrealisasi sebesar Rp328.594.434,00 tidak terserap Rp2.905.566,00;
- 40) Sekretariat KORPRI melaksanakan 3 program terdiri 16 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp121.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp113.073.050,00 tidak terserap Rp7.926.950,00;
- 41) Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan 3 program terdiri 19 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp526.040.475,00, terrealisasi sebesar Rp508.367.225,00, tidak terserap Rp17.673.250,00;
- 42) Kantor Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan 3 program terdiri 15 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp267.760.900,00, terrealisasi sebesar Rp264.766.950,00, tidak terserap Rp2.993.950,00;
- 43) Kantor Perpustakaan dan Arsip melaksanakan 3 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp656.423.700,00 terrealisasi sebesar Rp631.777.314,00 tidak terserap Rp24.646.386,00;

- 44) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan 4 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp960.134.050,00 terrealisasi sebesar Rp.934.005.564,00, tidak terserap Rp26.128.486,00;
- 45) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan 4 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp944.030.000,00, terrealisasi sebesar Rp887.167.214,00, tidak terserap Rp56.862.786,00.
- 46) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan melaksanakan 4 program terdiri 22 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.033.308.425,00, terrealisasi sebesar Rp966.146.524,00, tidak terserap Rp67.161.901,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap SKPD tersebut antara lain digunakan untuk:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

- Penyediaan jasa surat menyurat;
- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
- Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- Penyediaan alat tulis kantor;
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- Fasilitasi kegiatan kelurahan;
- Penyediaan bahan logistik kantor;
- Penyediaan makanan dan minuman;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- Penyediaan jasa administrasi kantor;
- Penyediaan jasa pengamanan kantor;

- Penyediaan jasa belajar mengajar;
- Penyediaan biaya operasional;
- Penyediaan jasa pelayanan pimpinan/pejabat;
- Biaya operasional staf ahli bupati.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

- Pengadaan kendaraan dinas / operasional;
- Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas;
- Pengadaan mebeleur;
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/kendaraan operasional;
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor;
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor;
- Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor;
- Perencanaan pembangunan gedung kantor;
- Pembangunan balai penyuluh;
- Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas;
- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
- Rehabilitasi gedung/berat kendaraan dinas/operasional;
- Pembangunan gedung kantor;
- Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas.

3. Program peningkatan disiplin aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
- Pengadaan mesin/kartu absensi.

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- Penilaian angka kredit;
- Pendidikan dan pelatihan formal;
- Pendidikan dan pelatihan non formal;
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
- Peningkatan sinergi lerja aparatur;
- Peningkatan kualitas SDM SKPD;
- Pembinaan dan evaluasi kepegawaian SKPD.

5. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- Penyusunan rencana kerja SKPD;
- Penyusunan laporan dan monitoring realisasi kinerja SKPD;
- Penyusunan rencana strategis SKPD;
- Koordinasi dan evaluasi APBD;

B. Urusan Wajib

Dalam rangka penyelenggaraan 26 urusan wajib dialokasikan anggaran sebesar Rp885.376.467.477,00, terrealisasi sebesar Rp756.113.319.627,00, tidak terserap sebesar Rp129.263.147.850,00. Adapun penyelenggaraan masing-masing urusan wajib adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

Pada tahun 2013 Urusan Pendidikan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 9 program terdiri 82 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp91.145.408.152,00, terrealisasi sebesar Rp83.564.165.427,00, tidak terserap Rp7.581.242. 725,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Dinas Pendidikan melaksanakan 7 program terdiri 77 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp89.808.001.652,00, terrealisasi sebesar Rp82.292.525.927.00, tidak terserap Rp7.515.475.725,00, disebabkan antara lain:

- | | | |
|-------------------------------------|----|------------------|
| 1) Efisiensi | Rp | 2.649.746.637,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp | 2.346.426.005,00 |
| 3) Kegiatan yang tidak dilaksanakan | Rp | 2.519.303.083,00 |

1.2. Dinas Kesehatan melaksanakan 1 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.222.406.500,00, terrealisasi sebesar Rp1.167.486.500,00 tidak terserap Rp54.920.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

1.3. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp115.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp104.153.000,00 tidak terserap Rp10.847.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pelatihan peningkatan karakter pendidikan tenaga pendidik PAUD sebanyak 250 orang;
- Meningkatnya kemampuan guru PAUD dalam mengembangkan kurikulum KTSP PAUD dengan pendekatan pembelajaran BCCT secara maksimal sebanyak 435 orang;
- Terselenggaranya pelaksanaan Hari Anak Nasional;
- Tersedianya fasilitas sarana bermain anak sebagai sarana bermain anak TK;
- Terlaksananya lomba Gugus PAUD Tingkat Kabupaten guna meningkatkan kualitas pembelajaran/ administrasi guru dan manajemen PAUD serta dapat mewujudkan Gugus PAUD terbaik untuk mengikuti lomba Gugus PAUD Tingkat Provinsi;
- Terlaksananya pembangunan lokal Gedung SDN Betiting Cerme;
- Terlaksananya penambahan ruang kelas baru pada 9 Lembaga;

- Bertambahnya meubelair sekolah sebanyak 20 ruang;
- Tersedianya perlengkapan sekolah sebagai sarana peningkatan proses pembelajaran serta mutu pendidikan pada 4 Lembaga;
- Terlaksananya rehabilitasi gedung sekolah pada 83 Lembaga;
- Terlaksananya rehabilitasi gedung sekolah dan sarana peningkatan mutu pendidikan pada 152 Lembaga;
- Terlaksananya pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik sebanyak 600 orang;
- Terlaksananya lomba siswa berprestasi, penulisan naskah dan fragmen budi pekerti serta termotivasinya peningkatan prestasi siswa sesuai potensi dirinya;
- Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kurikulum sebanyak 600 Guru;
- Terpenuhinya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 425 Lembaga;
- Terpilihnya Juara 1, 2 dan 3 Lomba Gugus SD dan Lomba Bina Kreatifitas Anak SD/SDLB Tingkat Kabupaten;
- Meningkatnya kualitas atlet pelajar berprestasi untuk 8 Cabang Olahraga pada POR SD/MI Tingkat Provinsi;
- Terlaksananya sosialisasi dan penyelenggaraan UASBN SD/MI sesuai BNSP dan Permendiknas;
- Tersedianya Petugas Pengelolaan dan Analisis Data Bantuan (BSM SD) sebanyak 18 orang;
- Terlaksananya pembinaan SMP Negeri Satu Atap dan Bantuan Sekolah Terpencil sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- Terlaksananya PPDB Reguler dan Online Sekolah Negeri;
- Terlaksananya pembinaan SMP Inklusi bagi 2 Lembaga;
- Meningkatnya profesionalisme pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah;
- Terlaksananya Ujian Nasional Tingkat SD, SMP dan SMA;
- Meningkatnya kualitas atlet pelajar berprestasi di Tingkat Provinsi O2SN PLB, O2SN SD/MI, O2SN SMP, O2SN SMA, Liga Pendidikan SMP dan SMA;

- Terlaksananya kegiatan peningkatan manajemen pembina dan guru olahraga;
- Terwujudnya layanan program Kantin Kejujuran di lembaga SD, SMP dan SMA;
- Terlaksananya Pelatihan Identifikasi Dini Anak Berkebutuhan Khusus sebanyak 130 Peserta;
- Terlaksananya pembangunan gedung sekolah pada 13 Lembaga;
- Terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah pada 3 Lembaga;
- Terrealisasinya pembangunan ruang guru pada 2 Lembaga;
- Tersedianya alat praktik dan peraga siswa SMK pada 3 Lembaga;
- Tersedianya mebeleur sekolah pada 1 Lembaga;
- Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah dan ruang praktikum sekolah pada 35 Lembaga;
- Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik sebanyak 200 Peserta;
- Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kurikulum 2013 sesuai program pemerintah;
- Terseleksinya siswa berprestasi akademik tiap jenjang dari keluarga kurang mampu sebanyak 135 siswa;
- Terwakili dan berkembangnya bakat, minat dan kreativitas siswa pada Lomba Karya Cipta dan Penelitian Ilmiah Pelajar untuk 5 Juara tiap jenjang dan jenisnya;
- Terlaksananya pengembangan Sekolah Adiwiyata sebanyak 20 Lembaga;
- Terlaksananya UAN dan USSN-PAI SMA/MA/SMK;
- Terlaksananya kegiatan Operasi Sayang Siswa;
- Terlaksananya Kegiatan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya kegiatan POPDA tingkat Kabupaten Gresik guna seleksi atlet pelajar untuk mengikuti kompetensi di Tingkat Provinsi;
- Terlaksananya penyaluran dana BOS jenjang SMA/SMK pada 15 Lembaga;

- Tersalurkannya bantuan beasiswa kuliah S1 pada siswa kurang mampu berprestasi;
- Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan sebanyak 90 Orang;
- Tercapainya partisipasi dalam kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan;
- Terlaksananya penyebaran informasi pendidikan melalui siaran radio sebanyak 51 kali siaran;
- Terlaksananya Ujian Nasional Paket A,B dan C sebanyak 2.000 WB;
- Tercapainya Angka Partisipasi Wajar Dikdas 12 Tahun;
- Tersalurkannya Dana BOP bagi TPA/TPQ/Madin sesuai dengan petunjuk teknis sebanyak 1.645 Lembaga;
- Terlaksananya Jambore PTK PAUDNI bagi 60 Lembaga;
- Terpilihnya siswa SLB berprestasi dalam 8 jenis lomba, 3 Juara OSN SLB 12 jenis lomba, 1 siswa juara OSN Tingkat Provinsi, 1 siswa juara Tingkat nasional, 1 Kelompok Jambore Juara Tingkat Provinsi, 1 Kelompok Jambore Juara Tingkat Nasional;
- Terlaksananya Sertifikasi Pendidikan sebanyak 900 Guru;
- Meningkatnya kinerja guru sebanyak 96 Kelompok Kerja / 500 Penilai;
- Terbinanya Satuan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebanyak 1.190 Lembaga;
- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TPP (Tunjangan Profesi Pendidik);
- Terpilihnya siswa binaan dari masing-masing mata pelajaran Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan Lomba Kreativitas Siswa(LKS) sebanyak 160 Siswa, 20 siswa diprioritaskan untuk mengikuti lomba OSN Tingkat Provinsi;
- Terlaksananya Workshop pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi sebanyak 180 Guru;
- Terlaksananya pembinaan Sekolah Model Berbasis Keunggulan Lokal di masing-masing Kecamatan sebanyak 144 Lembaga;

- Terbitnya Jurnal Pendidikan NAMIRA sebanyak 4 Edisi;
- Terlaksananya pembinaan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), PTK (Penelitian Tindakan Kelas) dan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus).
- Tersedianya laporan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan sebanyak 11 Buku;
- Terpenuhinya Data Pendidikan Sekolah dan Madrasah;
- Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BOS pada 1.051 Lembaga;
- Tersedianya Profil Pendidikan 2012-2013;
- Tersusunnya data dana bantuan hibah daerah sesuai dengan sasaran;
- Terlaksananya penyusunan dan verifikasi RAPBS;
- Terlaksananya pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan Dana BOS SLTA;
- Terlaksananya pengembangan Standar Manajemen Mutu Pendidikan;
- Terpeliharanya BTS Jardiknas dan meningkatnya pemanfaatan jaringan di lingkungan Dinas Pendidikan;
- Terlaksananya Sosialisasi, Pengawasan dan Pengendalian Madin dan Guru Swasta sebanyak 180 Orang;
- Meningkatnya wawasan pendidikan bagi tenaga pendidik sebanyak 880 Orang;
- Terlaksananya pendidikan DIII Keperawatan sesuai dengan kurikulum;
- Terlaksananya pembelian Buku Literatur, Biologi/Kesehatan, Ilmu Pengetahuan Umum serta Literature Teknologi sebanyak 199 Buku;
- Terlaksananya pengadaan fasilitas ruang belajar dan fasilitas pendukung proses belajar mengajar;
- Tersedianya sistim informasi akademik (SIKAD);
- Terlaksananya beberapa kegiatan Pelatihan, Sminar, PHBI, PHBN, Reward Lulusan terbaik dan Mahasiswa berprestasi Tingkat I, II, dan III;
- Terlaksananya Rakerda UKS dan Jambore sebanyak 120 orang.

Adapun permasalahan pada Urusan Pendidikan adalah:

- Rekanan tidak bisa memenuhi barang sarana peningkatan mutu pendidikan (Alat Laboratorium) sampai akhir tahun anggaran 2013;
- Rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung sekolah;
- Terjadinya force major (bencana banjir) pembangunan ruang kelas sekolah;

Solusi permasalahan pada Urusan Pendidikan adalah:

- Pengadaan Barang sarana peningkatan mutu pendidikan (Alat Laboratorium) akan dilaksanakan lelang Tahun 2014;
- Putus kontrak pekerjaan pembangunan gedung sekolah dan dianggarkan tahun berikutnya;
- Adendum Kontrak pembangunan ruang kelas sekolah;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pendidikan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ditargetkan 73% realisasi sebesar 69,38%;
- Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) ditargetkan 100% realisasi sebesar 100%;
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A ditargetkan 99,16% realisasi sebesar 98,55%;
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B ditargetkan 93,06% realisasi sebesar 85,60%;
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/Paket C ditargetkan 78,30% realisasi sebesar 65,06%;
- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI ditargetkan 0,05% realisasi sebesar 0,06%;
- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs ditargetkan 0,3% realisasi sebesar 0,13%;
- Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA ditargetkan 0,015% realisasi sebesar 0,32%;

- Angka Kelulusan (AL) SD/MI ditargetkan 100% realisasi sebesar 100%;
- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs ditargetkan 100% realisasi sebesar 100%;
- Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA ditargetkan 100% realisasi sebesar 100%;
- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs ditargetkan 94,79% realisasi sebesar 95,37%;
- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA ditargetkan 91,20% realisasi sebesar 89,68%;
- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV ditargetkan 93% realisasi sebesar 88,62%.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Pendidikan adalah:

- Juara 2 *Mathematics Sains Olympics* SD Bidang IPA Tingkat Internasional di Filipina;
- Juara 3 Sky Air SMP Tingkat Asean;
- Juara 1 Lomba Penelitian Ilmiah Remaja Nasional SMP Bidang IPS Tingkat Nasional;
- Juara 1 *Olimpiade Sains Nasional* (OSN) SMP Penelitian Bidang Ekonomi dan Pendidikan Luar Biasa Bidang IT Tingkat Nasional;
- Medali Emas Cabang Olahraga Renang Putra Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Nasional;
- Medali Emas Cabang Olahraga Senam Artistik Putra Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI Tingkat Nasional;
- Medali Perak Sepak Bola Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat Nasional;
- Medali Perak Cabang Olahraga Atletik Putri Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Tingkat Nasional;
- Medali Perak Cabang Olahraga Bulu Tangkis Putra Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Tingkat Nasional;
- Medali Perak Cabang Olahraga Renang Putri Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Nasional;

- Medali Perak Cabang Olahraga Senam Artistik Putri Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI Tingkat Nasional;
- Medali Perunggu Cabang Olahraga Renang Putri Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI Tingkat Nasional;
- Juara 3 Lomba Penelitian Ilmiah Remaja Nasional SMP Bidang Teknologi Tingkat Nasional;
- Juara 3 Sky Air SMP Tingkat Nasional;
- Juara 3 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Bidang Matematika Tingkat Nasional;
- Juara 3 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Bidang IPA Tingkat Nasional;
- Peserta Tergiat Jambore Pendidikan Luar Biasa Tingkat Nasional;
- *The Best Theory Olimpiade Sains* Provinsi (OSP) SMA Bidang Ekonomi Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara Umum Jambore Pendidikan Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara 1 Olimpiade Sains Provinsi (OSP) SD Bidang Matematika Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara 1 Olimpiade Sains Provinsi (OSP) SD Bidang IPA Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara 1 Lomba Kreativitas Siswa (LKS) SMK Bidang *Chemistry* Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara 1 Mewarnai Hari Anak Nasional (HAN) TK Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara 1 Lomba Kreativitas Siswa (LKS) SMK Bidang *Refrigeration* Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Pengawas Pendidikan Khusus Berdedikasi Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara 1 Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara 1 Guru Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Timur.

- Peringkat 3 Kepala Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara 3 Olimpiade Sains Provinsi (OSP) SMA Bidang Astronomi Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara 3 Guru Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara Harapan Video Pembelajaran Tingkat Provinsi Jawa Timur;

2. Urusan Kesehatan

Pada tahun 2013 Urusan Kesehatan di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 16 program terdiri 51 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp208.525.732.827,00, terrealisasi sebesar Rp177.290.185.332,00 tidak terserap sebesar Rp31.235.547.495,00 dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Dinas Kesehatan melaksanakan 14 program terdiri 46 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp96.911.282.531,00, terrealisasi sebesar Rp80.849.012.341,00 tidak terserap Rp16.062.270.190,00, disebabkan antara lain:

- | | | |
|-------------------------------------|----|-------------------|
| 1) Efisiensi | Rp | 4.239.293.896,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp | 11.770.508.294,00 |
| 3) Kegiatan yang tidak dilaksanakan | Rp | 52.468.000,00 |

2.2. Badan Pengelola Rumah Sakit Ibnu Sina melaksanakan 2 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp111.614.450.296,00, terrealisasi sebesar Rp96.441.172.991,00, tidak terserap sebesar Rp15.173.277.305,00, disebabkan antara lain:

- | | | |
|-------------------------------------|----|------------------|
| 1) Efisiensi | Rp | 5.805.541.705,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp | 678.810.600,00 |
| 3) Kegiatan yang tidak dilaksanakan | Rp | 8.688.925.000,00 |

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya obat esensial dan generik sesuai kebutuhan;
- Terlaksananya pendistribusian obat secara merata ke 32 Puskesmas;
- Terlaksananya pelayanan kefarmasian sesuai standar pada sarana kesehatan;
- Meningkatnya mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan;
- Tersedianya peralatan kesehatan/kedokteran di Puskesmas, Pustu dan Ponkesdes sesuai standar;
- Tersedianya fasilitas perbekalan kesehatan, reagen laboratorium di Puskesmas yang memadai;
- Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan pelayanan kesehatan khusus di Puskesmas dan jaringannya dan sarana kesehatan swasta;
- Terlaksananya pelayanan kesehatan di Posyandu, Pusesmas Keliling, Upaya Kesehatan Gigi Mulut di Sekolah (UKGS) dan daerah rawan bencana;
- Terlaksananya pengawasan kualitas air, Sarana Air Bersih (SAB), Tempat-Tempat Umum (TTU), Depo Air Minum (DAM), Tempat Pengelolaan Pestisida (TP2) dan perumahan;
- Tersusunnya laporan evaluasi anggaran kesehatan Puskesmas;
- Terlaksananya pelayanan kesehatan Ibu, Anak, remaja dan KB;
- Terlaksananya rapat evaluasi, pengadaan bahan kimia, kelengkapan peralatan kerja dan pemeliharaan alat laboratorium UPT. Laboratorium;
- Terlaksananya pemeriksaan kualitas makanan terhadap bahan tambahan pangan yang berbahaya;
- Tersedianya media promosi dan informasi sadar hidup sehat;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat;
- Tercapainya peningkatan kualitas posyandu dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dalam pengembangan desa siaga;
- Tersedianya data dan peta status Gizi Balita;

- Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk dan Ibu hamil KEK;
- Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan Kekurangan Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Zat Gizi Mikro lainnya;
- Terlaksananya pemberdayaan masyarakat rangka peningkatan IMD dan ASI Eksklusif;
- Terlaksananya Sosialisasi Peduli ASI;
- Terlaksananya penanggulangan Gizi Lebih;
- Tersedianya data kesehatan lingkungan yang akurat dan terbentuknya Tim Pembina Tehnis dan Forum Kabupaten Sehat;
- Terlaksananya penyuluhan kesehatan lingkungan di sekolah;
- Terlaksananya pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat tentang Desa ODF (Open Defecation Free) di wilayah kerja Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura;
- Terlaksananya penyemprotan/fogging sarang nyamuk (membatasi penularan DBD);
- Terlaksananya pengadaan vaksin menular;
- Terlaksananya pelayanan pencegahan penanggulangan penyakit menular;
- Terlaksananya Imunisasi Bayi dan anak Sekolah Kelas I, II, III;
- Terlaksananya Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah;
- Terlaksananya evaluasi evaluasi SPM, MDGs dan Lokakarya Distric Health Account;
- Terlaksananya Pembangunan dan Pemutakhiran data Dasar Standart Pelayanan Kesehatan dan penyusunan Profil Kesehatan;
- Terlaksananya audit internal dan pelaksana audit eksternal surveillance International Organization for Standardization (ISO);
- Terlaksananya pembangunan dan peningkatan pelayanan Puskesmas;
- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas;
- Terpeliharannya alat kesehatan/alat kedokteran di Puskesmas dan jaringannya;

- Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu);
- Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas;
- Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi Polindes/Poskesdes;
- Terlaksananya pembangunan Rumah Sakit;
- Tersedianya perlengkapan dan peralatan dapur Puskesmas;
- Terlaksananya kemitraan asuransi kesehatan masyarakat;
- Terlayannya pasien Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal di Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya pelayanan perizinan bidang kesehatan;
- Terwujudnya pelayanan kesehatan pra USILA dan USILA;
- Terlaksananya pengawasan industri pangan, supermarket dan pasar;
- Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga;
- Terlaksananya pengembangan Desa Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dalam Gerakan Sayang Ibu (GSI) tingkat Kecamatan oleh Puskesmas;
- Tersedianya pengolahan limbah Rumah Sakit memenuhi standar;
- Tercukupinya kebutuhan alat kedokteran untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- Meningkatnya mutu pelayanan dan pendapatan rumah sakit.

Adapun permasalahan pada Urusan Kesehatan adalah:

- Cakupan penduduk yang menggunakan air bersih yang memenuhi syarat berdasarkan 258 sampel (DAM, PDAM, SAB) yang diperiksa secara bakteriologis tidak memenuhi target;
- Ada beberapa indikator pelayanan kesehatan Ibu, Balita dan KB yang belum mencapai target;
- Capaian Desa ODF (Open Defecation Free) masih rendah;
- Jumlah kasus yang seharusnya di fogging 618 fokus sedangkan jumlah fokus yang didanai dari dana APBD Kabupaten Gresik sejumlah 125 fokus;

- Masih terdapat puskesmas yang belum memiliki alat pendeteksi penyakit tidak menular, tenaga yang terlatih masih sedikit dan masyarakat belum bisa menerima program IVA;
- Masih ditemukannya makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dijual di supermarket, toko dan pasar tradisional terutama masalah kadaluwarsa dan tidak adanya ijin edar;
- Belum terbangunnya Gedung PONEK dan Ruang Kelas III disebabkan adanya perubahan lokasi pembangunan;
- Target pendapatan tidak terpenuhi karena pelayanan pasien Jamkesmas yang dibayar tagihannya dengan menggunakan anggaran dari kementerian kesehatan untuk rawat inap hanya sampai dengan bulan Juli 2013 (mempunyai piutang 5 bulan) dan untuk rawat jalan hanya sampai dengan bulan September 2013 (mempunyai piutang 3 bulan). Sehingga Jamkesmas yang belum terbayar sebesar $\pm$ 10 milyar.

Solusi permasalahan pada Urusan Kesehatan adalah:

- Melakukan penyuluhan lebih intensif kepada masyarakat tentang penggunaan air bersih;
- Melakukan intervensi spesifik kepada beberapa Puskesmas yang masih belum bisa mencapai target pelayanan kesehatan Ibu, Balita dan KB serta meningkatkan kinerja petugas (Bidan);
- Menyusun Perbup untuk percepatan Kabupaten ODF, kerjasama lintas bidang dan lintas sektor serta menggunakan dana BOK untuk pemicuan dan verifikasi akses jamban sehat;
- Dilaksanakan fogging dengan swadaya;
- Pengadaan alat pendeteksi penyakit tidak menular, pelatihan petugas kesehatan serta penyuluhan kepada masyarakat tentang program IVA;
- Perencanaan dana PPKJG untuk tahun 2014 lebih cermat;
- Dilakukan penyuluhan keamanan pangan bagi pengelola supermarket, toko atau penjual makanan di pasar tentang makanan kemasan yang memenuhi syarat kesehatan;

- Gedung PONEK dan Ruang Kelas III dibangun bertahap tahun 2014-2015;
- Dilakukan efisiensi anggaran yang tidak mengganggu pelayanan.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kesehatan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 ditargetkan sebesar 93% realisasi 82,56%;
- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani ditargetkan sebesar 80% realisasi 98,07%;
- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan ditargetkan sebesar 93% realisasi 89,39%;
- Cakupan Pelayanan Nifas ditargetkan sebesar 93% realisasi 87,74%;
- Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani, ditargetkan sebesar 80% realisasi 60,53%;
- Cakupan Pelayanan Anak Balita ditargetkan sebesar 77% realisasi 68,66%;
- Cakupan Kunjungan Bayi ditargetkan sebesar 90% realisasi 95,52%;
- Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) ditargetkan sebesar 96% realisasi 84,83%;
- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC (BTA+) ditargetkan sebesar 70% realisasi 56,04%;
- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%;
- Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin ditargetkan sebesar 85% realisasi 34,05%;
- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%;
- Cakupan Balita yang mendapat Vitamin A ditargetkan sebesar 80% realisasi 92%;
- Persentase Rumah Sehat ditargetkan sebesar 83% realisasi 78,58%;

- Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan ditargetkan sebesar 98,08% realisasi 97,73%;
- Pengadaan Obat Esensial ditargetkan sebesar 99,19% realisasi 97,65%;
- Pengadaan Obat Generik ditargetkan sebesar 99,55% realisasi 97,95%;
- Cakupan Rawat Jalan ditargetkan sebesar 15% realisasi 12,41%;
- Cakupan Rawat Inap ditargetkan sebesar 1,50% realisasi 0,52%;
- Cakupan Rumah Tangga Sehat ditargetkan sebesar 65% realisasi 66,54%;
- Posyandu Purnama ditargetkan sebesar 74% realisasi 75,34%.
- Pelayanan pasien jamkesmas dan jamkesda ditargetkan sebesar 1,25% realisasi 10,03% dan 36,69%;
- Bed Occupancy Rate ditargetkan sebesar 68,77% realisasi 80,51%;
- Average Length Of Stay ditargetkan sebesar 4,50 hari realisasi 4 hari;
- Turn Over Internal ditargetkan sebesar 1,90 hari realisasi 1 hari;
- Bed Turn Over ditargetkan sebesar 49,79 kali realisasi 74,4 kali.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Kesehatan adalah:

- Juara I Lomba Lingkungan Sekolah Sehat Tingkat SD dan SLB Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara I Lomba Penyuluhan Kader Kesehatan Remaja Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara II Lomba Duta Kader Kesehatan Remaja Tingkat Provinsi Jawa Timur ;
- Lulus kembali sertifikasi ISO 9001:2008 dari WQA;
- Lulus Akreditasi Rumah Sakit 16 Pelayanan.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Pada tahun 2013 Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 14 program terdiri 50 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.356.192.075.390,00,

terrealisasi sebesar Rp.299.337.433.337,00, tidak terserap Rp.56.854.642.053,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Efisiensi Rp 786.901.345,00
- 2) Sisa Lelang Rp 15.179.727.016,00
- 3) Tidak/belum dilaksanakan Rp. 40.888.013.692,00

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya Sarana Transportasi Jalan yang memadai pada 28 Ruas Jalan dan 2 jembatan;
- Perencanaan (DED) saluran drainase / gorong-gorong;
- Tersedianya Sarana dan prasarana drainase di 3 Kecamatan;
- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan se Kabupaten Gresik;
- Peningkatan/pemeliharaan Infrastruktur jalan (Bantuan Keuangan Provinsi) di 20 ruas;
- Tersedianya dokumen kondisi jalan kabupaten;
- Tersedianya/terrealisasinya tempat alat berat;
- Tersedianya Kendaraan Operasional sebanyak 5 unit;
- Tersedianya Alat Laboratorium sebanyak 12 unit;
- Tersedianya Data Test Laboratorium jalan dan jembatan untuk kegiatan proyek di 116 lokasi;
- Rehabilitasi/pemeliharaan alat – alat berat sebanyak 14 unit;
- Terpasangnya PJU di 16 Kecamatan;
- Terawatnya lampu PJU di 16 Kecamatan;
- Tertatanya perijinan dan penggunaan kekayaan daerah sebanyak 2 macam perijinan;
- Tersedianya komponen jalan yang memadai di ruas jalan kabupaten;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan air Bersih di 6 lokasi;
- Terbangunnya pintu air sebanyak 10 buah bangunan air dan jaringannya;
- Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan Irigasi sebanyak 24 bangunan saluran irigasi dan 6 dokumen perencanaan;
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air;

- Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan Irigasi yang terbangun di 10 Kecamatan;
- Mengevaluasi pengajuan ijin pemanfaatan tanah pengairan sebanyak 150 ijin;
- Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur irigasi sebanyak 9 jaringan irigasi;
- Terlaksananya pengamanan antara batas tanah waduk dan tanah warga di 7 Kecamatan;
- Terlaksananya pengamanan batas tanah negara di 1 Kecamatan;
- Pembinaan petugas dan anggota HIPPA di bidang sumber daya air sebanyak 40 orang dan 2 kelompok HIPPA
- Mengevaluasi dan monitoring pemanfaatan tanah pengairan;
- Terbangunannya embung dan bangunan penampung air lainnya sebanyak 5 buah bangunan dan tersedianya 6 dokumen perencanaan;
- Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya di 10 Kecamatan;
- Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau sebanyak 18 waduk dan tersedianya 6 dokumen perencanaan;
- Tersedianya hasil inventarisasi permasalahan pertanahan pengairan di 3 Kecamatan;
- Peningkatan, pembersihan dan pengerukan sungai/kali di 15 Kecamatan;
- Pembangunan/peningkatan infrastruktur sebanyak 10 lokasi (Kawasan Musium di Kawasan Makam Sunan Giri, Parkir Makam Syeh Maulana Malik Ibrahim, hasil karya Perencanaan Masjid Agung, Tugu Selamat Datang, WEP, PKL Alon-alon dan Saluran Drainase Sidayu, Jembatan Segoromadu, Paving Satpol PP, Rehab Kel. Sidokumpul dan Tugu Batas Kecamatan);
- Terrealisasikan Kawasan Dengan Kualitas dan Kuantitas Yang Religius di 3 lokasi;
- Terrealisasinya Stadion Olah Raga di Kabupaten Gresik;

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur lingkungan perdesaan di 18 Kecamatan;
- Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan se Kabupaten Gresik;
- Sertifikat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan sebanyak 400 sertifikat;
- Meningkatnya jumlah asosiasi/rekanan yang memahami tentang Sosialisasi regulasi dan Ijin Usaha Jasa Konstruksi standar ISO sebanyak 13 Asosiasi.
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong – gorong di Kabupaten Gresik;
- Tersedianya Dokumen Perencanaan Program ke PU-an yang disusun dalam setahun sebanyak 6 dokumen;
- Tersedianya dokumen harga satuan bahan dan upah kerja sebanyak 300 exlempar;
- Tercapainya operasional pengamanan prasarana dan sarana ke Pu-an di 4 cabang dinas;
- Terlaksananya lelang di Lingkungan Dinas PU;
- Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi penguatan kelembagaan di 5 kecamatan;
- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi penataan lingkungan berbasis komunitas di 1 kawasan.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman di 6 desa;
- Tersedianya sarana dan prasarana penunjang DAK Infrastruktur Irigasi, air minum dan jalan sebanyak 13 jenis.

Adapun permasalahan pada Urusan Pekerjaan Umum adalah:

- Pada kegiatan Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong ada anggaran yang tidak terserap dikarenakan pembebasan lahan di kali tutup barat tidak terrealisasi;
- Pembangunan Stadion Olahraga Gresik dana tidak terserap seluruhnya karena kegiatan tersebut bersifat multiyears dan ada sebagian warga gunung lengis belum meninggalkan lokasi proyek sehingga

mempengaruhi kinerja rekanan serta faktor cuaca sehingga mempengaruhi mobilisasi alat berat.

Solusi permasalahan pada Urusan Urusan Pekerjaan Umum adalah Anggaran tidak diserap dan diusulkan dianggarkan kembali;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik ditargetkan sebesar 72,00 %, realisasi 74,40 %;
- Jembatan kabupaten dalam kondisi baik ditargetkan sebesar 95,35%, realisasi 93,54 %;
- Panjang jalan poros desa yang terbangun ditargetkan sebesar 80,00% realisasi 88,04%
- Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Gresik dalam Kondisi Baik ditargetkan sebesar 53 %, realisasi 53,29 %;
- Panjang Saluran Drainase Perkotaan Dalam Kondisi Baik ditargetkan sebesar 71,39 %, realisasi 61,41 %;
- Bendung gerak sembayat ditargetkan sebesar 70,00 %, realisasi 16 %.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Pekerjaan Umum antara lain:

- Pada Pembangunan Bendung Gerak Sembayat (BGS), Pemerintah Kabupaten Gresik sampai Tahun 2013 telah menuntaskan pembebasan lahan seluas 469.024 m² (84,64%) dari luas keseluruhan 548.779 m², sedangkan pembangunan fisik menjadi tanggungjawab Kementerian Pekerjaan Umum.

4. Urusan Perumahan Rakyat

Pada tahun 2013 Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program terdiri 15 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp22.649.591.500, terrealisasi

sebesar Rp21.511.378.524,00, tidak terserap Rp1.138.212.976,00 dengan rincian sebagai berikut:

4.1. Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 5 program terdiri 14 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp22.539.591.500,00, terrealisasi sebesar Rp21.401.527.524,00, tidak terserap Rp1.138.063.976,00, disebabkan antara lain:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1) Efisiensi | Rp 366.715.476,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp 695.015.500,00 |
| 3) Tidak/belum dilaksanakan | Rp 76.333.000,00 |

4.3. Dinas Sosial melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp110.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp109.851.000,00 tidak terserap Rp149.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan sebanyak 4 kegiatan;
- Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana rusunawa di 5 lokasi;
- Terrealisasinya pelayanan terhadap penghuni rusunawa yang nyaman di 4 lokasi (Rusunawa Karangturi, Gulomantung, Kebomas dan Bambe);
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas rumah gakin yang layak huni di 18 Kecamatan;
- Tersedianya sarana sanitasi yang layak di 7 lokasi lingkungan permukiman;
- Tersedianya infrastruktur pengolahan limbah komunal yang layak di 3 lokasi;
- Terselenggaranya sosialisasi pembinaan dan monitoring program Sanitasi *Urban Sanitation and Rural Infrastructure* (USRI)-PNPM di 33 lokasi;
- Pembangunan Sarana Sanitasi (AUSAID) di Kabupaten Gresik;
- Terrealisasinya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman di 2 lokasi;

- Terselenggaranya penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran diikuti 420 peserta;
- Tersedianya Sarana dan Prasarana pencegahan bahaya di Wilayah Gresik Utara dan Gresik Selatan sebanyak 6 Jenis (peralatan kerja, APAR, radio VHF, pengadaan tandon air, air bersih dan truk tangki air);
- Operasional dan pemeliharaan sarana PMK;
- Tersedianya sarana dan prasarana pemakaman sebanyak 17 set;
- Terselenggaranya sosialisasi dalam rangka penyediaan areal pemakaman diikuti 45 orang;
- Terpeliharanya Makam Pahlawan di 2 TMP.

Adapun permasalahan pada Urusan Perumahan Rakyat adalah:

- Pada kegiatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat tidak dapat terserap seluruhnya dikarenakan pekerjaan saluran di Kelurahan Sidokumpul tidak dapat dilaksanakan karena pekerjaan pembongkaran jalan masuk setiap rumah dan pengembaliannya membutuhkan biaya yang cukup besar yaitu sebesar 60 % dari total dana pembangunan saluran (paket pekerjaan 75 juta) oleh karenanya pekerjaannya tidak dilanjutkan karena biaya pekerjaan dengan sisa 40 % hanya mampu memenuhi saluran kurang lebih 60 m dari total rencana 150 m dan pelaksanaan peringatan hari perumahan tidak dilaksanakan.

Solusi permasalahan pada Urusan Perumahan Rakyat adalah perlu adanya penambahan dana di Tahun 2014.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perumahan Rakyat pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Rumah Tangga Pengguna Air Bersih target tahun 2013 sebesar 70 %, realisasi 86.77 %;
- Rumah Layak Huni target tahun 2013 sebesar 86,90 %, realisasi 82,89 %.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Perumahan Rakyat adalah :

- Juara I Lomba HIPAM Tingkat Provinsi Jawa Timur.

5. Urusan Penataan Ruang

Pada tahun 2013 Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Badan Penanaman Modal dan Perijinan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 7 program terdiri 15 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp4.518.765.000,00, terrealisasi sebesar Rp4.207.330.697,00, tidak terserap Rp311.434.303,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.1. Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 3 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.884.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp1.712.719.100,00, tidak terserap Rp171.280.900,00, disebabkan antara lain:

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1) Efisiensi | Rp 44.101.700,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp 127.179.200,00 |

5.2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 3 program terdiri 8 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.050.765.000,00, terrealisasi Rp1.961.476.190,00, tidak terserap Rp89.288.810,00, disebabkan antara lain:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1) Efisiensi | Rp 58.801.450,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp 30.487.360,00 |

5.3. Badan Penanaman Modal dan Perizinan melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp584.000.000,00, terrealisasi Rp533.135.407,00, tidak terserap Rp50.864.593,00, disebabkan antara lain:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1) Efisiensi | Rp 50.206.593,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp 658.000,00 |

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersusunnya Peraturan Bupati tentang standar Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);

- Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pemanfaatan Ruang diikuti 400 peserta;
- Terlaksananya identifikasi pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan Berdasarkan Fungsi Tertentu di Kota Gresik & Penyusunan Juknis Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Kota Gresik;
- Tertatanya Kawasan Kota lama Gresik;
- Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan updating SIM Geografis Penataan Ruang;
- Tersusunnya dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan BWP Duduksampeyan – Cerme dan Gresik Selatan;
- Tersusunnya Rencana Teknis Ruang Kawasan Pelabuhan;
- Terpeliharanya Sistem GIS penataan dan pemanfaatan ruang;
- Tersusunnya Rencana Tata Ruang Lahan Pertanian yang berkelanjutan ;
- Tersedianya dokumen Inventarisasi Bangunan dan Lingkungan sebanyak 10 buku;
- Tersedianya dokumen Inventarisasi Asset Daerah dan Pemanfaatan Ruang oleh masyarakat sebanyak 10 buku;
- Terkendalinya pembangunan sesuai peruntukan tata ruang di Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya pemrosesan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang (SK Ijin Site Plan dan IMB) dan pembinaan sebanyak 739 berkas;
- Terlaksananya identifikasi pemilik lahan prasarana dan sarana utilitas berdasarkan Master Plan dan kesepakatan para pemilik lahan untuk prasarana dan sarana utilitas.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Penataan Ruang pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Perda RTRW Kabupaten Gresik sudah disahkan pada Tahun 2011;
- Perubahan pemanfaatan fungsi kawasan RT.RW target tahun 2013 ada realisasi ada.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Pada tahun 2013 Urusan Perencanaan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Daerah dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 15 program terdiri 43 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.804.660.300,00, terrealisasi sebesar Rp. 6.522.978.255,00 tidak terserap Rp. 281.682.045,00 dengan rincian sebagai berikut:

6.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 6 program terdiri 31 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.696.630.500,00 terrealisasi sebesar Rp. 5.485.213.055,00 tidak terserap Rp. 211.417.445,00 disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp. 135.023.320,00
- 2) Sisa Lelang Rp. 76.394.125,00

6.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.043.029.800,00 terrealisasi sebesar Rp. 972.765.200,00 tidak terserap Rp. 70.264.600,00 disebabkan adanya efisiensi.

6.3. Kecamatan Gresik melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp. 5.000.000,00.

6.4. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp. 10.000.000,00.

6.6. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp. 10.000.000,00.

6.7. Kecamatan Sidayu melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp. 10.000.000,00.

6.8. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp. 10.000.000,00.

6.9. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp. 10.000.000,00.

6.10. Kecamatan Tambak melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp. 10.000.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersusunnya buku Ekonomi Makro Daerah sebagai upaya mengarahkan semua sumber daya untuk mencapai pembangunan ;
- Tersusunnya buku Analisa Data Informasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah;
- Tersusunnya Buku RKPD / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendampingan Aplikasi RKPD;
- Terselenggaranya Musrenbang RKPD;
- Tersusunnya buku Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati;
- Buku Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Terwujudnya Pedoman dalam Penyusunan APBD;
- Tersusunnya PERDA RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015;
- Tersusunnya Analisis Perencanaan Program Pemberdayaan Koperasi;
- Tersusunnya buku Potensi Wilayah dan Pemetaan Agrobisnis ;
- Buku Laporan Pengendalian Program Bantuan Pengentasan Kemiskinan;
- Tersusunnya Indeks Gini;
- Dokumen Inventarisasi dampak alih fungsi lahan waduk;
- Pelaksanaan penyusunan rencana induk pengelolaan irigasi;
- Dokumen penurunan Status Cagar Alam Danau Kastoba;
- Tersusunnya Buku LPPD Kabupaten Gresik Tahun 2012,terlaksanannya Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Tersusunnya Laporan RKT dan LAKIP.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perencanaan Pembangunan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Tersedianya RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- Program RKPD yang diakomodir dalam APBD ditargetkan sebesar 85% realisasi 94%.

7. Urusan Perhubungan

Pada tahun 2013 Urusan Perhubungan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan dan Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 8 program terdiri 29 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp4.581.324.000,00, terrealisasi sebesar Rp4.154.681.810,00, tidak terserap Rp426.642.190,00 dengan rincian sebagai berikut:

7.1. Dinas Perhubungan melaksanakan 7 program terdiri 28 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.531.324.000,00, terrealisasi sebesar Rp4.113.134.292,00, tidak terserap Rp417.969.190,00, disebabkan antara lain:

1) Efisiensi	Rp 152.752.925,00
2) Sisa Lelang	Rp 155.753.769,00
3) Kegiatan yang belum dilaksanakan	Rp 109.462.500,00

7.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp50.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp41.327.000,00, tidak terserap Rp8.673.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat;
- Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Terminal Bunder;
- Tersusunnya kajian rekayasa lalu lintas kawasan terminal bunder;
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Perawatan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APIILL);

- Terpeliharanya Marka Jalan;
- Terpeliharanya Rambu – rambu lalu lintas;
- Pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum sebanyak 105 armada;
- Tersedianya database angkutan orang/barang;
- Terpilihnya awak kendaraan umum teladan tahun 2013;
- Penataan Pengelolaan Parkir;
- Terlaksananya Operasional pengendalian Tertib Lalu Lintas;
- Operasional kepelabuhanan;
- Operasional Pengawasan dan pemantauan Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
- Terlaksananya sosialisasi keselamatan angkutan laut;
- Operasional Pengawasan Peraturan Angkutan Barang dan Minerba di Jalan;
- Pengadaan perahu tambangan di Kecamatan Driyorejo;
- Tersedianya Aplikasi Jasa Kepelabuhanan (perhitungan jasa labuh dan tambat);
- Tersusunnya regulasi di bidang keselamatan pelayaran kapal < 7GT;
- Pembangunan Tambatan Penyeberangan sungai Kecamatan Sidayu;
- Terpeliharanya Halte dan Pos Pantau;
- Pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas di 17 lokasi;
- Terpasangnya Traffic Light, Flash Light, Marka Jalan, Rambu-rambu dan RPPJ di 17 lokasi;
- Tersedianya sarana dan prasarana Pengujian kendaraan bermotor yang layak;
- Pengadaan Stasiun Komunikasi Dinas Perhubungan sebanyak 2 paket;
- Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
- Pemantapan Koordinasi Bidang Perhubungan.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perhubungan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Persentase Ketersediaan Angkutan Darat target pada Tahun 2013 sebesar 79,83%, realisasi 81,45 %;
- Persentase Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas target pada Tahun 2013 sebesar 37,44 %, realisasi 41,6 %;
- Persentase Angkutan Umum darat dalam kondisi layak jalan target tahun 2013 sebesar 66,83 %, realisasi 74,26 %;
- Ketersediaan angkutan laut penyeberangan target pada tahun 2013 sebesar 100 % realisasi 118,66 %;
- Pembangunan Bandara Domestik di Pulau Bawean target tahun 2013 sebesar 100 %, realisasi 95 %;
- Persentase Permasalahan Bidang Perhubungan yang diselesaikan target tahun 2013 sebesar 100 %, realisasi 100 %.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Perhubungan antara lain:

- Pembebasan lahan untuk pembangunan bandara domestik di Pulau Bawean telah mencapai 100%, sedangkan untuk proses pembangunan fisik merupakan kewenangan dari kementerian Perhubungan melalui dana APBN telah mencapai 95 % dan diharapkan pada pertengahan Tahun 2014 bisa dioperasikan.

8. Urusan Lingkungan Hidup

Pada tahun 2013 Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 8 program terdiri 34 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp26.744.552.000,00, terrealisasi sebesar Rp25.189.682.738,00, tidak terserap Rp1.554.869.262,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 8.1. Badan Lingkungan Hidup melaksanakan 7 program terdiri 33 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp26.344.552.000 terrealisasi sebesar Rp24.811.951.738,00, tidak terserap Rp1.532.600.262,00, disebabkan antara lain:

1) Efisiensi	Rp	431.832.405,00
2) Sisa Lelang	Rp	1.105.767.857,00
3) Tidak dilaksanakan	Rp	95.000.000,00

8.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp400.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp377.731.000,00, tidak terserap Rp22.269.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tercukupinya kebutuhan pengelolaan persampahan di 5 Kecamatan;
- Tertanganinya volume sampah sebanyak 725 m³/hari;
- Meningkatnya partisipasi warga dalam pengelolaan sampah di 2 Kecamatan, 3m³/hari;
- Tersedianya dokumen sosialisasi tempat pemrosesan akhir sampah;
- Bertambahnya Sarana dan Prasarana TPA di 1 lokasi;
- Pembuatan, pengiriman Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dan cetak karcis retribusi kebersihan sebanyak 1.200 bendel;
- Tersusunnya buku study Kelayakan TPA sebanyak 38 buku;
- Tersusunnya buku dokumen masterplan pengelolaan persampahan sebanyak 20 buku;
- Tersusunnya buku dokumen SOP pengelolaan persampahan sebanyak 15 buku;
- Terlaksananya koordinasi penilaian kota sehat;
- Tersusunnya Buku Pedoman Penyusunan standarisasi guna pengambilan kebijakan terhadap dampak lingkungan;
- Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan dan Penurunan jumlah kegiatan/usaha yang melakukan pencemaran;
- Tersusunnya Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- Terlaksananya koordinasi penyusunan Amdal;
- Meningkatnya partisipasi warga terhadap pengelolaan lingkungan;

- Meningkatnya kapasitas SDM dan peralatan Laboratorium yang memadai;
- Tersedianya alat laboratorium yang terkalibrasi dan terlaksananya sertifikasi laboratorium lingkungan;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian pantai dan laut;
- Pengendalian kerusakan hutan dan lahan dengan pembuatan papan himbauan bahaya perusakan hutan dan lahan sebanyak 17 buah;
- Pembuatan sumur resapan dan biopori sebanyak 30 sumur resapan dan 158 biopori;
- Tersedianya pohon penghijauan untuk reklamasi pasca tambang sebanyak 10.000 pohon;
- Terlaksananya sosialisasi dan Pameran Lingkungan Hidup;
- Tingginya partisipasi masyarakat terhadap konservasi Sumber Daya Alam;
- Tersedianya data dan informasi lingkungan hidup sumber daya alam yang dipantau dan data perusahaan;
- Tersusunnya buku NSDH Kabupaten Gresik Tahun 2013 ;
- Tersedianya data hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- Terlaksananya uji emisi kendaraan bermotor roda empat sebanyak 230 sampel;
- terselesaikannya kasus pencemaran dan sengketa lingkungan sebanyak 20 kasus;
- Tersedianya tempat khusus merokok dan sarana penunjang tempat khusus merokok;
- Terlaksananya workshop pengelolaan pengelolaan dan pemanatan lingkungan sebanyak 50 orang
- Penataan taman kota ruang terbuka hijau di 2 Kecamatan kota;
- Perawatan, peremajaan dan penyulaman RTH (taman & jalur hijau kota) di 4 Kecamatan;

- Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air.

Adapun permasalahan pada Urusan Lingkungan Hidup adalah:

- Pada kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL tidak dapat terserap seluruhnya dikarenakan Hasil verifikasi lapangan dari 10 UMKM yang ditargetkan, hanya 5 UMKM yang masuk dalam klasifikasi UKL-UPL, namun setelah diadakan verifikasi ulang 5 UMKM tersebut berlokasi pada peruntukan ruang yang tidak sesuai RTRW.

Solusi permasalahan pada Urusan Lingkungan Hidup adalah:

- Dana Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL/UPL tidak diserap

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Lingkungan Hidup tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Penurunan luas lahan Kritis pada tahun 2013 dari 11.492 Ha, menjadi 10.960,58 Ha;
- Jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air pada Tahun 2012 sebanyak 55 perusahaan sedangkan pada Tahun 2013 sebanyak 58 Perusahaan sehingga terdapat kenaikan kesadaran perusahaan untuk mengurus Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) sebesar 34,48 %;
- Jumlah usaha/kegiatan yang melaporkan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara pada Tahun 2012 sebanyak 104 Perusahaan sedangkan tahun 2013 sebanyak 153 Perusahaan sehingga terdapat kenaikan sebesar 30,6 %;
- Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan ditargetkan seluas 917,066 Ha realisasi seluas 716,35 Ha;
- Penanganan sampah perkotaan, ditargetkan sebanyak 90% terrealisasi 93 %;
- Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk ditargetkan sebanyak 0,029 m³/penduduk terrealisasi 0,050m³/penduduk.

Prestasi yang diperoleh pada urusan Lingkungan Hidup adalah :

- Peringkat III Tingkat Nasional Indonesia Green Region Award (IGRA);

- Penghargaan Satya Lencana Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Nasional (Saudara ARFA'I Kecamatan Tambak);
- Penghargaan Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan Tingkat Nasional (LSM Ecoton);
- Peraih Nominasi Program Kalpataru TK Nasional (Sdr AMROZI Desa Banyuurip Kecamatan Ujung Pangkah);
- Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata untuk 1(satu) SMA dan 3(tiga) SMP dan Sekolah Adiwiyata Mandiri untuk 2(dua) SMA Tingkat Nasional;

9. Urusan Pertanahan

Pada tahun 2013 Urusan Pertanahan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 2 program terdiri 6 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp49.163.958.500,00, terrealisasi sebesar Rp36.594.368.625,00, tidak terserap Rp12.569.589.875,00 disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp 37.508.400,00
- 2) Kegiatan yang belum Rp 12.452.159.475,00 dilaksanakan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pembebasan lahan untuk pembangunan Lapter Bawean, Stadion Olahraga, Bendung Gerak Sembayat dan Tanggul Kali Lamong;
- Terlaksananya pensertifikatan 5 bidang / asset tanah Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah dan jalan mengare;
- Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah pelebaran jalan mengare;
- Terlaksananya pembebasan lahan untuk pelebaran jalan di mengare.

Adapun permasalahan pada Urusan Pertanahan adalah:

- Ada beberapa bidang tanah yang mengalami penundaan pembayaran karena masyarakat menuntut harga yang lebih tinggi dari harga appraisal yang telah ditetapkan.

Solusi permasalahan pada Urusan Pertanahan adalah:

- Penaksiran Harga Tanah (Appraisal) ulang;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pertanahan tahun 2013 adalah penyelesaian kasus pertanahan sebanyak 2 kasus dari 2 kasus yang ada atau terselesaikan 100%.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Pada tahun 2013 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 19 program terdiri 36 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.4.794.819.850,00, terrealisasi sebesar Rp.3.467.355.965,00, tidak terserap Rp.1.327.463.885,00, dengan rincian sebagai berikut:

10.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 1 program terdiri 17 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.4.585.539.850,00, terrealisasi sebesar Rp.3.258.075.965,00, tidak terserap Rp.1.327.463.885,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp. 548.112.200,00
- 2) Sisa Lelang Rp. 301.558.285,00
- 3) Kegiatan yang belum Rp. 477.793.400,00 dilaksanakan

10.2. Kecamatan Gresik melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;

10.3. Kecamatan Kebomas melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;

- 10.4. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp23.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp23.000.000,00;
- 10.5. Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 10.6. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 10.7. Kecamatan Ballongpanggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 10.8. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp15.000.000,00 ;
- 10.9. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00 ;
- 10.10. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00 ;
- 10.11. Kecamatan Kedamean melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp20.000.000,00;
- 10.12. Kecamatan Menganti melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 10.12. Kecamatan Sidayu melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00 ;

- 10.13. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp15.000.000,00;
- 10.14. Kecamatan Panceng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp8.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp8.000.000,00;
- 10.15. Kecamatan Bungah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp8.280.000,00, terrealisasi sebesar Rp8.280.000,00;
- 10.16. Kecamatan Dukun melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 10.17. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 10.18. Kecamatan Tambak melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terpeliharanya jaringan dan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi kependudukan) di Kecamatan;
- Tersusunnya dokumen kerangka indikator dan kebijakan Kependudukan
- Terlaksananya bimtek peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil;
- Tersedianya buku administrasi kependudukan;
- Terlaksananya sosialisasi UU No. 23 Tahun 2006 tentang SKP ke luar negeri;
- Terciptanya pelayanan publik yang sesuai Standart ISO 1991 : 2008;
- Terlaksananya Program Nasional KTP elektronik (e-KTP);
- Tercatat dan tersusunnya arsip akta catatan sipil ;
- Terlaksananya sidang pencatatan akta perkawinan;

- Terlaksananya migrasi data base kependudukan dan pencatatan sipil dari SIMDUK ke SIAK;
- Tersedianya sistem pengendalian pelayanan administrasi kependudukan;
- Tersedianya informasi pelayanan publik di lingkup Dinas Kependudukan dan Capil;
- Tersusunnya SOP SIAK;
- Terlaksananya verifikasi dan validasi data kependudukan dan capil Kab. Gresik;
- Terlaksananya sosialisasi serta verifikasi pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun;
- Terlaksananya validasi dan konsolidasi data ganda dan anomaly;
- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan di Tingkat Kecamatan se Kabupaten Gresik.

Adapun permasalahan pada Urusan Kependudukan adalah:

- Belum adanya petunjuk teknis (juknis) tentang spesifikasi pengadaan peralatan e-KTP;
- Belum adanya petunjuk Depdagri terkait MoU dengan pihak perbankan dimana kerjasama / MoU harus dilaksanakan dengan pusat (Ditjen Admuduk) sehingga Belanja konsultasi tidak dilaksanakan;
- Pelaksanaan sidang untuk penetapan akte kelahiran tidak dilanjutkan dikarenakan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01/Bua.6/Hs/SP/V/2013 tentang pencabutan surat edaran MA RI No. 6 Tahun 2012 tentang pedoman penetapan pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun harus secara kolektif.

Solusi permasalahan pada Urusan Kependudukan adalah:

- Program e-KTP tetap dilanjutkan dan dianggarkan lagi pada tahun 2014;
- Pelaksanaan SIAK masih menunggu MoU antara Depdagri dengan Perbankan terlebih dahulu;
- Sidang penetapan akte kelahiran secara kolektif sesuai surat edaran Mahkamah Agung bagi yang terlambat lebih dari 1 (satu) tahun membutuhkan sosialisasi lebih intens kepada masyarakat.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Kepemilikan KTP ditargetkan sebesar 88,90% realisasi 96,17%
- Penerbitan akta kelahiran sebanyak 15.235 lembar;
- Pengurusan KTP ditargetkan 1 hari realisasi 1 hari.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada tahun 2013 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Sekretariat Daerah dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 15 program terdiri 16 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp486.649.950,00 terrealisasi sebesar Rp486.639.950,00 tidak terserap Rp10.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 11.1. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp294.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp293.990.000,00, tidak terserap Rp10.000,00, disebabkan Karena Efisiensi Anggaran;
- 11.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp32.299.950,00, terrealisasi sebesar Rp32.299.950,00;
- 11.3. Kecamatan Gresik melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp23.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp23.000.000,00;
- 11.4. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 11.5. Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp12.350.000,00, terrealisasi sebesar Rp12.350.000,00;

- 11.6. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp20.000.000,00;
- 11.7. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 11.8. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 11.9. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp15.000.000,00;
- 11.10. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 11.11. Kecamatan Menganti melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 11.12. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 11.13. Kecamatan Dukun melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp20.000.000,00;
- 11.14. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 11.15. Kecamatan Tambak melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlayannya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- Terselenggaranya evaluasi Gerakan Sayang Ibu dan pembinaan P2WKSS;
- Terwujudnya pembinaan kader PKK kelurahan/desa dan kecamatan;
- Tercapainya peningkatnya peran serta TP PKK desa dalam masyarakat;
- Tersedianya pembinaan dan pertemuan rutin sebagai sarana penyampaian informasi yang baru;
- Tercapainya pelaksanaan, administrasi dan pelaporan kegiatan 10 program pokok PKK;
- Terwujudnya Kader Wanita yang tangguh dan Mandiri;
- Terwujudnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
- Tercapainya peningkatan kemampuan tentang peran peserta wanita dalam pembangunan;
- Tercapainya peningkatan kemampuan tentang peran peserta wanita dalam pembangunan;
- Terwujudnya Pemberdayaan Organisasi Wanita / PKK;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan ditargetkan sebesar 100% terrealisasi 100%;
- Cakupan anak korban kekerasan yang tuntas mendapatkan penanganan pengaduan ditargetkan sebesar 92 % realisasi 100%;
- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%
- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan Rumah Sakit ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%
- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan ditargetkan sebesar 87% realisasi 100%;

- Cakupan lembaga perempuan dan anak yang terfasilitasi ditargetkan sebesar 30% realisasi 100%.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pada tahun 2013 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program terdiri 9 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp1.585.985.000,00, terrealisasi sebesar Rp1.579.495.500,00, tidak terserap Rp6.489.500,00, disebabkan antara lain:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1) Efisiensi | Rp 2.929.500,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp 3.560.000,00 |

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pelayanan kesehatan dan KB;
- Tercapainya peserta KB sesuai dengan PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat);
- Terpenuhinya permintaan masyarakat terhadap pelayanan KB;
- Tersedianya tenaga remaja peduli KB;
- Pemberdayaan kelompok masyarakat peduli KB;
- Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.;
- Terbantunya kelompok PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja);
- Terselenggaranya informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- Terlaksananya pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Prevalensi peserta KB Aktif ditargetkan sebesar 78,40% realisasi 78,68%;

- Cakupan Pasangan Usaha Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun ditargetkan sebesar 1,14% realisasi 0,9%;
- Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*unmeet need*) ditargetkan sebesar 21,45% realisasi 18,5%;
- Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ditargetkan sebesar 21,25% realisasi 34%;
- Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa/Kelurahan ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah:

- Penghargaan Manggala Karya Kencana Bidang KB Kategori Peningkatan Kelembagaan dari Presiden RI;
- Juara 2 Lomba Poster Promosi KB Kategori SMP Tingkat Provinsi Jawa Timur;

13. Urusan Sosial

Pada tahun 2013 Urusan Sosial di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Sekretariat Daerah dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 26 program terdiri 36 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp4.998.158.950,00, terrealisasi sebesar Rp4.593.048.670,00, tidak terserap Rp405.110.280,00 dengan rincian sebagai berikut:

13.1. Dinas Sosial melaksanakan 6 program terdiri 15 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.634.635.000,00, terrealisasi sebesar Rp2.383.809.320,00, tidak terserap Rp250.825.680,00, disebabkan antara lain:

- | | | |
|-------------------------------------|----|----------------|
| 1) Efisiensi | Rp | 193.967.820,00 |
| 2) Kegiatan yang belum dilaksanakan | Rp | 56.857.860,00 |

13.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.208.523.950,00, terrealisasi

sebesar Rp2.062.974.350,00, tidak terserap Rp145.549.600,00, disebabkan :

1) Efisiensi Rp 145.549.600,00

- 13.3. Kecamatan Gresik melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp20.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp20.000.000,00;
- 13.4. Kecamatan Kebomas melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00, tidak terserap sebesar Rp10.000.000,00;
- 13.5. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 13.6. Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 13.7. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 13.8. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 13.9. Kecamatan Benjeng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 13.10. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 13.11. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp15.000.000,00;

- 13.12. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 13.13. Kecamatan Kedamean melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 13.14. Kecamatan Menganti melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 13.15. Kecamatan Sidayu melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00;
- 13.16. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp5.000.000,00;
- 13.17. Kecamatan Dukun melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp5.000.000,00;
- 13.18. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp1.265.000,00;
- 13.19. Kecamatan Tambak melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp10.000.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Meningkatnya kapasitas petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin (PKH) sebanyak 190 orang;
- Terlatihnya Keluarga Rentan yang di beri bantuan sebanyak 60 Orang ;
- Terbantunya lansia dan legiun veteran sebanyak 50 orang lansia dan 180 orang legiun veteran;
- Terdatanya dan tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

- Terbinanya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat sebanyak 300 orang;
- Perbaikan rumah penyandang cacat, bisu, tuli dan janda veteran sebanyak 15 Rumah;
- Terlaksananya rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di UPT-UPT;
- Terbinanya karang taruna yang diberi bantuan UEP sebanyak 70 orang, 19 Karang Taruna;
- Tertanganinya klien kesejahteraan social sebanyak 526 orang;
- Tertanganinya Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE);
- Termonitornya penyampaian raskin sehingga terarah dan tepat sasaran;
- Terevaluasi dan termonitornya santunan kematian;
- Terselenggaranya peringatan lansia;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Sosial tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi ditargetkan sebesar 19 unit realisasi 17 unit;
 - Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial ditargetkan 401 PMKS terrealisasi 1.258 PMKS;
 - Jumlah PMKS diestimasi sebanyak 70.184 jiwa realisasi 110.027 jiwa;
 - Bantuan santunan kematian untuk warga miskin ditargetkan sebesar 100% realisasi 100 %;
 - Penyaluran Raskin ditargetkan sebesar 100% realisasi 100%;
 - Jumlah hari besar agama yang dirayakan ditargetkan sebanyak 5 kegiatan realisasi 5 kegiatan;
 - Bantuan sarana ibadah ditargetkan sebesar 90% realisasi 90%.

14. Urusan Ketenagakerjaan

Pada tahun 2013 Urusan Ketenagakerjaan di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 3 program terdiri 12 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.370.230.000,00, terrealisasi sebesar Rp. 2.341.933.650,00, tidak terserap Rp 28.296.350,00, disebabkan efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi 84 orang pencari kerja;
- Tersusunnya informasi bursa tenaga kerja;
- Terlaksananya kegiatan job-fair, yang diikuti 43 perusahaan dengan jumlah lowongan kerja 3.296 tenaga kerja;
- Terlaksananya pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan bagi 120 orang;
- Terlaksananya pembinaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) pada 10 lembaga dan 150 Calon Tenaga Kerja Indonesia;
- Terdatanya tenaga kerja asing di Kabupaten Gresik di 50 perusahaan;
- Terlaksananya penyelesaian perselisihan hubungan industrial sejumlah 55 kasus;
- Terwujudnya pemahaman pekerja dan pengusaha tentang JAMSOSTEK pada 50 perusahaan;
- Terlaksananya pembinaan norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja pada 50 perusahaan;
- Terwujudnya standar upah yang sesuai dengan KHL;
- Tersedianya buku usulan dan saran teknis di bidang ketenagakerjaan dan hasil kegiatan LKS Tripartit;
- Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan norma-norma kerja di 50 perusahaan.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Ketenagakerjaan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Tingkat partisipasi angkatan kerja ditargetkan sebesar 67,25% realisasi 67,21 %;

- Pencari kerja yang ditempatkan ditargetkan sebesar 32,40% realisasi 28,76 %;
- Angka pengangguran penduduk tahun 2013 diperkirakan sebesar 18.78 % realisasi menurun menjadi 4,51 %;
- Kepatuhan terhadap Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditargetkan sebesar 60,06% realisasi 60,05 %;
- Kepatuhan Terhadap Norma kerja ditargetkan sebesar 74,79% realisasi 74.79 %;
- Kepatuhan Terhadap Norma Jaminan Sosial Tenaga kerjaditargetkan sebesar 93,96% realisasi 93,92 %;
- Angka Kecelakaan Kerja ditargetkan sebesar 4,32% realisasi 3,44 %;
- Angka Penuntasan / penyelesaian perselisihan hubungan industrial ditargetkan sebesar 100% realisasi 82.16 %;
- Pemberlakuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama ditargetkan sebesar 7,94% realisasi 37.21 %;
- Kepatuhan atas ketentuan mengenai Kepemilikan Lembaga Kerjasama Bipartit ditargetkan sebesar 3,18% realisasi 20,82 %;
- Pembinaan transmigrasi ditargetkan sebesar 25 orang realisasi 100 orang.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Ketenagakerjaan antara lain:

- Jumlah pencari kerja lebih banyak, tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
- Anggaran yang diperlukan oleh perusahaan cukup besar dalam pemenuhan norma K3;
- Masih banyaknya pelanggaran normatif yang dilakukan oleh perusahaan terutama perusahaan skala menengah ke bawah terkait dengan UMK dan norma kerja lainnya;
- Masih adanya perusahaan-perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjaanya pada program Jamsostek;
- Dari 95 perselisihan yang masuk ke Disnaker yang terbanyak adalah perselisihan PHK karena perusahaan mengadakan efisiensi sebab

- perusahaan tidak mampu membayar upah (UMK terlalu tinggi kenaikannya). Pekerja / SP banyak melakukan unjuk rasa / mogok kerja menuntut upah sesuai Pergub yang ada;
- Permintaan bertransmigrasi banyak, namun tidak mempunyai dana untuk pemberangkatannya.

Solusi atas permasalahan tersebut adalah:

- Diadakan sosialisasi tentang pemahaman Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) lebih mendalam;
- Dilakukan pembinaan ketenagakerjaan dan sosialisasi aturan ketenagakerjaan;
- Pemberian bantuan dana untuk calon transmigran.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Ketenagakerjaan adalah:

- Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Dan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja tingkat provinsi;
- Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tingkat Nasional;
- Pembina Industri Peace (Festival Jatim Kompeten Award 2013);
- Zero Accident Award Tingkat Nasional.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pada tahun 2013 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sekretariat Daerah dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 5 program terdiri 14 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.349.779.500,00 terrealisasi sebesar Rp. 2.253.706.350,00 tidak terserap Rp. 96.073.150,00 rupiah dengan rincian sebagai berikut:

- 15.1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 3 program terdiri 11 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 1.479.779.500,00 terrealisasi sebesar

Rp 1.433.641.400,00, tidak terserap Rp 46.138.100,00, disebabkan Efisiensi anggaran.

15.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 840.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp 790.064.950,00, tidak terserap Rp 49.935.050,00, disebabkan

1) Efisiensi Rp 48,624,950.00

2) Sisa Lelang Rp 1.310.100,00

15.3. Kecamatan Kebomas melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 20.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp 20.000.000,00.

15.4. Kecamatan Bungah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 10.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp 10.000.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan;
- Tersusunnya Buletin Produk Unggulan;
- Terselenggaranya expose produk;
- Terciptanya kemampuan manajemen bagi aparatur;
- Terselenggaranya fasilitasi mengikuti pameran;
- Terwujudnya potensi produk kerajinan daerah;
- Terselenggaranya kegiatan pembinaan koperasi berprestasi;
- Terselenggaranya peningkatan kinerja koperasi;
- Terwujudnya Koperasi yang tertib administrasi;
- Terbinanya koperasi yang mampu mensejahterahkan anggota Masyarakat;
- Tersusunnya Petunjuk teknis tentang pendirian koperasi bagi LKM/koperasi yang belum menyesuaikan dengan UU nomor 17 tahun 2012;
- Tersusunnya buku profil Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kab. Gresik.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Koperasi aktif yang ditargetkan 85% sedangkan realisasinya sebesar 83%;
- Usaha Mikro dan Kecil yang ditargetkan 62% sedangkan realisasinya 99%;
- Koperasi yang mendapatkan penilaian baik ditargetkan 77% sedangkan realisasinya 37%.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah antara lain:

- Kurangnya Manajemen pengelolaan koperasi;
- Kurangnya Pengembangan Usaha koperasi;
- Lemahnya SDM pengelolaan UMKM;
- Kurangnya Akses Jaringan Penjualan;
- Kurangnya Akses Permodalan;
- Banyaknya koperasi yang tidak melakukan pelaporan / RAT'

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah:

- Peringkat ke 233 Tingkat Dunia koperasi besar dunia versi *International Cooperative Alliance (ICA)*;
- Juara II Koperasi Berprestasi Kategori Koperasi Jasa Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara III pada IKM Pangan Award Kategori Industri Inovasi melalui olahan pangan dari terong Tingkat Provinsi;
- Penghargaan Dewan Kerajinan Nasional Pada Karya Kriya Tenun Ikat Sutra Kreasi Kria Unggulan Kategori Tekstil.

16. Urusan Penanaman Modal

Pada tahun 2013 Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, serta Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 3 program terdiri 22 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp3.773.700.000,00 terrealisasi

sebesar Rp3.480.924.623,00 tidak terserap Rp292.775.377,00 dengan rincian sebagai berikut:

16.1. Badan Penanaman Modal dan Perijinan melaksanakan 2 program terdiri 19 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 3.073.700.000,00, terrealisasi sebesar Rp 2.842.237.023,00, tidak terserap Rp 231.462.977,00, disebabkan antara lain:

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1) Efisiensi | Rp 208.660.800,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp 22.802.177,00 |

16.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp700.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp638.687.600,00 tidak terserap Rp61.312.400,00 disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersusunnya laporan hasil kesepakatan bersama antar lembaga;
- Tersusunnya buku/dokumen bahan-bahan perencanaan Penanaman Modal Daerah;
- Terlaksananya pertemuan Forum Komunikasi dan kerjasama di Bidang Penanaman Modal;
- Tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai dan terintegrasi;
- Tersedianya buku Evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal serta Pembinaan / Sosialisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Terwujudnya pengembangan pelayanan investasi sesuai dengan *International Organization for Standardization (ISO 9001:2008)*;
- Tersedianya Sistem Informasi Geografi Potensi Investasi;
- Terlaksananya Pelaksanaan Promosi di bidang Investasi;
- Terlaksananya penyelenggaraan izin reklame;
- Tersedianya sistem informasi sebagai penunjang kegiatan operasional penyelenggaraan izin reklame dengan menentukan titik lokasi strategis penyelenggaraan reklame di Kab. Gresik

- Tersedianya Kebijakan dibidang Penanaman Modal berupa rancangan Peraturan Daerah terkait dengan investasi;
- Tersusunnya BAP dalam rangka realisasi Investasi perusahaan;
- Terlaksananya Pendaftaran Perusahaan;
- Terlaksananya Operasional Sekretariat Tim percepatan pengembangan Gresik Selatan;
- Terciptanya Koordinasi Antar Lembaga tentang penerbitan ijin;
- Terlaksananya Penerbitan ijin prinsip dan lokasi sesuai dengan tata ruang;
- Terlaksananya Verifikasi Perizinan Usaha;
- Terlaksananya Sosialisasi Perizinan;
- Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi Penanam Modal;
- Tersedianya Software dan Hardware Arsip Izin;
- Terlaksananya pasar bandeng tradisional dan kontes bandeng tradisional;
- Terfasilitasinya kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha;
- Tersusunnya Laporan hasil evaluasi kinerja BUMD;

Adapun permasalahan pada Urusan Penanaman Modal adalah:

- Kepatuhan perusahaan baru untuk melengkapi perizinan (izin gangguan/HO) masih kurang.;
- Penjadwalan ulang kunjungan verifikasi kepada perusahaan disesuaikan dengan kesiapan pihak manajemen perusahaan;

Solusi permasalahan pada Urusan Penanaman Modal adalah:

- Meningkatkan frekuensi pembinaan dan sosialisasi regulasi terkait perizinan.;
- Koordinasi penjadwalan kunjungan verifikasi kepada perusahaan dilakukan 1–2 minggu sebelumnya.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Penanam Modal tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Nilai Realisasi PMDN ditargetkan sebesar 810,90 milyar rupiah realisasi 942,53 milyar rupiah;
- Penyelesaian Permohonan Ijin Lokasi sebanyak 40 ijin;
- Penyelesaian Permohonan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) sebanyak 15 ijin;
- Penyelesaian Permohonan Ijin Gangguan (HO) sebanyak 123 ijin;
- Penyelesaian Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan sebanyak 739 ijin ;
- Penyelesaian Permohonan Ijin Prinsip sebanyak 206 ijin;
- Penyelesaian Permohonan Ijin Usaha sebanyak 58 ijin.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Penanaman Modal antara lain:

- Kurangnya data atau dokumen pertanahan;
- Proses penerbitan izin sangat tergantung dengan rekomendasi dari instansi terkait;
- Minimnya SDM yang menguasai bidang pertambangan;
- Kepatuhan perusahaan baru untuk melengkapi perizinan (izin gangguan/HO) masih kurang;
- Permohonan tidak sesuai dengan tata ruang (RTRW).

17. Urusan Kebudayaan

Pada tahun 2013 Urusan Kebudayaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 9 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp2.869.430.500,00 terrealisasi sebesar Rp2.661.103.800,00, tidak terserap Rp208.326.700,00, disebabkan Efisiensi Anggaran:

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Pelestarian adat budaya daerah;
- Meningkatnya animo masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah;

- Pengetahuan masyarakat tentang sejarah Gresik;
- Tercapainya presentase pengetahuan masyarakat;
- Terlaksananya pengelolaan museum;
- Kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Gresik berkembang;
- Terlaksananya pawai mobil hias dan kirab budaya di Kabupaten Gresik;
- Berkembangnya kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Gresik;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kebudayaan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan festival seni dan budaya ditargetkan sebanyak 7 kegiatan realisasi 12 kegiatan;
- Sarana penyelenggaraan seni dan budaya ditargetkan sebesar 7 unit realisasi 9 unit;
- Peninggalan / Cagar Budaya (Situs) yang dilestarikan ditargetkan sebesar 36,36% realisasi 100%.

18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pada tahun 2013 Urusan Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Daerah dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 15 program terdiri 28 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp3.489.548.200,00, terrealisasi sebesar Rp2.978.618.016,00, tidak terserap Rp510.930.184,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 18.1. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan 6 program terdiri 18 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.863.655.200,00, terrealisasi sebesar Rp2.376.139.116,00, tidak terserap Rp.487.516.084,00, disebabkan adanya Efisiensi.
- 18.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp512.015.000,00, terrealisasi sebesar

Rp488.612.150,00 tidak terserap Rp23.402.850,00, disebabkan adanya Efisiensi.

- 18.3. Kecamatan Kebomas melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp17.168.000,00, terrealisasi sebesar Rp17.156.750,00 tidak terserap Rp11.250,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 18.4. Kecamatan Kedamean melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp15.000.000,00;
- 18.5. Kecamatan Menganti melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp15.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp15.000.000,00;
- 18.6. Kecamatan Sidayu melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp12.310.000,00, terrealisasi sebesar Rp12.310.000,00;
- 18.7. Kecamatan Panceng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp8.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp8.000.000,00;
- 18.8. Kecamatan Bungah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp41.400.000,00, terrealisasi sebesar Rp41.400.000,00;
- 18.9. Kecamatan Dukun melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp5.000.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan pada generasi muda;
- Terpantaunya peran serta dan kegiatan kepemudaan;
- Meningkatnya jiwa kepemimpinan pada diri para pemuda;
- Meningkatnya kepedulian sosial pemuda terhadap lingkungan hidup;
- Terbinanya pemuda pelopor keamanan lingkungan;
- Terbentuknya kelompok pemuda terampil;

- Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi;
- Terwujudnya tenaga keolahragaan yang berprestasi;
- Pengawasan kegiatan kepemudaan di Kecamatan:
- Terlaksanannya penyelenggaraan olahraga tradisional di masyarakat;
- Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap potensi wisata Gresik;
- Terwujudnya dukungan organisasi kepemudaan terhadap program pemerintahan daerah;
- Meningkatnya kebugaran jasmani karyawan/karyawati Pemkab Gresik;
- Terselenggaranya pelatihan atlet olahraga berprestasi;
- Terjaganya kesehatan PNS, Lurah dan Kepala Desa di Lingkungan Kec. Kebomas;
- Peningkatan kualitas SDM pengurus dan anggota organisasi kepemudaan;
- Terwujudnya penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Persentase organisasi kepemudaan yang aktif ditargetkan sebesar 100% realisasi 75%;
- Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) ditargetkan sebanyak 2 unit realisasi 3 Unit;
- Lapangan Olah Raga ditargetkan sebesar 26 unit realisasi 24 unit;
- Persentase cabang olah raga yang aktif ditargetkan sebesar 89,66% realisasi 63,82%.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator Kinerja Sasaran meningkatnya Prestasi olah raga Daerah antara lain:

- Adanya sebagian Organisasi Kepemudaan yang tidak aktif disebabkan sebagian besar anggotanya melanjutkan Pendidikan ke luar daerah dan usianya sudah melebihi 30 tahun sehingga tidak masuk kategori pemuda;
- Terjadi permasalahan penyelesaian kasus tanah yang akan digunakan untuk pembangunan lapangan olah raga;

- Tidak tercapainya persentase cabang olah raga yang aktif disebabkan pengkaderan atlit belum berjalan dengan baik.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pada tahun 2013 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 62 program terdiri 95 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp13.076.602.778,00 terrealisasi sebesar Rp11.610.126.075,00 tidak terserap Rp1.466.476.703,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 19.1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 1 program terdiri 8 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.520.588.500,00 terrealisasi sebesar Rp1.453.487.400,00, tidak terserap Rp67.101.100,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 19.2. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan 6 program terdiri 18 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp3.900.440.178,00 terrealisasi sebesar Rp2.887.467.200,00, tidak terserap Rp1.012.972.978,00, disebabkan adanya efisiensi:
- 19.3. Satuan Polisi Pamong praja melaksanakan 3 program terdiri 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.096.997.000,00, terrealisasi sebesar Rp2.078.818.150,00, tidak terserap Rp18.178.850,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 19.4. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp4.372.361.100,00, terrealisasi sebesar Rp4.060.834.950,00 tidak terserap Rp311.526.150,00 disebabkan adanya efisiensi.

- 19.5. Kecamatan Gresik melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp77.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp77.000.000,00;
- 19.6. Kecamatan Kebomas melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp67.912.000,00, terrealisasi sebesar Rp61.782.375,00 tidak terserap Rp.6.129.625,00 disebabkan adanya efisiensi.
- 19.7. Kecamatan Manyar melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp55.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp55.000.000,00;
- 19.8. Kecamatan Cerme melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp64.960.000,00, terrealisasi sebesar Rp64.960.000,00;
- 19.9. Kecamatan Benjeng melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp65.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp65.000.000,00;
- 19.10. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp65.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp64.400.000,00, tidak terserap Rp600.000,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 19.11. Kecamatan Duduksampeyan melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp67.260.000,00, terrealisasi sebesar Rp66.895.000,00 tidak terserap 365.000,00 disebabkan adanya efisiensi;
- 19.12. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp65.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp65.000.000,00;
- 19.13. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp65.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp65.000.000,00;

- 19.14. Kecamatan Kedamean melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp65.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp65.000.000,00;
- 19.15. Kecamatan Menganti melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp65.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp65.000.000,00;
- 19.16. Kecamatan Sidayu melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp65.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp65.000.000,00 ;
- 19.17. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp65.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp65.000.000,00;
- 19.18. Kecamatan Panceng melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp54.684.000,00, terrealisasi sebesar Rp54.681.000,00 tidak terserap Rp3.000 disebabkan efisiensi;
- 19.19. Kecamatan Bungah melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp65.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp65.000.000,00 ;
- 19.20. Kecamatan Dukun melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp65.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp65.000.000,00;
- 19.21. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp74.400.000,00, terrealisasi sebesar Rp39.800.000,00 tidak terserap Rp. 34.600.000,00 disebabkan adanya efisiensi.
- 19.22. Kecamatan Tambak melaksanakan 3 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp75.000.000, terrealisasi sebesar Rp60.000.000,00, tidak terserap Rp15.000.000,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi bencana;
- Terpenuhinya Kebutuhan Logistik bagi korban bencana;
- Tersedianya Informasi Wilayah Potensi Rawan Bencana;
- Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih;
- Terwujudnya Tenaga Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana;
- Terwujudnya Pengurus yang tangguh;
- Tersusunnya Buku Rencana Kontijensi;
- Tercapainya Tenaga Teknis Tanggap Darurat;
- Terciptanya prosentase kesiagaan anggota linmas dalam pengendalian keamanan lingkungan;
- Terminimalisirnya gangguan Kamtibmas;
- Terselenggaranya pemilihan Gubernur dan wakil gubernur yang aman dan lancar;
- Terselenggaranya tim koordinasi pemilu Gubernur Dan wakil Gubernur Jawa Timur;
- Berkurangnya pelanggaran HAM;
- Terselenggaranya sosialisasi Rencana aksi Nasional HAM;
- Terlaksananya Tim terpadu tingkat kabupaten penanganan gangguan keamanan dalam negeri;
- Terpeliharanya kerukunan antar umat beragama yang semakin mantap;
- Meningkatkan rasa nasionalisme;
- Terkenangnya sejarah dan cinta terhadap Provinsi Jawa Timur;
- Tercapainya prosentase peningkatan kebersamaan/kerukunan;
- Tercapainya komunikasi generasi muda / murid SMA dalam pelaksanaan Wasbang;
- Terlaksananya upacara bendera 17 Agustus 2013 dengan lancar;
- Meningkatkan ketrampilan anggota korsik;
- Meningkatkan kualitas anggota linmas;
- Meningkatkan tertib administrasi bantuan keuangan parpol;
- Terbentuknya forum kewaspadaan dini masyarakat;
- Meningkatkan kualitas dan prestasi kafilah;

- Terselenggaranya peringatan hari besar Islam;
- Terselenggaranya kegiatan pembinaan keagamaan;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas tempat ibadah;
- Terselenggaranya kegiatan istiqhatsah dan khotmil Quran;
- Terselenggaranya pemberangkatan haji;
- Penyaluran santunan anak yatim;
- Tercapainya keamanan lingkungan di wilayah Kecamatan;
- Terawasinya situasi keamanan dan kenyamanan di kecamatan ;
- Terbentuknya kafilah peserta lomba MTQ berkualitas;
- Tersajinya informasi kondisi wilayah, galian C dan warung liar.

Adapun permasalahan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah:

- Adanya indikasi peningkatan gangguan linmas dan kriminalitas;
- Menurunnya wawasan kebangsaan pada generasi muda, pelajar, dan remaja Pondok pesantren.
- Banyaknya anggota Korps Musik (korsik) yang sudah tua yang dapat mengurangi kelencaran kegiatan korsik;

Solusi permasalahan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah:

- Melakukan koordinasi dan evaluasi dengan instansi terkait untuk penyelesaian konflik;
- Melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan secara rutin;
- Melaksanakan regenerasi dengan mengangkat tenaga harian lepas (THL) sebanyak 25 Orang yang mempunyai keahlian di bidang musik.

Adapun Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Jumlah Parpol yang mendapat sosialisasi ditargetkan sebanyak 11 parpol realisasi 11 parpol;
- Jumlah LSM/ Ormas/ OKP yang dibina ditargetkan sebanyak 164 LSM realisasi sebanyak 164 LSM/Ormas/OKP;

- Konflik yang dapat diselesaikan ditargetkan sebesar 100% realisasi 89 %;
- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) dalam rangka penegakan PERDA di Kabupaten Gresik ditargetkan sebesar 60% realisasi 60%,
- Demo/protes terhadap PERDA/Perbub ditargetkan 98,00 % terrealisasi 100 %
- Keberadaan Perda tentang penyelenggaraan Trantibum ditargetkan ada realisasi ada.
- Keberadaan Perda tentang PSK dan Miras ditargetkan ada realisasi ada
- Rasio Satpol PP terhadap jumlah penduduk ditargetkan 0,05 per 10.000 penduduk terrealisasi 1,42 per 10.000 penduduk
- Sistem pengendalian dan penanggulangan bencana alam ditargetkan ada realisasi ada.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah:

- Juara Umum MTQ XXV Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Juara II Lomba Kerapian dan Ketertiban pasukan upacara pada HUT Satpol PP ke-63 se-Jawa Timur;
- Juara III Lomba Pengetahuan dan wawasan Satpol PP se-Jawa Timur dalam acara Jambore Satpol PP Ke-XI;
- Juara Harapan Lomba kerapian tenda se-Jawa Timur dalam acara Jambore Satpol PP Ke-XI;
- Juara Harapan Lomba PMI se-Jawa Timur dalam acara Jambore Satpol PP Ke-XI.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pada tahun 2013 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian di Pemerintah Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Kecamatan serta Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 18 program terdiri 158 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.57.431.430.130,00, terrealisasi sebesar Rp.45.358.358.983,00, tidak terserap Rp.12.073.071.147,00 dengan rincian sebagai berikut:

20.1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 1 program terdiri 11 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.524.915.500,00, terrealisasi sebesar Rp. 1.296.591.115,00, tidak terserap Rp. 228.324.385,00, disebabkan antara lain:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1) Efisiensi | Rp. 67.016.450,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp. 11.307.935,00 |
| 3) Kegiatan yang belum dilaksanakan | Rp. 150.000.000,00 |

20.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 10 program terdiri 51 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 12.559.963.930,00, terrealisasi sebesar Rp.10.987.733.428,00, tidak terserap Rp.1.572.230.502,00, disebabkan antara lain:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1) Efisiensi | Rp. 331.643.250,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp. 1.240.587.252,00 |

20.3. Sekretariat DPRD melaksanakan 3 program terdiri 14 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.22.389.453.500,00, terrealisasi sebesar Rp.15.707.325.077,00, tidak terserap Rp.6.682.128.423,00, disebabkan efisiensi.

20.4. Inspektorat Daerah melaksanakan 3 program terdiri 10 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.2.300.801.000,00, terrealisasi

sebesar Rp.1.841.849.250,00, tidak terserap Rp.458.951.750,00, disebabkan efisiensi.

- 20.5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 1 program terdiri 21 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.9.984.590.200,00, terrealisasi sebesar Rp.7.646.692.370,00, tidak terserap Rp.2.337.897.830,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp. 2.297.897.830,00
- 2) Kegiatan yang belum Rp. 40.000.000,00 dilaksanakan

- 20.6. Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan 3 program terdiri 42 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.8.288.293.000,00, terrealisasi sebesar Rp.7.499.021.425,00, tidak terserap Rp.789.271.575,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp. 694.171.575,00
- 2) Sisa Lelang Rp. 55.100.000,00
- 3) Kegiatan yang belum Rp. 40.000.000,00 dilaksanakan

- 20.7. Kecamatan Gresik melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.11.500.000,00, terrealisasi sebesar Rp.11.500.000,00;

- 20.8. Kecamatan Kebomas melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.13.500.000,00, terrealisasi sebesar Rp.13.500.000,00;

- 20.9. Kecamatan Manyar melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.8.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp.8.000.000,00;

- 20.10. Kecamatan Cerme melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.19.500.000,00, terrealisasi sebesar Rp.19.500.000,00.

- 20.11. Kecamatan Benjeng melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.20.500.000,00, terrealisasi sebesar Rp.20.500.000,00.
- 20.12. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.21.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp.21.000.000,00.
- 20.13. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.9.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp.9.000.000,00.
- 20.14. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.21.500.000,00, terrealisasi sebesar Rp.21.500.000,00.
- 20.15. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.15.500.000,00, terrealisasi sebesar Rp.15.500.000,00.
- 20.16. Kecamatan Kedamean melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.15.500.000,00, terrealisasi sebesar Rp.15.500.000,00.
- 20.17. Kecamatan Menganti melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.17.413.000,00, terrealisasi sebesar Rp.17.392.318,00 terserap Rp. 20.682,00 disebabkan adanya efisiensi.
- 20.18. Kecamatan Sidayu melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.18.500.000,00, terrealisasi sebesar Rp.18.315.000,00 tidak terserap Rp.185.000,00 disebabkan adanya efisiensi.
- 20.19. Kecamatan UJungpangkah melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.13.500.000,00, terrealisasi sebesar Rp.13.500.000,00.

- 20.20. Kecamatan Panceng melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.6.500.000,00, terrealisasi sebesar Rp.6.500.000,00.
- 20.21. Kecamatan Bungah melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.19.500.000,00, terrealisasi sebesar Rp.19.500.000,00.
- 20.22. Kecamatan Dukun melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.22.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp.22.000.000,00.
- 20.23. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.16.500.000,00, terrealisasi sebesar Rp.12.439.000,00 tidak terserap Rp.4.061.000,00 disebabkan adanya efisiensi.
- 20.24. Kecamatan Tambak melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.14.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp.14.000.000,00.
- 20.25. Sekretariat KORPRI melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.100.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp.100.000.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya dokumen KLHS Perencanaan Kawasan Pelabuhan Internasional;
- Tersusunnya Rekomendasi Aksi Pengembangan Kemitraan (Partnership) Pembangunan yang berkelanjutan;
- Terbinanya forum komunikasi bersama PTS di Kabupaten Gresik sebagai pendukung kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Gresik;
- Tersusunnya buku penguatan system inovasi daerah;

- Terpetakannya permasalahan dan potensi masing-masing desa di Kabupaten Gresik serta merangking prioritas masalah dan wilayah yang menjadi sasaran kebijakan pembangunan;
- Tersusunnya dokumen yang menghasilkan kebijakan guna terwujudnya keseimbangan pembangunan fisik dan non fisik di Pedesaan Kabupaten Gresik;
- Terpetakannya jenis Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Gresik dalam memberdayakan Usaha Mikro serta memprioritaskan masalah yang menjadi sasaran kebijakan pembangunan;
- Terinventarisasinya seluruh system informasi yang ada di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Gresik;
- Terlaksanakannya Rapat Koordinasi Unsur Muspida;
- Terselenggaranya Penerimaan Kunjungan Kerja;
- Tersedianya Perangkat Komputer yang terinstal perangkat Legal (Windows 8 Profesional di Seluruh SKPD);
- Terproteksinya data-data elektronik dari virus / spyware yang terkoneksi WAN dan LAN (58 SKPD);
- Tersedianya aplikasi Data Center;
- Tersusunnya buku Analisa Standar Biaya (ASB) Pemkab Gresik;
- Tersusunnya Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas;
- Terlaksananya Kegiatan Survey, Perencanaan, Sosialisasi dan Monitoring Bantuan Peningkatan Jalan Poros Desa;
- Tersusunnya kegiatan keprotokolan;
- Terwujudnya pelayanan public yang intensif;
- Terselenggaranya pelaksanaan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah;
- Terintegrasinya nilai-nilai dasar Budaya Kerja pada unit Pelayanan SKPD;
- Terlaksananya pemberian Penghargaan Penganugerahan The Sunan Giri Award;
- Tersusunnya Kamus Kompetensi Jabatan;

- Terlaksananya Kajian tentang tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja;
- Terlaksananya Workshop Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, Analisis Jabatan dan Tata kerja;
- Terwujudnya penataan dokumen fisik dan elektronik, penggandaan perda dan perbup, pengadaan referensi perundang-undangan;
- Terlaksananya pendampingan dan persidangan terhadap aparatur pemerintah dan perangkat daerah yang terkena permasalahan hukum;
- Tersedianya data produk hukum daerah dan nasional;
- Terlaksananya sosialisasi Peraturan Daerah;
- Terlaksananya legislasi produk hukum daerah;
- Terlaksananya penyusunan dan pembahasan ranperda;
- Terlaksananya pembentukan dan pembinaan desa / kelurahan sadar hukum;
- Terlaksananya penyusunan dan pembahasan ranperda;
- Terlaksananya perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakilnya;
- Terjaganya kondisi kesehatan KDH dan Wakil KDH;
- Terlaksananya Pembahasan PAPBD 2013 dan RAPBD 2014;
- Tersedianya Buku Laporan hasil hearing / dialog dan Koordinasi;
- Terselenggaranya rapat-rapat di DPRD;
- Terlaksananya kegiatan reses;
- Terlaksananya Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah;
- Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- Terselenggaranya kesehatan Anggota DPRD;
- Terlaksananya Pembahasan dan evaluasi Perda-perda;
- Tersusunnya laporan kinerja Badan Kehormatan DPRD;
- Terselenggaranya pembahasan Ranperda menjadi Perda;
- Terlaksananya Pembahasan pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD 2012 dan LKPJ Bupati;
- Terlaksananya Uji Kelayakan untuk Pejabat Struktural Eselon III.

- Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus yang ditandatangani Bupati Gresik
- Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi;
- Terlaksananya Koordinasi Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah;
- Terlaksananya Pemeriksaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- Terlaksananya verifikasi RKA dan DPA SKPD;
- Terlaksananya Pendataan pajak;
- Terlaksananya Rekon Penatausahaan Keuangan Daerah;
- Tersedianya perangkat SIPKD dan operasionalisasi SIPKD;
- Terlaksananya Rekonsiliasi dan Pendataan Aset;
- Terlaksananya verifikasi obyek pajak;
- Terlaksananya Pemberian Penghargaan Untuk Wajib Pajak;
- Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan APBD dan PAPBD;
- Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Pejabat Struktural Eselon III dan IV;
- Terdatanya PNS ke dalam software Sistem Informasi Kepegawaian;
- Terlaksananya sidak-sidak di SKPD terkait disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Terlaksananya rapat-rapat Tim Baperjakat Kabupaten Gresik guna memberikan pertimbangan kepegawaian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian terkait mutasi jabatan dan kenaikan pangkat PNS;
- Terlaksananya bimtek pembekalan PNS yang akan purna tugas;

Adapun permasalahan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah:

- Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Riset masih dalam proses sehingga dana tidak diserap;
- Proses pencairan di lingkungan Setda kurang lancar akibat terbatasnya uang persediaan;
- Kegiatan Sosialisasi JPD PAPBD tidak dilaksanakan;
- Pelaksanaan kegiatan monitoring JPD PAPBD tidak maksimal;
- Proses pencairan di lingkungan Setda kurang lancar akibat terbatasnya uang persediaan;
- Kegiatan survey awal SDB PAPBD tidak dilaksanakan;
- Kegiatan Sosialisasi SDB PAPBD tidak dilaksanakan;
- Pelaksanaan kegiatan monitoring SDB PAPBD tidak maksimal;
- Terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa yang memiliki sertifikasi JFA;
- Adanya aparatur pengawas yang memiliki sertifikasi JFA dimutasi ke SKPD lain;
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi;
- Masih adanya auditan yang tidak segera menindak lanjuti rekomendasi auditor;
- Kurang adanya keterbukaan pihak auditan terhadap auditor sehingga menyulitkan untuk mendapatkan data;
- SKPD ada yang belum memahami tugas dan fungsi Inspektorat sebagai pembinaan dalam pengawasan;
- Kegiatan pelaksanaan ujian penyesuaian ijasah belum dilaksanakan disebabkan Draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Ijin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah PNS masih dalam proses pembahasan di Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik;
- Insentif pelunasan PBB ke desa-desa disesuaikan dengan jumlah SPPT yang di bayar;

- Pemeliharaan Basis Data SISMIOP PBB Th 2013 belum selesai karena waktu yang dibutuhkan kurang.

Solusi permasalahan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah:

- Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2013 dianggarkan kembali pada tahun 2014;
- Mengikut sertakan Auditor maupun staf untuk melaksanakan Diklat, workshop, bintek dan pelatihan-pelatihan;
- Mengikut sertakan Auditor/ staf untuk mengikuti sertifikasi JFA;
- Memanfaatkan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada dengan maksimal;
- Setiap 6 (enam) bulan sekali dilaksanakan evaluasi dengan cara mengundang SKPD/ obyek pemeriksaan yang belum menindak lanjuti rekomendasi hasil temuan pemeriksaan;
- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan BPKP Perwakilan Jawa Timur mengenai permasalahan pengawasan;
- Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Perda yang ditetapkan ditargetkan sebanyak 10 Perda realisasi 16 Perda;
- Jumlah Perda yang dibatalkan ditargetkan sebanyak 0 Perda realisasi 0 Perda;
- Kasus hukum yang diselesaikan ditargetkan sebanyak 80% realisasi 20%;
- Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti/dilaksanakan ditargetkan sebesar 100% realisasi 100 %;

- Peraturan Bupati yang ditindak lanjuti ditargetkan sebesar 100% realisasi 100 %;
- Prosentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti ditargetkan sebesar 100% realisasi 100 %;
- Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi ditargetkan 25% terrealisasi 100%;
- Prosentase informasi masyarakat yang ditindak lanjuti ditargetkan sebesar 100% realisasi 53,47 %;
- Konsultasi Pemerintahan Kabupaten dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah ditargetkan sebanyak 34 kali realisasi sebanyak 34 Kali;
- Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKK LPPD) ditargetkan baik realisasi baik;
- Opini laporan keuangan ditargetkan (Wajar Tanpa Pengecualian) WTP realisasi Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
- Laporan keuangan yang disusun ditargetkan tepat waktu realisasi tepat waktu;
- APBD ditetapkan tepat waktu realisasi tepat waktu;
- Tersedianya PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peningkatan PAD ditargetkan sebesar 5,51% realisasi 17,59%;
- Keberadaan kemandirian daerah ditargetkan 21,03% realisasi 27,32%;
- Perusahaan Daerah dalam kondisi sehat ditargetkan 2 buah realisasi 3 buah;
- Aset/Bangunan yang dipelihara dan dimanfaatkan ditargetkan 92,40% realisasi 98,64 %;
- Voting yang dilakukan dalam sidang paripurna ditargetkan sebesar 0% realisasi 6 %;
- Keterlibatan masyarakat dalam pembahasan raperda ditargetkan 100% realisasinya 100 %;
- Perda inisiatif DPRD ditargetkan sebesar 3 perda realisasi 8 perda;
- Rasio pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya ditargetkan sebesar 96,91 % realisasi 84,4 %;

- Rasio jabatan struktural yang terisi ditargetkan sebesar 100% realisasi 85,4 %;
- Rasio Pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal ditargetkan sebesar 100 % realisasi 100 %;
- Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan ditargetkan sebesar 100 % realisasi 100 %;
- Kesesuaian SOTK SKPD dengan Pedoman / Peraturan tentang SOTK ditargetkan sebesar 100% realisasi 100 %;
- Persentase SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan ditargetkan 60% terrealisasi 100 %
- Jumlah MOU Kerjasama dengan Daerah Lain dan Pihak Ketiga ditargetkan sebesar 20 MOU realisasi 18 MOU;
- Keberadaan unit pelayanan pengadaan ditargetkan ada realisasi ada;
- Keberadaan E-procurement (pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik) ditargetkan ada realisasi Ada yaitu melalui LPSE Kab. Gresik;
- Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah ditargetkan 25 orang realisasi 189 orang.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RP.JM Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian antara lain:

- Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan diklat kepemimpinan;
- Terbatasnya personil/staf yang memiliki kompetensi sesuai standar yang ditetapkan.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah:

- Penghargaan Stand dan Produk Terbaik Tingkat Nasional;
- Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 Tingkat Nasional;
- Juara I Lomba UKS Tingkat Provinsi Jawa Timur;

21. Urusan Ketahanan Pangan

Pada tahun 2013 Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian,

Perkebunan dan Kehutanan dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 3 program terdiri 16 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp 1.535.007.900,00 terrealisasi sebesar Rp 1.423.128.100,00 tidak terserap Rp 111.879.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

21.1. Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan 1 program terdiri 12 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 962.092.900,00 terrealisasi sebesar Rp 855.370.100,00 tidak terserap Rp 106.722.800,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp 71.369.000,00
- 2) Sisa Lelang Rp 35.353.800,00

21.2. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 222.915.000,00, terrealisasi sebesar Rp 219.863.000,00 tidak terserap Rp 3.052.000,00, disebabkan efisiensi anggaran.

21.3. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 350.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp 347.895.000,00 tidak terserap Rp 2.105.000,00, disebabkan efisiensi anggaran.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya kegiatan bantuan kepada daerah yang terkena rawan pangan;
- Tersusunnya database produksi pangan;
- Tersedianya buku analisis perencanaan ketersediaan serta konsumsi pangan berbasis Pola Pangan Harapan (PPH);
- Terselenggaranya rapat koordinasi;
- Tersedianya data harga perbulan di tingkat produsen dan konsumen;
- Terlaksananya pembinaan pengelolaan lumbung pangan desa yang baik dan tersalurkannya bantuan motor roda tiga;
- Terlaksananya Sosialisasi dan identifikasi lokasi Desa rawan pangan;

- Terbangunnya lantai jemur bagi lembaga distribusi pangan Masyarakat;
- Terlaksananya pengujian laboratorium terhadap sampel bahan makanan serta Sosialisasi dan monitoring mutu dan keamanan pangan olahan yang mengandung Bahan Tambahan Pangan (BTP) / bahan kimia berbahaya;
- Terlaksananya pembinaan manajemen pemanfaatan modal;
- Terlaksananya Rakor dan pemberdayaan dewan ketahanan pangan Kab. Gresik.
- Terselenggaranya Lomba Cipta Menu dan penyuluhan pangan B2SA;
- Jumlah kelompok usaha/tani yang mengikuti pelatihan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, dan Jumlah peralatan penanganan pasca panen yang diserahkan pada masyarakat;
- Persentase jumlah peserta Temu Kaji Terap terhadap jumlah peserta yang perlu mendapat pelatihan;
- Jumlah peserta temu aplikasi Teknologi Budidaya Perikanan;
- Jumlah Peserta temu Aplikasi teknologi pengolahan hasil perikanan.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Ketahanan Pangan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Tersedianya regulasi ketahanan pangan;
- Ketersediaan pangan yang ditargetkan 199,18 Kg/kapita/tahun terrealisasi sebesar 191 Kg/kapita/tahun;
- Rata-rata konsumsi bahan pangan utama ditargetkan 94,35 Kg/kapita/tahun terrealisasi sebesar 94,8 Kg/kapita/tahun.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Ketahanan Pangan adalah:

- Juara I Kategori Cita Rasa dan Penampilan Tingkat Provinsi Jawa Timur.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada tahun 2013 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 40 program terdiri 68 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.7.760.485.500,00, terrealisasi sebesar Rp.7.411.863.940,00, tidak terserap Rp.348.621.560,00, dengan rincian sebagai berikut:

22.1. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 5 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.1.726.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp.1.528.993.950,00, tidak terserap Rp.197.006.050,00 disebabkan:

1) Efisiensi	Rp	117.726.050,00
2) Sisa Lelang	Rp	22.900.000,00
3) Kegiatan yang belum dilaksanakan	Rp	56.380.000,00

22.2. Kecamatan Gresik melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp.10.000.000,00;

22.3. Kecamatan Kebomas melaksanakan 2 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.80.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp.80.000.000,00;

22.4. Kecamatan Manyar melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp.30.000.000,00;

22.5. Kecamatan Cerme melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp.10.000.000,00;

22.6. Kecamatan Balongpanggang melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp.15.000.000,00;

22.7. Kecamatan Dudusampeyan melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,-, terrealisasi sebesar Rp. 29.998.000,- tidak terserap Rp.2.000,00 disebabkan adanya efisiensi.

- 22.8. Kecamatan Driyorejo melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.40.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp. 40.000.000,00 tidak terserap Rp.2.000,00 disebabkan adanya efisiensi.
- 22.9. Kecamatan Wringinanom melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 35.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp. 35.000.000,00;
- 22.10. Kecamatan Kedamean melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp. 40.000.000,00;
- 22.11. Kecamatan Menganti melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp. 20.000.000,00
- 22.12. Kecamatan Sidayu melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 28.845.000,00, terrealisasi sebesar Rp. 28.845.000,00
- 22.13. Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan 2 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp. 25.000.000,00
- 22.14. Kecamatan Panceng melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 45.995.500,00, terrealisasi sebesar Rp. 45.995.500,00;
- 22.15. Kecamatan Bungah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp. 15.000.000,00;
- 22.16. Kecamatan Dukun melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 22.080.000,00, terrealisasi sebesar Rp. 22.080.000,00;
- 22.17. Kecamatan Sangkapura melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.30.615.000,00, terrealisasi sebesar

Rp.30.395.000,00 tidak terserap Rp.220.000,00 disebabkan adanya efisiensi;

22.18. Kecamatan Tambak melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 41.500.000,00, terrealisasi sebesar Rp. 41.500.000,00;

22.18. Kantor Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan 4 program terdiri 23 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.5.515.450.000,00, terrealisasi sebesar Rp.5.364.056.490,00 tidak terserap Rp.151.393.510,00 disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terselenggaranya Bimtek Aparatur Kecamatan dan Studi banding Pelayanan publik kecamatan;
- terselesaikannya 30 Permasalahan Pemerintahan Desa (30 Rakor/Fasilitasi);
- Terlaksananya Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;
- Terlaksananya Bimbingan Teknik Administrasi Pertanahan;
- Tersedianya Software dan Hardware Sistem Informasi Administrasi Desa dan Kemampuan Perangkat Desa dalam Pengaplikasiannya;
- Terlaksananya Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan;
- Tersusunnya prioritas kegiatan pembangunan kecamatan;
- Terlaksananya pembinaan PKK ke desa / kelurahan;
- Terlaksananya Pembinaan pada Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
- Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintahan desa tentang administrasi pengelola keuangan;
- Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa;
- Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Lembaga Ekonomi desa;
- Terlaksananya Evaluasi Desa Berhasil;

- Terlaksananya Pembinaan / Pelatihan Administrasi BKAD PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di desa;
- Terlaksananya program Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah;
- Terlaksananya Bimtek Peningkatan Peran serta Lembaga Sosial Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
- Pembinaan Pengembangan Kawasan Perdesaan / Kelurahan Berbasis Masyarakat;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Kegiatan PKK aktif ditargetkan sebesar 84,04% realisasi 100 %;
- Kegiatan Posyandu Aktif ditargetkan sebesar 98,95% realisasi 100 %;
- Tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik menurun dari 15,33% menjadi 14,33%.

23. Urusan Statistik

Pada tahun 2013 Urusan Statistik di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 1 program terdiri 3 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar 400.000.000, terrealisasi sebesar 396.764.000, tidak terserap 3.236.000,00, disebabkan adanya efisiensi sebesar Rp3.236.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersusunnya buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- Tersusunnya buku Gresik Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka;
- Tersusunnya buku Indek Pembangunan Manusia (IPM).

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Statistik tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Keberadaan dokumen "Gresik Dalam Angka" ditargetkan ada realisasi ada;
- Keberadaan dokumen "Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)" ditargetkan ada realisasi ada;
- Keberadaan dokumen "Indek Pembangunan Manusia (IPM)" ditargetkan ada realisasi ada.

24. Urusan Kearsipan

Pada tahun 2013 Urusan Kearsipan di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip serta Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 4 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp379.178.000,00 terrealisasi sebesar Rp352.165.630,00 tidak terserap sebesar Rp27.012.370,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 24.1. Kantor Perpustakaan dan Arsip melaksanakan 3 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar 181.790.000, terrealisasi sebesar 176.782.880,00 tidak terserap 5.007.120,00, disebabkan adanya efisiensi.
- 24.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar 197.388.000,00 terrealisasi sebesar 175.382.750,00 tidak terserap Rp22.005.250,00 disebabkan adanya efisiensi:

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terkumpulnya arsip yang sudah diproses dengan rapi;
- Terjaganya umur dan kelestarian Dokumen / Arsip Daerah;
- Meningkatnya kemampuan mengelola arsip di desa;
- Terselenggaranya bimtek aplikasi surat menyurat secara elektronik;

Capaian Indikator Kinerja RPJMD Urusan Kearsipan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku ditargetkan sebesar 56,90% realisasinya 80 %.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2013 Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 5 program terdiri 20 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp7.035.107.250,00 terrealisasi sebesar Rp6.655.778.620,00 tidak terserap Rp379.328.630,00 dengan rincian sebagai berikut:

25.1. Sekretariat Daerah melaksanakan 4 program terdiri 17 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp5.126.779.250,00 terrealisasi sebesar Rp4.895.801.120,00 tidak terserap Rp230.978.130,00, disebabkan antara lain:

1) Efisiensi	Rp	49.343.942,00
2) Sisa Lelang	Rp	20.833.038,00
3) Lelang gagal	Rp	31.500.000,00
4) Kegiatan yang tidak/belum dilaksanakan	Rp	129.301.150,00

25.2. Sekretariat DPRD melaksanakan 1 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.908.328.000, terrealisasi sebesar Rp1.759.977.500,00 tidak terserap Rp148.350.500,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tercukupinya layanan TI pada semua Client yang terkoneksi Jarkominfo dan pemahaman SPSE;
- Tersedianya alat ukur teropong 1 set;
- Terpeliharanya Alat dan pengembangan persandian sebanyak 42 unit;
- Tercapainya monitoring dan evaluasi SIM yang ada pada SKPD sebanyak 30 SIM;

- Terwujudnya kelancaran pengembangan administrasi (e-government) desa/kelurahan;
- Terbangunnya backbone Fiber Optic WAN Pemkab Gresik;
- Tersusunnya Peraturan Bupati SIMDA;
- Meningkatkan Ketrampilan SDM aparatur dalam Pembangunan dan Pengembangan WEB/Blog sebanyak 65 orang;
- Tercapainya peningkatan kemampuan operator sandi terhadap kode-kode pembicaraan melalui radio VHF sebanyak 23 SKPD;
- Tersedianya Operator Data Center sebanyak 60 operator;
- Terpublikasikannya kegiatan pembangunan daerah melalui media massa;
- Tercapainya peningkatan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Tersedianya media untuk mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah;
- Tersedianya leaflet, booklet dokumentasi foto dan video/audio visual;
- Tercapainya pengembangan SDM bagi usaha kecil dan pendidikan di pedesaan/perkotaan di 16 Kecamatan;
- Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Produk Berpita Cukai melalui Media Cetak dan Elektronik;
- Terjalinnnya Hubungan yang Harmonis antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Wartawan;
- Tersedianya media untuk mempublikasikan kegiatan DPRD;

Adapun permasalahan pada Urusan Komunikasi dan Informatika adalah:

- Kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah tidak dapat terserap seluruhnya dikarenakan dialog khusus di televisi ditunda karena bertepatan dengan hari jadi Kota Gresik;

Solusi permasalahan pada Urusan Komunikasi dan Informatika adalah:

- Dianggarkan kembali Tahun 2014 dan dilaksanakan pada bulan Pebruari/ Maret 2014.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2013 sebagai berikut:

- Keberadaan website Pemerintah Daerah ditargetkan ada realisasinya ada;
- Pengunjung website setiap tahun ditargetkan 503.874 netter realisasi 716,907 netter;
- Sistem informasi yang tersedia ditargetkan 25 buah realisasi 30 buah;
- Jumlah pemberitaan di media ditargetkan 390 kali terrealisasi 692 kali;
- Keberadaan persuratan secara elektronik ditargetkan ada terrealisasi ada.

26. Urusan Perpustakaan

Pada tahun 2013 Urusan Perpustakaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 1 program terdiri 5 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp714.286.300,00 terrealisasi sebesar Rp690.103.010,00 tidak terserap Rp24.183.290,00, disebabkan adanya efisiensi:

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Meningkatnya kemauan ingin belajar pada masyarakat
- Meningkatnya minat baca masyarakat;
- Meningkatnya Kemampuan pengelolaan Perpustakaan;
- Bertambahnya jumlah buku di perpustakaan desa;
- Bertambahnya jumlah referensi buku di perpustakaan daerah;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perpustakaan tahun 2013 sebagai berikut:

- Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan ditargetkan 129.142 buku realisasi 96.335 buku;
- Pengunjung perpustakaan ditargetkan 603.827 orang pengunjung realisasi 1.371.507 orang pengunjung;

- Jumlah anggota Perpustakaan ditargetkan 28.987 anggota realisasi 23.287 anggota.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Perpustakaan antara lain:

- Target koleksi buku tidak tercapai karena keterbatasan anggaran untuk pengadaan buku;
- Target anggota perpustakaan tidak tercapai karena kecenderungan masyarakat menggunakan internet;

C. Urusan Pilihan

Dalam rangka penyelenggaraan 8 urusan pilihan dialokasikan anggaran sebesar Rp27.037.782.975,00, terrealisasi sebesar Rp24.846.487.725,00, tidak terserap sebesar Rp2.173.295.250,00. Adapun penyelenggaraan masing-masing urusan pilihan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pertanian

Pada tahun 2013 Urusan Pertanian di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 13 program terdiri 42 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp 10.528.983.000,00 terrealisasi sebesar Rp 10.067.251.585,00 tidak terserap Rp 461.731.415,00 rupiah dengan rincian sebagai berikut:

- 1.1. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan 5 program terdiri 26 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 7.414.943.000,00 terrealisasi sebesar Rp 7.055.455.935,00 tidak terserap Rp 359.487.065,00, disebabkan antara lain:
 - 1) Efisiensi Rp 127.971.390,00
 - 2) Sisa Lelang Rp 231.515.675,00
- 1.2. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan 5 program terdiri 16 kegiatan dengan alokasi dana

sebesar Rp 2.502.970.000,00 terrealisasi sebesar Rp 2.402.837.650,00 tidak terserap Rp 100.132.350,00 disebabkan efisiensi anggaran.

- 1.3. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan melaksanakan 3 program terdiri 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 611.070.000,00 terrealisasi sebesar Rp 608.958.000,00 tidak terserap Rp 2.112.000,00, disebabkan antara lain:

- 1) Efisiensi Rp 1.440.000,00
- 2) Sisa Lelang Rp 672.000,00

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pelatihan agribisnis;
- Meningkatnya kualitas manajemen koperasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
- Terselurnya bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprota) bagi petani korban bencana banjir/kekeringan;
- Terlaksananya promosi produk unggulan daerah;
- Tersedianya alat mesin pertanian;
- Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi bercocok tanam;
- Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kesuburan tanah;
- Tersedianya alat dan bahan obat pengendalian hama dan penyakit;
- Tersedianya dokumen data pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- Terlaksananya pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) / Jaringan Irigasi Desa (JIDES);
- Terlaksananya pembangunan sumur bor;
- Terlaksananya pembangunan rumah kaca;
- Tersedianya sarana dan prasarana perkebunan tembakau;
- Terjalannya Kerjasama antara Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan pelaku usaha;
- Tersusunnya Program Kerja Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten;

- Terbentuknya Posko Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) disetiap Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K);
- Terlaksananya Diklat peningkatan kapasitas penyuluh Swadaya;
- Terlaksananya pelatihan Vaksinasi Hewan Ternak bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) petani peternak;
- Meningkatnya kesehatan dan produktifitas ternak serta pencegahan penyakit menular;
- Terlaksananya pengawasan hewan kurban;
- Meningkatnya kemampuan petugas RPH dan pemakai jasa pelayanan RPH;
- Meningkatnya kinerja petugas inseminator;
- Terlaksananya pembibitan 60 ekor kambing;
- Terlaksananya pelatihan petani peternak dan pelaku agribisnis sebanyak 160 orang.

Adapun permasalahan pada Urusan Pertanian adalah:

- Kondisi cuaca tidak memungkinkan Petani untuk melaksanakan pembibitan tembakau

Solusi permasalahan pada Urusan Pertanian adalah:

- Petani mengusahakan bibit sendiri secara swadaya Perlu penambahan peserta pelatihan terutama untuk untuk wilayah yang populasi ternaknya besar.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pertanian tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Produksi Pertanian Padi yang ditargetkan 390.611 ton terrealisasi 376.535 ton;
- Produksi Pertanian Jagung yang ditargetkan 107.133 ton teralisasi sebesar 135.287 ton;
- Produksi Pertanian kedelai yang ditargetkan 3.395 ton terrealisasi sebesar 1.368 Ton;
- Produksi Pertanian Kacang tanah yang ditargetkan 5.040 ton terrealisasi sebesar 5.029 ton;

- Produksi Pertanian Kacang hijau yang ditargetkan 2.172 ton terrealisasi sebesar 2.792 ton;
- Produksi Pertanian Ubi kayu yang ditargetkan 27.882 ton terrealisasi sebesar 13.526 ton;
- Produksi Pertanian Ubi jalar yang ditargetkan 5.812 ton terrealisasi sebesar 3.193 Ton;
- Produksi Bawang merah yang ditargetkan 3.399 ton terrealisasi sebesar 35 ton;
- Produksi Sawi yang ditargetkan 600 ton terrealisasi sebesar 395 ton.
- Produksi Kacang panjang yang ditargetkan 513 ton terrealisasi sebesar 977 ton;
- Produksi Cabe yang ditargetkan 784 ton terrealisasi sebesar 8.100 ton.
- Produksi Tomat yang ditargetkan 364 ton terrealisasi sebesar 597 ton;
- Produksi Terong yang ditargetkan 8.941 ton terrealisasi sebesar 993 ton;
- Produksi Ketimun yang ditargetkan 793 ton terrealisasi sebesar 163 ton;
- Produksi Labu Siam yang ditargetkan 600 ton terrealisasi sebesar 222 ton;
- Produksi Kangkung yang ditargetkan 1.155 ton terrealisasi sebesar 1.219 ton;
- Produksi Bayam yang ditargetkan 617 ton terrealisasi sebesar 1.111 ton;
- Produksi Jambu biji yang ditargetkan 5.450 Kuintal terrealisasi sebesar 11.514 Kuintal;
- Produksi Jeruk yang ditargetkan 1.879 Kuintal terrealisasi sebesar 3.166 Kuintal;
- Produksi Mangga yang ditargetkan 321.396 Kuintal terrealisasi sebesar 530.578 Kuintal;
- Produksi Pepaya yang ditargetkan 8.671 Kuintal terrealisasi sebesar 8.484 Kuintal;

- Produksi Pisang yang ditargetkan 177.658 Kuintal terrealisasi sebesar 189.523 Kuintal;
- Produksi Belimbing yang ditargetkan 2.379 Kuintal terrealisasi sebesar 7.426 Kuintal;
- Produksi Sawo yang ditargetkan 1.136 Kuintal terrealisasi sebesar 1.855 Kuintal;
- Produksi Sirsak yang ditargetkan 971 Kuintal terrealisasi sebesar 297 Kuintal;
- Produksi Tembakau yang ditargetkan 11 ton terrealisasi sebesar 39 ton;
- Produksi Tebu yang ditargetkan 8.214 ton terrealisasi sebesar 133.393 ton;
- Produksi Hasil Perkebunan Kelapa yang ditargetkan 3.650 ton terrealisasi sebesar 14.753 ton;
- Produksi Hasil Perkebunan Kapuk Randu yang ditargetkan 54 ton terrealisasi sebesar 49,37 ton;
- Produksi Hasil Perkebunan Kunyit yang ditargetkan 930 ton terrealisasi sebesar 5.801,91 ton;
- Produksi Hasil Perkebunan Siwalan yang ditargetkan 935 ton terrealisasi sebesar 48,18 ton;
- Produksi Daging yang ditargetkan 12.012,10 ton realisasi sebesar 10.460,11 ton;
- Produksi Telur yang ditargetkan 2.664,10 ton ditahun realisasi sebesar 2.725,26 ton;
- Produksi Susu yang ditargetkan 407,07 ton realisasi sebesar 306,14 ton.
- Produksi ternak sapi potong yang ditargetkan 53.042 ekor realisasi sebesar 44.270 ekor;
- Populasi ternak sapi perah yang ditargetkan 1.034 ekor realisasi sebesar 433 ekor;

- Populasi ternak kerbau yang ditargetkan 244 ekor realisasi sebesar 198 ekor;
- Populasi ternak kambing yang ditargetkan 52.957 ekor realisasi sebesar 65.270 ekor;
- Populasi ternak domba yang ditargetkan 30.272 ekor realisasi sebesar 30.396 ekor;
- Populasi ternak kuda yang ditargetkan 282 ekor realisasi sebesar 236 ekor;
- Populasi ternak ayam buras yang ditargetkan 655.001 ekor realisasi sebesar 647.762 ekor;
- Populasi ternak ayam ras petelur yang ditargetkan 131.362 ekor realisasi sebesar 134.700 ekor;
- Populasi ternak ayam ras pedaging yang ditargetkan 2.258.192 ekor realisasi sebesar 2.603.500 ekor;
- Populasi ternak itik yang ditargetkan 25.760 ekor realisasi sebesar 28.120 ekor;
- Populasi ternak entok dan angsa yang ditargetkan 13.421 ekor realisasi sebesar 13.385 ekor.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Pertanian antara lain:

- Produksi Padi target tidak tercapai karena ada serangan hama;
- Petani kurang berminat menanam kedelai karena biaya lebih tinggi dan beralih ke tanaman kangkung biji, karena perawatan dan biaya produksi lebih ringan serta pemasaran hasil juga lebih mudah;
- Petani kurang berminat menanam ubi kayu dan ubi jalar;
- Petani tidak menanam bawang dialihkan menanam tanaman buah-buahan;
- Pada awal penanaman banyak tanaman papaya yang mati karena kekurangan air dan musin hujan yang tidak sesuai dengan cuaca yang diharapkan;

- Tanaman sirsak dan siwalan sudah banyak yang tua sehingga produksi menurun serta produksi tidak maksimal;
- Banyak peternak sapi potong yang beralih profesi menjadi petani murni dan pekerja pabrik.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Pertanian adalah:

- Juara I Lomba HIPPA BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur (HIPPA Sumber Rejeki Desa Mentaras Kec. Dukun);
- Juara Harapan I Tingkat Provinsi Jawa Timur Lomba HIPPA (HIPPA Sumber Rejeki Desa Mentaras Kec. Dukun).

2. Urusan Kehutanan

Pada tahun 2013 Urusan Kehutanan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 2 program terdiri 6 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp 739.500.000,00, terrealisasi sebesar Rp 703.899.750,00, tidak terserap Rp 35.600.250,00, disebabkan antara lain:

- | | |
|----------------|------------------|
| 1) Efisiensi | Rp 5.815.000,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp 29.785.250,00 |

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Tersedianya bibit tanaman reboisasi/ penghijauan yang ditanam
- Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan;
- Terlaksananya koordinasi rehabilitasi hutan dan lahan;
- Tersedianya bibit tanaman Sengon;
- Terlaksananya sosialisasi pembuatan hutan rakyat;
- Tersedianya 1 (satu) unit kebun/ posko bibit.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Kehutanan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ditargetkan sebesar 0,013% terrealisasi 0,013 %;

- Produksi hasil hutan Kayu Jati yang ditargetkan 600 m³ terrealisasi sebesar 966 m³;
- Produksi hasil hutan Non Kayu Jati yang ditargetkan 46 m³ terrealisasi sebesar 2.427 m³.

3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Pada tahun 2013 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan serta Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 7 program terdiri 10 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp1.998.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp1.943.780.930,00, tidak terserap Rp54.219.070,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1. Badan Penanaman Modal dan Perizinan melaksanakan 2 program terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp452.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp447.276.330,00, tidak terserap Rp4.723.670,00, disebabkan antara lain:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1) Efisiensi | Rp 2.116.170,00 |
| 2) Sisa Lelang | Rp 2.607.500,00 |

3.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 5 program terdiri 7 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp1.546.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp1.496.504.600,00, tidak terserap Rp49.495.400,00, disebabkan karena adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Penerbitan Izin Air Tanah sesuai dengan regulasi sebanyak 58 paket;
- Penerbitan Izin Usaha Pertambangan sesuai regulasi sebanyak 15 ijin;
- Tersusunnya Sistem Informasi Pengelolaan Data Pertambangan dan Regulasi Daerah sebanyak 2 paket;
- Pengendalian dan Pengawasan energi ketenagalistrikan agar tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan;

- Terlaksananya Sosialisasi hemat energi di Kabupaten Gresik tentang masalah krisis energi dan Konservasi BBM ke BBG sebanyak 160 peserta;
- Terlaksananya Pembinaan dan Pemahaman terhadap masyarakat pemanfaat dan pengguna energi tentang program hemat energi sebanyak 70 orang;
- Terlaksananya Sosialisasi Energi Baru Terbarukan, Konversi Energi dan Penghematan Energi sebanyak 260 orang;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Kelistrikan, Energi, Mineral dan MIGAS;
- Meningkatnya pemahaman masyarakat atas pentingnya pemanfaatan dan penghematan energi dengan memanfaatkan sumber energi lain;
- Tersedianya dokumen penelitian atas geologi teknik dan geologi tata lingkungan di Kabupaten Gresik.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Presentase ABT berijin yang membayar pajak, ditargetkan sebesar 72,91 % terrealisasi 62 %.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral antara lain:

- Kurangnya sosialisasi pembayaran pajak perijinan ABT dan masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak ABT dalam membayar Pajak.

4. Urusan Pariwisata

Pada tahun 2013 Urusan Pariwisata di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 3 program terdiri 16 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp2.247.113.800,00, terrealisasi sebesar Rp1.986.109.450,00, tidak terserap Rp261.004.350,00, disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap potensi wisata Gresik;
- Dikenalnya potensi unggulan dan obyek wisata dalam bidang pariwisata;
- Tercapainya pemilihan duta wisata yang berkualitas;
- Dikenalnya potensi Gresik khususnya dalam bidang pariwisata;
- Tercapainya pembekalan bagi duta wisata cak dan yuk Gresik;
- Meningkatnya kualitas kelompok sadar wisata yang terbaru sehingga dapat mengembangkan pariwisata di daerahnya;
- Bertambahnya fasilitas sarana wisata di kawasan obyek wisata;
- Terlaksananya pembangunan sarana prasarana pariwisata yang memadai di kawasan objek wisata;
- Tercetaknya buku potensi obyek wisata di Kabupaten Gresik;
- Meningkatkan pengetahuan manajemen bagi pelaku obyek dan pengusaha jasa;
- Terpantaunya secara langsung pelayanan jasa usaha kepariwisataan di Kabupaten Gresik;
- Terbangunnya kanopi Jl. Pahlawan;
- Dikenalnya potensi Gresik khususnya dalam bidang pariwisata;
- Dikenalnya pariwisata terbaru yang ada di kota Gresik yaitu Gresik Jaman Dulu;
- Meningkatnya pengetahuan bagi anak sekolah, masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Gresik;
- Meningkatnya jumlah kunjungan wisata yang sedang dipromosikan;

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Pariwisata tahun 2013 adalah Jumlah kunjungan wisata ditargetkan sebanyak 1.400.000 orang realisasi 3.714.635 orang.

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2013 Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program terdiri 33 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp 7.386.479.175,00 terrealisasi

sebesar Rp 6.386.782.500,00 tidak terserap Rp 999.696.675,00, disebabkan antara lain:

1) Efisiensi	Rp	15.452.100,00
2) Sisa Lelang	Rp	339.441.575,00
3) Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan	Rp	644.803.000,00

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya sosialisasi potensi sumberdaya laut
- Terbangunnya jalan produksi bagi pembudidaya ikan/udang
- Terpenuhinya suplai air bagi pembudidaya;
- Terlaksananya Program Sehat Pembudidaya Ikan
- Terpenuhinya sarana pemasaran ikan;
- Terlaksananya rehabilitasi TPI;
- Terlaksananya pembangunan pemecah gelombang;
- Terlaksananya pengadaan jaring millennium;
- Terlaksananya pembangunan tambatan perahu;
- Terlaksananya pembangunan balai pertemuan nelayan;
- Tersedianya data potensi kelautan dan perikanan di kecamatan;
- Terlaksananya kegiatan penunjang PUMP-P2HP
- Terlaksananya Pengadaan cool box;
- Terlaksananya pembuatan bak treatment air laut;
- Terlaksananya instalasi pengambilan air laut.

Adapun permasalahan pada Urusan Kelautan dan Perikanan adalah:

- Lambatnya proses kerjasama pembangunan pasar ikan sehingga tidak cukup waktu penyelesaian;
- Penyelesaian pekerjaan Rehabilitasi Saluran Tambak di Kec. Sidayu dan Rehabilitasi Prasarana Perikanan melebihi waktu kontrak.
- Terjadi force majeure bencana non alam pada Pengadaan Sarana Pengawasan.

Solusi permasalahan pada Urusan Kelautan dan Perikanan adalah:

- Pembangunan pasar ikan direncanakan akan dianggarkan pada PAPBD TA. 2014 dan perlunya percepatan kerjasama;
- Pekerjaan yang diselesaikan melebihi waktu kontrak dikenakan denda sesuai dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- Pengadaan sarana pengawasan dianggarkan kembali pada DPA-L TA. 2014.

Capaian indikator sasaran meningkatnya produksi dan produktifitas perikanan di Urusan Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut:

- Produksi Perikanan budidaya udang windu yang ditargetkan 1.765,00 ton realisasi sebesar 4.005,80 ton;
- Produksi Perikanan budidaya udang vannamee yang ditargetkan 3.970,00 ton realisasi sebesar 7.160,62 ton;
- Produksi Perikanan budidaya bandeng yang ditargetkan 32.370,00 ton realisasi sebesar 68.811,44 ton;
- Produksi Perikanan budidaya kerapu yang ditargetkan 10,40 ton realisasi sebesar 50 ton;
- Produksi Perikanan budidaya nila yang ditargetkan 1.080,00 ton ditahun realisasi sebesar 3.424,59 ton;
- Produksi Perikanan budidaya penangkapan yang ditargetkan 17.200,00 ton sedangkan realisasi sebesar 18.380,99 ton;
- Produksi Perikanan budidaya perairan umum yang ditargetkan 600,00 ton realisasi sebesar 862,27 ton;
- Produksi tambak payau yang ditargetkan 96,11 ton/Ha realisasi sebesar 276,29 ton/Ha;
- Produksi tambak tawar yang ditargetkan 111,07 ton/Ha realisasi sebesar 348,96 ton/Ha.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Kelautan dan Perikanan adalah:

- Juara III Kontes dan Expo ternak kategori Bakalan Kreman Tingkat Jawa Timur;
- Juara I Lomba Kinerja Pelayanan Laboratorium kesehatan ikan dan ternak tingkat Provinsi Jawa Timur;

- Juara I Nelayan teladan Tingkat Provinsi Jawa Timur;

6. Urusan Perdagangan

Pada tahun 2013 Urusan Perdagangan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan dan Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 4 program terdiri 8 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp3.040.890.000,00 terrealisasi sebesar Rp2.682.071.510,00 tidak terserap Rp358.818.490,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 6.1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 3 program terdiri 6 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp2.878.890.000,00 terrealisasi sebesar Rp2.529.297.410,00 tidak terserap Rp349.592.590,00 disebabkan efisiensi anggaran.
- 6.2. Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program terdiri 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp162.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp152.774.100,00 tidak terserap Rp9.225.900,00, disebabkan efisiensi anggaran.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya pengawasan barang yang memenuhi standart mutu;
- Terlindunginya Hak Konsumen pada 8 komoditi;
- Terlaksananya kegiatan pengawasan barang kena cukai illegal;
- Terwujudnya Pelatihan Eksport;
- Terpeliharanya sarana prasarana pasar pada 7 UPTD (Pasar Kabupaten);
- Terpeliharanya sarana & prasarana pasar pada 1 UPTD Pasar.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perdagangan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan penerbitan SIUP yang ditargetkan 11% realisasi sebesar 12%;
- Pertumbuhan penerbitan TDP yang ditargetkan sebanyak 10,2% realisasi 29,58%;

- Pertumbuhan penerbitan TDG yang ditargetkan 16,2% realisasi sebesar 4,25 %;
- Pertumbuhan nilai investasi perdagangan yang ditargetkan 1,5% realisasi sebesar 429 %;
- Jumlah Pameran/Ekspo per tahun yang ditargetkan 3 event realisasi sebesar 30 event.

Adapun penyebab tidak tercapainya target capaian indikator RPJM Urusan Perdagangan antara lain:

- Permintaan penerbitan TDG dari masyarakat maupun kalangan usaha menurun;
- Masa berlaku TDG yang telah diterbitkan masih banyak yang masih belum habis masa berlakunya;
- Pembangunan gudang-gudang yang baru masih banyak dalam proses pengerjaan sehingga belum didaftarkan;
- Minimnya sosialisasi sehingga mengakibatkan kurangnya pelaku usaha untuk yang mengajukan TDG.

Prestasi yang diperoleh pada Urusan Perdagangan adalah:

- Penghargaan Dekranas Award Tingkat Nasional Kategori Tekstil;
- Penghargaan Pembina Teladan Tingkat Nasional Kategori Pembina Teladan Diraih Oleh Ketua Dekranasda Kab.Gresik;
- Penghargaan Pembina UKM Tingkat Nasional.

7. Urusan Industri

Pada tahun 2013 Urusan Perindustrian di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 3 program terdiri 9 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp 1.071.817.000,00 terrealisasi sebesar Rp 1.069.592.000,00, tidak terserap Rp 2.225.000,00 disebabkan adanya efisiensi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya Pelatihan Industri Kecil Menengah (IKM) Batik;

- Terlaksananya Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM);
- Terlaksananya pelatihan & fasilitasi industri kecil dengan swasta;
- Tersedianya data base sentra Industri Kecil Menengah (IKM);
- Terlaksananya Pelatihan Standart Mutu Barang (SNI);
- Pelaksanaan sosialisasi kelengkapan legalitas Industri Kecil Menengah (IKM);
- Terlaksananya verifikasi proses produksi Industri Kecil Menengah (IKM);
- Terselenggaranya kegiatan pelatihan peningkatan mutu produk IKM.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Perindustrian tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan jumlah industri yang ditargetkan 2 % realisasi sebesar 4 %.
- Pertumbuhan jumlah nilai produksi yang ditargetkan 3 % realisasi sebesar 3 %.

8. Urusan Transmigrasi

Pada tahun 2013 Urusan Transmigrasi di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 1 program terdiri 1 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp25.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp25.000.000,00.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain:

- Terlaksananya penyampaian informasi tentang program transmigrasi dan timbulnya minat keluarga pra sejahtera menjadi transmigran.

Capaian Indikator Kinerja RPJM Urusan Transmigrasi tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Pembinaan calon transmigran ditargetkan 25 orang realisasi sebesar 100 orang.

D. Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pada tahun 2013 dialokasikan anggaran untuk belanja Hibah sebesar Rp114.180.116.000,00 terrealisasi sebesar Rp107.818.513.200,00, tidak terserap Rp6.361.602.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta sebesar Rp29.472.500.000,00 terrealisasi sebesar Rp25.501.700.000,00 tidak terserap sebesar Rp3.970.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk bantuan Persatuan Gereja Gresik, Persatuan Pura Gresik, PAKEM, Lembaga Pengembangan Pendidikan Ponpes LDII, Muslimat NU Gresik, Muslimat NU Bawean, Aisiyah Muhamadiyah Gresik, MWC. NU Balongpanggang, MWC. NU Bungah, MWC. NU Driyorejo, PC. NU Driyorejo, PC. NU Gresik, MWC NU Kedamean, Yayasan Wahidiyah, MWC. NU Panceng, MWC. NU Panceng Manyar dengan alokasi sebesar Rp885.000.000,00 terrealisasi Rp685.000.000,00 tidak terserap Rp200.000.000,00.;
2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk Pramuka dan KONI Gresik dengan alokasi sebesar Rp8.000.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp6.036.700.000,00 tidak terserap Rp1.963.300.000,00.
3. Dinas Kesehatan untuk Komisi Penanggulangan Aids dan PMI dengan alokasi sebesar Rp1.150.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp150.000.000,00 tidak terserap Rp1.000.000.000,00.
4. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk Koperasi Wanita dan DEKOPINDA dengan alokasi sebesar Rp740.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp715.000.000,00 tidak terserap Rp25.000.000,00.
5. Dinas Pendidikan untuk SMA sederajat, SMP sederajat, SD sederajat, SLB, KB/PG/TPQ/PAUD/TPA/MADIN/RA/TK, Ponpes dengan alokasi sebesar Rp18.697.500.000,00 terrealisasi sebesar Rp17.915.000.000,00 tidak terserap Rp782.500.000,00.

- b. Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat sebesar Rp9.675.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp8.347.500.000,00 tidak terserap Rp1.327.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan untuk Kelompok Peternak KPGM dan Kelompok Peternak dengan alokasi sebesar Rp1.145.000.000,00 terrealisasi Rp975.000.000,00 tidak terserap Rp170.000.000,00;
 2. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan untuk Bantuan Kelompok Tani Gemah Ripah, Paku Pari dengan alokasi sebesar Rp20.000.000,00 terrealisasi Rp0,00 tidak terserap Rp20.000.000,00;
 3. Dinas Koperasi, UKM dan Perindag untuk IKM Jahiriyah Bakery (Roti), UKM Gading Sr. Pengrajin Rotan RT. 06 / RW. 02, UKM Sinar Utama dengan alokasi sebesar Rp130.000.000,00 terrealisasi Rp130.000.000,00;
 4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk Masjid, Musholah dan tempat ibadah lainnya dengan alokasi sebesar Rp8.380.000.000,00 terrealisasi Rp7.242.500.000,00 tidak terserap 1.137.500.000,00.
- c. Belanja Hibah Dana BOS Daerah sebesar Rp60.005.616.000,00 terrealisasi sebesar Rp58.982.813.200,00 tidak terserap Rp1.022.802.800,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan (BOS SD, SMP Sederajat, BOS SMA/SMK/MA/SMALB, BOS Paket A, B, C dan Ujian, BOP TPA/TPQ/MADIN, BOP PAUD/TK/RA dan BOP Pondok Pesantren) dengan alokasi sebesar Rp60.005.616.000,00 terrealisasi Rp58.982.813.200,00 tidak terserap Rp.1.022.802.800,00.
- d. Belanja Hibah Dana BOS Provinsi sebesar Rp15.027.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp14.986.500.000,00 tidak terserap Rp40.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. BPDGS (Santri Madin Ula dan Pengasuh/Ustadz Madin Ula, Santri/WB/Siswa Madin Wustho dan Pengasuh/Ustad Madin Wustho, Santri/WB/Siswa Paket A, Santri/WB/Siswa Paket A Potren, Santri/WB/Siswa Paket B, Santri/WB/Siswa Paket B POntren, Guru Swasta MI, Guru Salawiyah ULA, Guru Swasta MTS, Guru Salawiyah Wustho, Guru Swasta SD, Guru Swasta SDLB, Guru Swasta SMP, Guru Swasta satu atap dan Penyesuaian penpatan BK Provinsi) dengan alokasi sebesar Rp13.545.000.000,00 terrealisasi Rp13.504.500.000,00 tidak terserap Rp.40.500.000,00.
2. BOS SLTA (Dana Povinsi) dengan alokasi sebesar Rp1.482.000.000,00 terrealisasi Rp1.482.000.000,00;

Sedangkan untuk Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp19.373.885.000,00, terrealisasi sebesar Rp16.870.050.000,00, tidak terserap Rp2.503.835.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat terdiri dari:
 - Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk bantuan Pendamping PNPM Pedesaan dengan alokasi sebesar Rp1.682.500.000,00, terrealisasi sebesar Rp1.682.500.000,00;
 - Dinas Pekerjaan Umum Daerah untuk bantuan Pendamping PNPM Perkotaan dengan alokasi sebesar Rp511.250.000,00, terrealisasi sebesar Rp511.250.000,00.
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakatan terdiri dari:
 1. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu / Keluarga yang direncanakan dengan alokasi sebesar Rp9.355.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp8.308.800.000,00 tidak terserap Rp1.046.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk Bantuan Santunan janda miskin dan Yatim Piatu dengan alokasi sebesar Rp3.580.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp3.493.800.000,00 tidak terserap Rp86.200.000,00.
 - Dinas Pekerjaan Umum untuk bantuan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin dengan alokasi sebesar Rp5.175.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp4.815.000.000,00 tidak terserap Rp360.000.000,00.
 - Dinas Pendidikan untuk bantuan Kuliah SIswa Miskin Berprestasi sebanyak 40 orang selama 12 bulan dengan alokasi sebesar Rp600.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp0,00 tidak terserap Rp600.000.000,00.
2. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu / Keluarga yang tidak direncanakan dengan alokasi sebesar Rp7.805.135.000,00, terrealisasi sebesar Rp6.367.500.000,00 tidak terserap Rp1.437.635.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk Bantuan Santunan Kematian dan santunan sosial yang tidak direncanakan dengan alokasi sebesar Rp7.280.135.000,00 terrealisasi sebesar Rp5.917.500.000,00 tidak terserap Rp1.362.635.000,00.
 - Dinas Pendidikan untuk bantuan kuliah yang tidak direncanakan dengan alokasi sebesar Rp525.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp450.000.000,00 tidak terserap Rp75.000.000,00.
3. Belanja Bantuan Sosial Kepada Pihak Ketiga untuk Dinas Pendidikan dalam rangka membantu Panti Asuhan Darul Aitam dengan alokasi sebesar Rp20.000.000,00, terrealisasi sebesar Rp0,00 tidak terserap Rp20.000.000,00.

E. Pelaksanaan Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan kepada Desa dialokasikan sebesar Rp168.849.832.490,00 terrealisasi sebesar Rp159.238.772.500,00 tidak terserap Rp9.611.059.990,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik digunakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD), Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Tunjangan Kades, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Sekdes Non PNS), Bantuan Purna Tugas Kades dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Kompensasi Pemberhentian Sekdes Non PNS, Bantuan Pilkades dialokasikan dana sebesar Rp78.715.130.000,00 terrealisasi sebesar Rp70.208.097.500,00 tidak terserap Rp8.507.032.500,00.
2. Kantor Pemberdayaan Masyarakat untuk Sarana dan Prasarana Balai Desa/Dusun, Pasar Desa, Tunjangan RT/RW dan Gapura Desa dialokasikan sebesar Rp10.885.675.000,00 terrealisasi sebesar Rp10.885.675.000,00.
3. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik untuk Bantuan Jalan Poros Desa (JPD) dan Jalan Lingkungan, Bantuan Infrastruktur Kelurahan, Bantuan SDB yang diarahkan dan Bantuan Pembangunan Infrastruktur yang bersifat isidentil dengan alokasi sebesar Rp77.029.027.490,00 terrealisasi sebesar Rp75.925.000.000,00 tidak terserap Rp1.104.027.490,00.
4. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan untuk Jalan Usaha Tani dengan alokasi sebesar Rp2.170.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp2.170.000.000,00.
5. Dinas Perhubungan untuk pembelian perahu dengan alokasi sebesar Rp50.000.000,00 terrealisasi sebesar Rp50.000.000,00.

F. Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik

Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik pada tahun 2013 pada Kantor Kesbang Pol Linmas untuk Belanja Bantuan Partai Politik Hati Nurani Rakyat, Partai Politik Gerakan Indonesia Raya, Partai Politik Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Politik Amanat Nasional, Partai Politik Kebangkitan Bangsa, Partai Politik Golongan Karya, Partai Politik Persatuan Pembangunan, Partai

Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Politik Demokrat, Partai Politik Kebangkitan Nasional Ulama dan Partai Politik Buruh dialokasikan dana sebesar Rp782.061.300,00 terrealisasi Rp782.061.300,00 .

G. Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga pada tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp3.000.000.000,00 terrealisasi Rp761.601.000,00 tidak terserap Rp2.238.399.000,00.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sehingga tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah akan lebih efisien dan efektif.

Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Gresik menerima tugas pembantuan dari Pemerintah sebanyak 6 (enam) urusan pemerintahan sebagai berikut:

1. Urusan pemberdayaan masyarakat;
2. Urusan tenaga kerja;
3. Urusan pertanian;
4. Urusan kelautan dan perikanan;
5. Urusan Kesehatan;
6. Urusan Pekerjaan Umum.

I. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

1. Dasar Hukum
DIPA Nomor : DIPA-010.05.5.059456/2013.
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

1. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

1.1. Kegiatan : Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)

Lokasi	: 13 Kecamatan
Realisasi Fisik	: 100 %
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Jumlah Dana
- Target	: Rp. 34.197.984.000,00
- Realisasi	: Rp. 34.155.809.000,00 (99,88 %)
Keluaran	: Adanya peningkatan kapasitas perdesaan (SDM) dan sarana prasarana perdesaan
- Target	: 13 Kecamatan
- Realisasi	: 13 Kecamatan
Hasil	: Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis serta meningkatnya sarana prasarana perdesaan
- Target	: 100 %
- Realisasi	: 99,99 %

II. URUSAN TENAGA KERJA

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

1. Dasar Hukum :

DIPA NO.026.04.4.059454/2013 TGL 5 DESEMBER 2012

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan :

Ditjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan :
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja.

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaanya

1.1 Kegiatan : Administrasi Kegiatan

Lokasi : Kabupaten Gresik
Realisasi Fisik : 100%
Tolok Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana
- Target : 62.508.000,00
- Realisasi : 61.752.300,00 (98,79%)
Keluaran : Kelancaran Administrasi Kegiatan
- Target : 1 Tahun
- Realisasi : 1 Tahun
Hasil : Terselenggaranya Administrasi Kegiatan dengan Lancar
- Target : 100%
- Realisasi : 100%

1.2 Kegiatan : Padat Karya Infrastruktur I

Lokasi : Ds. Glatik Kec. Ujungpangkah
Realisasi Fisik : 100%
Tolok Ukur Kinerja
Masukan : Jumlah Dana
- Target : 252.650.000,00
- Realisasi : 252.636.325,00 (99,99%)
Keluaran : Pemberdayaan Penganggur
- Target : Penyerapan Tenaga Kerja 88 Orang/Paket
- Realisasi : Penyerapan Tenaga Kerja 88 Orang/Paket (100%)
Hasil : Perbaikan Jalan Desa/Lingkungan (paving)

- Target : Perbaikan Jalan Desa 125 m
- Realisasi : Perbaikan Jalan Desa 125 m

1.3 Kegiatan : Padat Karya Infrastruktur II

- Lokasi : Ds. Tebuwung Kec. Dukun
- Realisasi Fisik : 100%
- Tolok Ukur Kinerja
- Masukan : Jumlah Dana
- Target : 252.650.000,00
- Realisasi : 252.648.316,00 (99,99%)
- Keluaran : Pemberdayaan Penganggur
- Target : Penyerapan Tenaga Kerja 88 Orang/Paket
- Realisasi : Penyerapan Tenaga Kerja 88 Orang/Paket (100%)
- Hasil : Perbaikan Jalan Desa/Lingkungan (paving)
- Target : Perbaikan Jalan Desa 125 m
- Realisasi : Perbaikan Jalan Desa 125 m

1.4 Kegiatan : Padat Karya Infrastruktur III

- Lokasi : Ds. Ngasin Kec. Balongpanggang
- Realisasi Fisik : 100%
- Tolok Ukur Kinerja
- Masukan : Jumlah Dana
- Target : 252.650.000,00
- Realisasi : 252.642.266,00 (99,99%)
- Keluaran : Pemberdayaan Penganggur
- Target : Penyerapan Tenaga Kerja 88 Orang/Paket
- Realisasi : Penyerapan Tenaga Kerja 88 Orang/Paket (100%)

Hasil	:	Perbaikan Jalan Desa/Lingkungan (paving)
- Target	:	Perbaikan Jalan Desa 125 m
- Realisasi	:	Perbaikan Jalan Desa 125 m

1.5 Kegiatan : Padat Karya Infrastruktur IV

Lokasi	:	Ds. Wotan Kec. Panceng
Realisasi Fisik	:	100%
Tolok Ukur Kinerja		
Masukan	:	Jumlah Dana
- Target	:	252.650.000,00
- Realisasi	:	252.581.029,00 (99,99%)
Keluaran	:	Pemberdayaan Penganggur
- Target	:	Penyerapan Tenaga Kerja 88 Orang/Paket
- Realisasi	:	Penyerapan Tenaga Kerja 88 Orang/Paket (100%)
Hasil	:	Perbaikan Jalan Desa/Lingkungan (paving)
- Target	:	Perbaikan Jalan Desa 125 m
- Realisasi	:	Perbaikan Jalan Desa 125 m

1.6 Kegiatan : Padat Karya Infrastruktur V

Lokasi	:	Ds. Sambipondok Kec.Sidayu
Realisasi Fisik	:	100%
Tolok Ukur Kinerja		
Masukan	:	Jumlah Dana
- Target	:	252.650.000,00
- Realisasi	:	252.609.153,00 (99,99%)
Keluaran	:	Pemberdayaan Penganggur
- Target	:	Penyerapan Tenaga Kerja 88 Orang/Paket
- Realisasi	:	Penyerapan Tenaga Kerja 88 Orang/Paket (100%)

Hasil	:	Perbaikan Jalan Desa/Lingkungan (paving)
- Target	:	Perbaikan Jalan Desa 125 m
- Realisasi	:	Perbaikan Jalan Desa 125 m

1.7 Kegiatan : Padat Karya Infrastruktur VI

Lokasi	:	Ds. Munggugianti Kec. Benjeng
Realisasi Fisik	:	100%
Tolok Ukur Kinerja		
Masukan	:	Jumlah Dana
- Target	:	252.650.000,00
- Realisasi	:	252.644.134,00 (99,99%)
Keluaran	:	Pemberdayaan Penganggur
- Target	:	Penyerapan Tenaga Kerja 88 Orang/Paket
- Realisasi	:	Penyerapan Tenaga Kerja 88 Orang/Paket (100%)
Hasil	:	Perbaikan Jalan Desa/Lingkungan (paving)
- Target	:	Perbaikan Jalan Desa 125 m
- Realisasi	:	Perbaikan Jalan Desa 125 m

5. Sumber Dan Jumlah Anggaran

- APBN	:	Rp. 1.578.408.000,00
- APBD	:	Rp. -
Jumlah	:	Rp. 1.578.408.000,00

III. URUSAN PERTANIAN

1. Dasar Hukum :
DIPA No. DIPA-018.03.4.059115/2013
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan :
Kementrian Pertanian Republik Indonesia Direktorat Jendral Tanaman Pangan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan :
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gresik

4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

1. Program Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

1.1. Kegiatan : Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

Lokasi : 1 Kecamatan

Realisasi Fisik : 24 %

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah dana

- Target : Rp. 236.950.000,00

- Realisasi : Rp. 76.800.000,00 (32,41 %)

Keluaran : SLPTT Kawasan Pengembangan Kedelai

- Target : SLPTT : 500 hektar / 1 laporan

- Realisasi : SLPTT : 120 hektar / 1 laporan

Hasil : Tercapainya Kawasan Pengembangan SLPTT Kedelai seluas 120 Ha.

- Target : 100 %

- Realisasi : 28,21 %

Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan :
 - Minat petani/kelompok tani untuk tanam kedelai sedikit, sehingga pelaksanaan SLPTT Kedelai Kawasan Pengembangan belum bisa mencapai target pertanaman.
 - Ketidakjelasan program benih bersubsidi dan petani mengharapkan benih dari benih bersubsidi, sementara pelaksanaan sudah men dekati waktu tanam

- Solusi :
 - Sosialisasi hasil SLPTT 2013 kepada kelompok tani lain. Perlu dike tahui bahwa hasil panen SLPTT kedelai di Kecamatan Bungah (lokasi SLPTT Kedelai) meningkat dari 1,2 ton/Ha menjadi 2,062 ton/Ha. Dan juga peningkatan pendampingan dan pembinaan petugas teknis di kecamatan.
 - Koordinasi lebih intensif ke pusat maupun Provinsi mengenai program bantuan benih baik yang bersubsidi maupun yang tidak bersubsidi.

1.2. Kegiatan : Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal

- Lokasi : 7 Kecamatan
- Realisasi Fisik : 100 %
- Tolok Ukur Kinerja
 - Masukan : Jumlah dana
 - Target : Rp. 2.794.720.000,00
 - Realisasi : Rp. 2.754.675.590,00 (98,57 %)
 - Keluaran : SLPTT padi sawah dan padi lahan kering kawasan kawasan pemantapan
 - Target : SLPTT : 12.200 hektar / 3 laporan
 - Realisasi : SLPTT : 12.200 hektar / 3 laporan
 - Hasil : Tercapainya SLPTT pada kawasan pengembangan dan pemantapan seluas 11.200 Ha
 - Target : 100 %
 - Realisasi : 99,28 %

1.3. Kegiatan : Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Fisik : 100 %

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah dana

- Target : Rp. 64.955.000,00

- Realisasi : Rp. 44.830.000,00 (69,02 %)

Keluaran : Sosialisasi subsidi benih

- Target : Laporan kegiatan perbenihan / 1 laporan

- Realisasi : Laporan kegiatan perbenihan / 1 laporan

Hasil : Terlaksananya sosialisasi subsidi benih di 15 Kecamatan di wilayah Kabupaten Gresik.

- Target : 100 %

- Realisasi : 84,51 %

1.4. Kegiatan : Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan

Lokasi : 2 kecamatan

Realisasi Fisik : 100 %

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah dana

- Target : Rp. 415.000.000,00

- Realisasi : Rp. 20.250.000,00 (4,88 %)

Keluaran : CPCL/Kelompok penerima sasaran pasca panen

- Target : - Laporan keg. penanganan pasca panen tan. Pangan / 1 laporan

- Bantuan sarana pasca panen tanaman pangan / 2 Kelompok

- Realisasi : - Laporan keg. penanganan pasca panen tan. Pangan / 1 laporan
- Bantuan sarana pasca panen tanaman pangan / - Kelompok
- Hasil : Terlaksananya CPCL kelompok tani penerima alat pasca panen
- Target : 100 %
- Realisasi : 52,44 %

Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan : - Lelang pengadaan barang (bekerjasama dengan ULP Kabupaten) sudah dilaksanakan/diulang sampai 3 kali sampai menjelang dead line penyerapan anggaran masih ada ketidaksesuaian spesifikasi / persyaratan calon pihak ketiga (rekanan)
- Solusi : - Untuk kegiatan mendatang, dilaksanakan evaluasi ulang jadwal pelaksanaan (CPCL sampai dengan realisasi bantuan) lebih awal

1.5. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Tekniks Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

- Lokasi : Kabupaten Gresik
- Realisasi Fisik : 100 %
- Tolok Ukur Kinerja
- Masukan : Jumlah dana
- Target : Rp. 105.507.000,00
- Realisasi : Rp. 93.912.690,00 (89.01 %)

Keluaran	:	Rencana kegiatan tahun 2013 dan laporan keuangan
- Target	:	- Rancangan program, keg. dan rencana kerja tan. Pangan / 1 rancangan - Administrasi pelaksanaan keg. Manajemen tan. Pangan / 12 bulan - Laporan pelaksanaan manajemen tanaman pangan / 3 laporan - Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi / 1 unit
- Realisasi	:	- Rancangan program, keg. dan rencana kerja tan. Pangan / 1 rancangan - Administrasi pelaksanaan keg. Manajemen tan. Pangan / 12 bulan - Laporan pelaksanaan manajemen tanaman pangan / 3 laporan - Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi / 1 unit
Hasil	:	Terlaksananya rancangan program dan kegiatan serta laporan keuangan yang tertib
- Target	:	100 %
- Realisasi	:	94,51 %

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN	:	Rp. 3.643.032.000,00
- APBD	:	Rp. 0,00
Jumlah	:	Rp. 3.643.032.000,00

IV. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Dasar Hukum :
 - a. DIPA-032.04.4.059116/2013, Tgl. 5 Desember 2012 (Program 1)
 - b. DIPA-032.06.4.059040/2013, Tgl. 5 Desember 2012 (Program 2)
 - c. DIPA-032.07.4.059041/2013, Tgl. 5 Desember 2012 (Program 3)
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Kementerian Kelautan dan Perikanan; diantaranya :
 - a. Ditjen Perikanan Budidaya (Program 1)
 - b. Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Program 2)
 - c. Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) (Program 3)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan : Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik
4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

1. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

1.1. Kegiatan : Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

Lokasi	: Kab. Gresik
Realisasi Fisik	: 100%
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Jumlah Dana
- Target	: Rp. 271.650.000,00
- Realisasi	: Rp. 260.180.000,00
Keluaran	: Jenis penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan
- Target	: 15 jenis
- Realisasi	: 15 jenis
Hasil	: Meningkatnya produksi perikanan budidaya
- Target	: 100%
- Realisasi	: 100%

Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN	: Rp. 271.650.000,00
- APBD	: Rp. -
Jumlah	: Rp. 271.650.000,00

1.2. Kegiatan : Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan

Lokasi	: Kab. Gresik
Realisasi Fisik	: 100%
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Jumlah Dana
- Target	: Rp. 5.800.000,00
- Realisasi	: Rp. 5.800.000,00
Keluaran	: Jumlah benih dengan mutu terjamin
- Target	: 128 juta benih
- Realisasi	: 128 juta benih
Hasil	: Meningkatnya produksi perikanan budidaya
- Target	: 100%
- Realisasi	: 100%

Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN	: Rp. 5.800.000,00
- APBD	: Rp. -
Jumlah	: Rp. 5.800.000,00

1.3. Kegiatan : Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan

Lokasi	: Desa Raci Tengah dan Purwodadi, Kecamatan Sidayu
Realisasi Fisik	: 100%
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Jumlah Dana

- Target : Rp. 475.800.000,00
- Realisasi : Rp. 439.700.000,00
- Keluaran :
 - Jumlah kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai
 - Jumlah kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya
- Target :
 - 1 kawasan
 - 1 kab/kota
- Realisasi :
 - 1 kawasan
 - 1 kab/kota
- Hasil : Meningkatnya produksi perikanan budidaya
- Target :
 - 1 kawasan
 - 1 kab/kota
- Realisasi :
 - 1 kawasan
 - 1 kab/kota

Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN : Rp. 475.800.000,00
- APBD : Rp. -
- Jumlah : Rp. 475.800.000,00

1.4. Kegiatan : Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan

- Lokasi : Kab. Gresik
- Realisasi Fisik : 100%
- Tolok Ukur Kinerja
- Masukan : Jumlah Dana
- Target : Rp. 74.460.000,00
- Realisasi : Rp. 73.864.500,00

Keluaran	:	Jumlah pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya
- Target	:	1 kelompok
- Realisasi	:	1 kelompok
Hasil	:	Meningkatnya produksi perikanan budidaya
- Target	:	1 kelompok
- Realisasi	:	1 kelompok
Sumber dan Jumlah Anggaran		
- APBN	:	Rp. 74.460.000,00
- APBD	:	Rp. -
Jumlah	:	Rp. 74.460.000,00

1.5. Kegiatan : Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan

Lokasi	:	Kab. Gresik
Realisasi Fisik	:	100%
Tolok Ukur Kinerja		
Masukan	:	Jumlah Dana
- Target	:	Rp. 71.450.000,00
- Realisasi	:	Rp. 70.950.000,00
Keluaran	:	- Jumlah pemberdayaan kelompok pembudidaya melalui pengembangan usaha mina pedesaan
		- Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan
- Target	:	- 15 kelompok
		- 10 kelompok
- Realisasi	:	- 15 kelompok
		- 10 kelompok

Hasil : Meningkatnya produksi perikanan budidaya

- Target : - 15 kelompok
- 10 kelompok

- Realisasi : - 15 kelompok
- 10 kelompok

Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN : Rp. 71.450.000,00

- APBD : Rp. -

Jumlah : Rp. 71.450.000,00

1.6. Kegiatan : Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya

Lokasi : Kab. Gresik

Realisasi Fisik : 99,80%

Tolok Ukur Kinerja

Masukan : Jumlah Dana

- Target : Rp. 100.840.000,00

- Realisasi : Rp. 97.470.300,00

Keluaran : - Pengelolaan satker
- Pengelolaan keuangan, aset milik negara (SAI, SABMN, PNBPN) dan administrasi persuratan

- Target : - 12 bulan
- 1 dokumen

- Realisasi : - 12 bulan
- 1 dokumen

Hasil : Meningkatnya produksi perikanan budidaya

- Target : - 12 bulan
- Realisasi : - 1 dokumen

Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN : Rp. 100.840.000,00
- APBD : Rp. -
- Jumlah : Rp. 100.840.000,00

2. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

2.1. Kegiatan : Fasilitas Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan

- Lokasi : Kab. Gresik
- Realisasi Fisik : 100%
- Tolok Ukur Kinerja
- Masukan : Jumlah Dana
- Target : Rp. 2.221.460.000,00
- Realisasi : Rp. 2.214.309.000,00
- Keluaran : Lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan untuk usaha skala mikro, kecil dan menengah
- Target : 1 lokasi
- Realisasi : 1 lokasi
- Hasil : Meningkatnya produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional
- Target : 1 lokasi
- Realisasi : 1 lokasi

Sumber dan Jumlah Anggaran

- APBN : Rp. 2.221.460.000,00
- APBD : Rp. -
- Jumlah : Rp. 2.221.460.000,00

2.2. Kegiatan : Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP

Lokasi	: Kab. Gresik
Realisasi Fisik	: 100%
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Jumlah Dana
- Target	: Rp. 106.402.000,00
- Realisasi	: Rp. 89.815.000,00
Keluaran	: Dokumen perencanaan dan pelaporan
- Target	: 1 paket
- Realisasi	: 1 paket
Hasil	: Meningkatkan produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional
- Target	: 1 paket
- Realisasi	: 1 paket
Sumber dan Jumlah Anggaran	
- APBN	: Rp. 106.402.000,00
- APBD	: Rp. -
Jumlah	: Rp. 106.402.000,00

3. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

3.1. Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha

Lokasi	: Kab. Gresik
Realisasi Fisik	: 100%
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Jumlah Dana
- Target	: Rp. 728.200.000,00

- Realisasi	: Rp. 714.426.900,00
Keluaran	: Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kab/Kota mandiri
- Target	: 1 Kab/Kota
- Realisasi	: 1 Kab/Kota
Hasil	: Meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat
- Target	: 1 Kab/Kota
- Realisasi	: 1 Kab/Kota
Sumber dan Jumlah Anggaran	
- APBN	: Rp. 728.200.000.00
- APBD	: Rp. -
Jumlah	: Rp. 728.200.000,00

V. URUSAN KESEHATAN

1. Dasar Hukum : DIPA 024.03.4.059455/2013
2. Instansi pemberi tugas pembantuan : KEMENKES RI
3. Satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan : Dinas Kesehatan Kab. Gresik
4. Program dan Kegiatan Yang diterima dan Pelaksanaanya

1. Kegiatan : Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Lokasi	: Kabupaten dan 32 Puskesmas
Realisasi Fisik	: 100 %
Tolok Ukur Kinerja	
Masukan	: Jumlah Dana
- Target	: Rp. 2.758.800.000,00
- Realisasi	: Rp. 2.753.660.000,00 (99,81 %)

Keluaran	:	Terlaksanannya kegiatan operasional dan pelayanan kesehatan di Puskesmas
- Target	:	32 Puskesmas
- Realisasi	:	32 Puskesmas
Hasil	:	Peningkatan kegiatan operasional dan pelayanan kesehatan di Puskesmas
- Target	:	100 %
- Realisasi	:	100 %
Sumber dan Jumlah Anggaran		
- APBN	:	Rp. 2.758.800.000,00
- APBD	:	Rp. -
Jumlah	:	Rp. 2.758.800.000,00

VI. URUSAN PEKERJAAN UMUM

a. Dasar Hukum :

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 19 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2013

b. Instansi Pemberi Tugas :

- Kementerian Pekerjaan Umum, Ditjen Cipta Karya

c. Satua Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan :

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik

1. Kegiatan : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara

Lokasi	:	5 Kecamatan 103 Desa
Realisasi Fisik	:	100 %
Tolok Ukur Kinerja		
Masukan	:	Jumlah Dana

- Target : Rp. 11.463.750.000,00
- Realisasi : Rp. 11.463.750.000,00 (100 %)
- Keluaran : Keswadayaan masyarakat
- Target : Kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan social (P2KP/PNPM) 5 Kecamatan 103 Desa
- Realisasi : 5 Kecamatan 103 Desa
- Hasil : Meningkatnya Jumlah kabupaten/Kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah/Kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman serta jumlah – jumlah kawasannya
- Target : 100 %
- Realisasi : 100 %

2. Kegiatan : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman

- Lokasi : 12 Kecamatan 52 Desa
- Realisasi Fisik : 100 %
- Tolok Ukur Kinerja
- Masukan : Jumlah Dana
- Target : Rp. 13.000.000.000,00
- Realisasi : Rp. 13.000.000.000,00 (100 %)
- Keluaran : Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
- Target : Kelurahan/desa yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan social (PPIP) 12 Kecamatan 52 Desa
- Realisasi : 12 Kecamatan 52 Desa

Hasil	:	Meningkatnya Jumlah kabupaten/Kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah/Kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman serta jumlah – jumlah kawasannya
- Target	:	100 %
- Realisasi	:	100 %

3. Kegiatan : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Sanitasi Persampahan

Lokasi	:	5 Kecamatan 32 Desa
Realisasi Fisik	:	100 %
Tolok Ukur Kinerja		
Masukan	:	Jumlah Dana
- Target	:	Rp. 12.250.000.000,00
- Realisasi	:	Rp. 12.175.000.000,00
Keluaran	:	Infrastruktur Air Limbah
- Target	:	Jumlah Kelurahan/desa yang terlayani infrastruktur air limbah dengan system off site dan on site serta terlayani drainase perkotaan dan tempat pemrosesan akhir sampah
- Realisasi	:	5 Kecamatan 32 Desa
Hasil	:	Meningkatnya Jumlah kabupaten/Kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah/Kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman serta jumlah-jumlah kawasannya
- Target	:	100 %
- Realisasi	:	100 %

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Pada tahun 2013 penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Kebijakan

1.1. Kegiatan : Pengembangan Hortikultura dengan pola kemitraan inti plasma di Kabupaten Gresik

Daerah yang bekerjasama : **Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan PT. Galasari Gunungswadaya**

Dasar Hukum : Surat Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. Galasari Gunungswadaya
Nomor : 120.1/ 20 /012/2013
Nomor : 180/ 2 / U37.12/2013
Nomor : 042/ PG - DIR / II /2013

SKPD yang melaksanakan : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Pertanian, perkebunan, dan Kehutanan Kab. Gresik dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik, dan Dinas Pekerjaan Umum

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Output/Keluaran : Rehabilitasi jaringan irigasi, dan meningkatnya produksi, produktifitas, dan mutu tanaman buah

- outcome/Hasil : Pengembangan hortikultura dengan pola kemitraan inti plasma terintegrasi dalam program pengembangan kawasan industri berbasis inovasi

Jangka Waktu : 1 (satu) tahun

1.2. Kegiatan : Kerjasama Pemanfaatan Mata Air Umbulan dan Sekitarnya untuk Penyediaan Air Minum

Daerah yang bekerjasama : **Pemerintah Provinsi Jawa Timur**

Dasar Hukum : - Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Gresik
Nomor : 181.4/2058/013/2013
Nomor : 180/880/437.12/2013
tentang Kerjasama Pemanfaatan Mata Air Umbulan dan Sekitarnya untuk Penyediaan Air Minum

SKPD yang melaksanakan : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Output/Keluaran : mensinergikan pelaksanaan pemanfaatan mata air Umbulan dan sekitarnya sebagai bahan baku air minum.

- outcome/Hasil : pemenuhan kebutuhan air minum saat ini dan masa yang akan datang kepada masyarakat di Daerah penerima yaitu Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik

Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan

1.3. Kegiatan : Pemanfaatan Mata Air Umbulan dan Pendistribusian Air Minum Kepada Kabupaten Gresik

Daerah yang bekerjasama : **Pemerintah Provinsi Jawa Timur**

Dasar Hukum : - Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Gresik

Nomor : 181.4/2059/013/2013

Nomor : 180/881/437.12/2013

tentang Kerjasama Pemanfaatan Mata Air
Umbulan dan Sekitarnya untuk Penyediaan
Air Minum.

- SKPD yang melaksanakan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
- Output/Keluaran : Mensinergikan pemanfaatan mata air dan sekitarnya sebagai bahan baku air minum.
- outcome/Hasil : Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Air Baku untuk memenuhi kebutuhan Air Minum di wilayah Kabupaten Gresik
- Jangka Waktu : Berlaku sejak ditandatangani dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Masa Konsesi

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

1.1. Kegiatan : Pengelolaan Kas Umum Daerah

Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Gresik

Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Gresik

Nomor : 900/944/437.61/2013

Nomor : 051/376.A/PKS/BPD.GRS

Tentang Pengelolaan Kas Umum Daerah

SKPD yang melaksanakan : DPPKAD Kabupaten Gresik

Lokasi

: Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Output/Keluaran : Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Gresik pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Gresik dalam bentuk Deposito Berjangka
- outcome/Hasil : Pendapatan Asli Daerah
- Jangka Waktu : -

1.2. Kegiatan : Pembukaan Rekening Deposito Berjangka

- Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Nomor : 180/8809/437.61/2012
Nomor : 60/PKS/SDB.III/I/2012
Tentang Pembukaan Rekening Deposito Berjangka
- SKPD yang melaksanakan : DPPKAD Kabupaten Gresik
- Lokasi : Kabupaten Gresik
- Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
- Output/Keluaran : Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Gresik pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam bentuk Deposito Spesial Rate dengan Fasilitas Khusus
- outcome/Hasil : Pendapatan Asli Daerah
- Jangka Waktu : Sesuai jangka waktu deposito berjangka

1.3. Kegiatan : Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka

- Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Nomor : 180/879/437.61/2013
 Nomor : B.3213/KC/IX/OPS/07/
 Tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka

SKPD yang melaksanakan : DPPKAD Kabupaten Gresik

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Output/Keluaran : Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Gresik pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam bentuk Deposito Berjangka

- outcome/Hasil : Pendapatan Asli Daerah

Jangka Waktu : 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis serta dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa dibebani biaya

1.4. Kegiatan : Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka

Pihak Ketiga yang bekerjasama : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Gresik

Dasar Hukum : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Gresik
Nomor : 180/691/437.61/2013
 Nomor : 051/818/PKS/BPD.GRS
 Tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Deposito Berjangka

SKPD yang melaksanakan : DPPKAD Kabupaten Gresik

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi
Pelaksanaan
Kegiatan

- Output/Keluaran : Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Gresik pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Gresik dalam bentuk Deposito Berjangka
- outcome/Hasil : Pendapatan Asli Daerah
- Jangka Waktu : 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis serta dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa dibebani biaya

1.5. Kegiatan : Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013

- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Direktorat Jenderal Pemberdayaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Dasar Hukum : Naskah Perjanjian Kerjasama Urusan Bersama (NPUB) antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Kabupaten Gresik tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaan.
Nomor : 180/693/437.12/2013
Tanggal, 27 Mei 2013

SKPD yang melaksanakan : Badan Pemberdayaan Masyarakat

Lokasi : 13 kecamatan

Realisasi

Pelaksanaan

Kegiatan

- Output/Keluaran : Cakupan PNPM Mandiri Perdesaan (Adanya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Sarana Prasarana Perdeaan)

- Outcome/Hasil : Meningkatkan keberdayaan Masyarakat dan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Memfasilitasi Proses Pengelolaan Pembangunan yang Partisipatif dan Demokratis.
- Jangka Waktu : 1 (satu) tahun

1.6. Kegiatan : Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan

- Pihak Ketiga yang bekerjasama : Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
- Dasar Hukum : Naskah Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kabupaten Gresik tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2013.

NOMOR : 2010/NPK/eb/2013

NOMOR : 180/848/437.12/2013

Tanggal, 04 Juli 2013

- SKPD yang melaksanakan : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik

Lokasi : Kabupaten Gresik

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- Output/Keluaran : Terlaksananya Program PNPM Mandiri Perkotaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, yang meliputi perbaikan infrastruktur, social, ekonomi dan tata pemerintahan
- outcome/Hasil : Terlaksananya penguatan sistem inovasi daerah
- Jangka Waktu : 1 (satu) tahun

C. Pembinaan Batas Wilayah

1. Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan

1.1. Kegiatan : Penegasan Batas Wilayah Kabupaten

Daerah/Kecamatan/Desa/
Kelurahan yang
berbatasan

Dasar Hukum : Kesepakatan bersama antara Pemerintah
Kabupaten Gresik dengan Top Dam V
Brawijaya Nomor 136/66/437.12/2012
dan Nomor B/01/II/2012 tentang Survey
dan Penataan Batas Daerah

SKPD yang melaksanakan : Bagian Administrasi pemerintahan Umum
(sekretariat Daerah)

Realisasi Pelaksanaan : Terpasangnya pilar batas desa di
Kegiatan Kecamatan Wringinanom, Kedamean dan
Driyorejo

Sumber dan Jumlah Dana

-APBD Kab. Gresik	: Rp. 575.000.000,00
-APBD/Kota/Prop	: Rp. -
- Jumlah	: Rp. 575.000.000,00

D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana yang terjadi antara lain:

a. Bencana Angin Puting Beliung

- 1) Tanggal kejadian 10 Januari 2013 berlokasi di Desa Tanjungori Kecamatan Tambak jumlah korban sebanyak 1 keluarga;
- 2) Tanggal kejadian 3 Pebruari 2013 berlokasi di Desa Mriyunan Kecamatan Sidayu jumlah korban sebanyak 1 keluarga serta 1 gedung sekolah;
- 3) Tanggal kejadian 27 Pebruari 2013 berlokasi di Desa Kedungrukem Kecamatan Benjeng jumlah korban sebanyak 16 keluarga;

- 4) Tanggal kejadian 27 Pebruari 2013 berlokasi di Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang jumlah korban sebanyak 56 keluarga;
- 5) Tanggal kejadian 3 Maret 2013 berlokasi di Desa Lebaniwaras Kecamatan Wringinanom jumlah korban sebanyak 68 keluarga;
- 6) Tanggal kejadian 3 Maret 2013 berlokasi di Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom jumlah korban sebanyak 69 keluarga dan korban meninggal 1 orang;
- 7) Tanggal kejadian 3 Maret 2013 berlokasi di Desa Mulyorejo Kecamatan Wringinanom Dukun korban sebanyak 1 keluarga;
- 8) Tanggal kejadian 7 Maret 2013 berlokasi di Dusun Sukoanyar Kecamatan Cerme korban sebanyak 1 keluarga;
- 9) Tanggal kejadian 13 Maret 2013 berlokasi di Dusun Pandem Kecamatan Kedamean korban sebanyak 71 keluarga;
- 10) Tanggal kejadian 22 Pebruari 2013 berlokasi di Desa Sukalela Kecamatan Tambak korban sebanyak 1 keluarga;
- 11) Tanggal kejadian 14 Mei 2013 berlokasi di Desa Turirejo Kecamatan Kedamean korban sebanyak 11 keluarga;
- 12) Tanggal kejadian 24 Juli 2013 berlokasi di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah korban sebanyak 10 keluarga;
- 13) Tanggal kejadian 4 September 2013 berlokasi di Desa Turirejo Kecamatan Kedamean korban sebanyak 1 keluarga;
- 14) Tanggal kejadian 12 September 2013 berlokasi di Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme korban sebanyak 1 keluarga;
- 15) Tanggal kejadian 17 September 2013 berlokasi di Desa Sumberwaru Kecamatan Wringinanom korban sebanyak 1 keluarga;
- 16) Tanggal kejadian 17 September 2013 berlokasi di Desa Sumberwaru Kecamatan Wringinanom korban sebanyak 1 keluarga;
- 17) Tanggal kejadian 17 September 2013 berlokasi di Desa Sumberwaru Kecamatan Wringinanom korban sebanyak 1 keluarga;

- 18) Tanggal kejadian 22 September 2013 berlokasi di Desa Turirejo Kecamatan Kedamean korban sebanyak 1 keluarga;
- 19) Tanggal kejadian 17 Oktober 2013 berlokasi di Desa Kramat Kecamatan Bungah korban sebanyak 43 keluarga;
- 20) Tanggal kejadian 17 Oktober 2013 berlokasi di Desa Kramat Kecamatan Bungah korban sebanyak 43 keluarga;
- 21) Tanggal kejadian 21 September 2013 berlokasi di Desa Dapet Kecamatan Balongpanggang korban sebanyak 1 keluarga;
- 22) Tanggal kejadian 28 September 2013 berlokasi di Desa Kandangan Kecamatan Dudusampeyan korban sebanyak 2 keluarga;
- 23) Tanggal kejadian 29 September 2013 berlokasi di Desa Tambakrejo Kecamatan Dudusampeyan korban sebanyak 1 keluarga;
- 24) Tanggal kejadian 29 September 2013 berlokasi di Desa Tambakrejo Kecamatan Dudusampeyan korban sebanyak 1 keluarga.

b. Bencana Kebakaran

- 1) Tanggal kejadian 14 Januari 2013 berlokasi di Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng jumlah korban sebanyak 1 keluarga;
- 2) Tanggal kejadian 19 Januari 2013 berlokasi di Desa Karangkidul Kecamatan Benjeng jumlah korban sebanyak 1 keluarga;
- 3) Tanggal kejadian 19 Januari 2013 berlokasi di Desa Wonokerto Kecamatan Dukun jumlah korban sebanyak 1 keluarga;
- 4) Tanggal kejadian 19 Januari 2013 berlokasi di Desa Diponggo Kecamatan Dukun jumlah korban sebanyak 1 keluarga;
- 5) Tanggal kejadian 19 Januari 2013 berlokasi di Desa Diponggo Kecamatan Dukun jumlah korban sebanyak 1 keluarga;
- 6) Tanggal kejadian 28 Maret 2013 berlokasi di Desa Cerme Kidul Kecamatan Dukun jumlah korban sebanyak 1 keluarga;

- 7) Tanggal kejadian 30 April 2013 berlokasi di Desa Dadapkuning Kecamatan Cerme jumlah korban sebanyak 1 keluarga.
- 8) Tanggal kejadian 6 Mei 2013 berlokasi di Desa Lowayu Kecamatan Dukun jumlah korban sebanyak 1 keluarga;
- 9) Tanggal kejadian 24 Juli 2013 berlokasi di Desa Pulopancikan Kecamatan Gresik jumlah korban sebanyak 1 keluarga;
- 10) Tanggal kejadian 2 September 2013 berlokasi di Desa Turirejo Kecamatan Kedamean jumlah korban sebanyak 1 keluarga;
- 11) Tanggal kejadian 11 September 2013 berlokasi di Desa Kalirejo Kecamatan Dukun jumlah korban sebanyak 1 keluarga;
- 12) Tanggal kejadian 15 September 2013 berlokasi di Desa Klotok Kecamatan Balongpanggang jumlah korban sebanyak 1 keluarga;
- 13) Tanggal kejadian 15 September 2013 berlokasi di Desa Tumapel Kecamatan Dudusampeyan jumlah korban sebanyak 1 keluarga;
- 14) Tanggal kejadian 19 September 2013 berlokasi di Desa Randuagung Kecamatan Kebomas jumlah korban sebanyak 1 keluarga;
- 15) Tanggal kejadian 22 September 2013 berlokasi di Desa Menganti Kecamatan Menganti jumlah korban sebanyak 1 keluarga;
- 16) Tanggal kejadian 22 September 2013 berlokasi di Desa Deliksumber Kecamatan Benjeng jumlah korban sebanyak 1 keluarga.

c. Bencana Tanah Longsor

Terjadi bencana tanah longsor di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak Pulau Bawean dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 22 Desember 2013, terjadi Longsor di Pulau Bawean Dusun Tanjungmulya Desa Dekatagung Kecamatan Sangkapura, yang mengakibatkan Ruas Jalan Sangkapura - Tambak Longsor dengan volume P : 20m, L : 3m, dan Kedalaman : 45m

- 2) Tanggal 23 Desember 2013, Terjadi Bencana Tanah Longsor sebagai berikut:
- a) Dusun Dhuko Desa Sungairujing, yang mengakibatkan sejumlah 26 Rumah rusak, dengan rincian : 24 rumah rusak ringan, 2 rumah rusak berat dan 1 Masjid rusak berat;
 - b) Dusun Langcabor Desa Daun, yang mengakibatkan sejumlah 5 rumah rusak, dengan rincian : 3 rumah rusak ringan dan 2 rumah rusak parah;
 - c) Dusun Balibakgunung Desa Gunungteguh, yang mengakibatkan jalan desa rusak sepanjang 50m dan lebar 2,5m;
 - d) Dusun menur desa Gunungteguh yang mengakibatkan jalan desa rusak sepanjang 50m dan lebar 2,5m

d. Bencana Banjir

- 1) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Balongpanggang desa Wotansari berdampak pada 220 rumah, 50 Ha Sawah, 800 m Jalan Desa, 500 m Jalan Raya dengan kerugian sebesar 200 juta Rupiah;
- 2) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di di Kecamatan Balongpanggang desa kedungpring berdampak pada 127 rumah, 50 Ha Sawah, 800 m Jalan Desa dengan kerugian sebesar 25 juta Rupiah;
- 3) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di di Kecamatan Balongpanggang desa Pucung berdampak pada 220 rumah, 45 Ha Sawah, 800 m Jalan Desa, 120 m Jalan Raya dengan kerugian sebesar 140 juta Rupiah;

- 4) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Balongpanggang desa Sekarputih berdampak pada 75 rumah, 25 Ha Sawah, 300 m Jalan Desa, dengan kerugian sebesar 56,7 juta Rupiah;
- 5) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Balongpanggang desa Wahas berdampak pada 60 rumah, 5 Ha Sawah, 500 m Jalan Desa, 700 m Jalan Raya dengan kerugian sebesar 100 juta Rupiah;
- 6) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Balongpanggang desa Dapet berdampak pada 75 rumah, 5 Ha Sawah, 100 m Jalan Desa, 200 m Jalan Raya dengan kerugian sebesar 20 juta Rupiah;
- 7) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Balongpanggang desa Balongpanggang berdampak pada 209 rumah, 21 Ha Sawah, 100 m Jalan Desa, 200 m Jalan Raya dengan kerugian sebesar 400 juta Rupiah;
- 8) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Balongpanggang desa Jombangdelik berdampak pada 29 rumah, 5 Ha Sawah, 100 m Jalan Desa, dengan kerugian sebesar 23 juta Rupiah;
- 9) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Balongpanggang desa Banjaragung berdampak pada 148 rumah, 30 Ha Sawah, 100 m Jalan Desa, dengan kerugian sebesar 100 juta Rupiah;
- 10) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Balongpanggang desa Brangkal berdampak pada 90 rumah, 91 Ha Sawah, 700 m Jalan Desa, 500 m Jalan Raya dengan kerugian sebesar 12,6 juta Rupiah;

- 11) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Balongpanggang desa Karangsemanding berdampak pada 127 rumah, 50 Ha Sawah, 700 m Jalan Desa, 800 m Jalan Raya dengan kerugian sebesar 200 juta Rupiah.
- 12) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Balongpanggang desa Ngasin berdampak pada 50 rumah, 29 Ha Sawah, dengan kerugian sebesar 100 juta Rupiah.
- 13) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Benjeng desa Lundo berdampak pada 50 rumah, 29 Ha Sawah, dengan kerugian sebesar 100 juta Rupiah.
- 14) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Benjeng desa Balungtunjung berdampak pada 40 rumah, 10 Ha Sawah, 5.000 m Jalan Desa.
- 15) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Benjeng desa Balungmojo berdampak pada 144 rumah, 61 Ha Sawah, 3.500 m Jalan Desa.
- 16) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Benjeng desa Bulangkulon berdampak pada 410 rumah, 155 Ha Sawah, 7.000 m Jalan Desa.
- 17) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Benjeng desa Sedapurklagen berdampak pada 343 rumah, 79 Ha Sawah, 5.000 m Jalan Desa.
- 18) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Benjeng desa Deliksumber berdampak pada 575 rumah, 154 Ha Sawah, 5.200 m Jalan Desa.
- 19) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Benjeng desa Kedungrukem berdampak pada 550 rumah, 92 Ha Sawah, 5.000 m Jalan Desa, 1.200 m Jalan Raya.

- 20) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Benjeng desa Munggugianti berdampak pada 389 rumah, 89 Ha Sawah, 3.000 m Jalan Desa, 1.500 m Jalan Raya.
- 21) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Benjeng desa Bengkelolor berdampak pada 42 rumah, 94 Ha Sawah, 500 m Jalan Desa.
- 22) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Benjeng desa Gluranploso berdampak pada 595 rumah, 216 Ha Sawah, 4.500 m Jalan Desa.
- 23) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Benjeng desa Bulurejo berdampak pada 715 rumah, 79 Ha Sawah, 4.000 m Jalan Desa, 2.500 m Jalan Raya.
- 24) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Benjeng desa Dermo berdampak pada 76 rumah, 41 Ha Sawah, 1.000 m Jalan Desa.
- 25) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Benjeng desa Kedungsekar berdampak pada 312 rumah, 96 Ha Sawah, 4.700 m Jalan Desa.
- 26) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Benjeng desa Klampok berdampak pada 328 rumah, 54Ha Sawah, 4.500 m Jalan Desa, 2000 m Jalan Raya.
- 27) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Benjeng desa Sirnobojo berdampak pada 1280 rumah, 120 Ha Sawah, 3.300 m Jalan Desa.
- 28) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Benjeng desa Kalipadang berdampak pada 104 rumah, 112 Ha Sawah, 1.500 m Jalan Desa.

- 29) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Benjeng desa Karang Kidul berdampak pada 43 rumah, 86 Ha Sawah, 1.500 m Jalan Desa.
- 30) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Benjeng desa Munggugebang berdampak pada 352 rumah, 247 Ha Sawah, 4.000 m Jalan Desa.
- 31) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Benjeng desa Banter berdampak pada 11 rumah, 94 Ha Sawah, 2.000 m Jalan Desa.
- 32) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Menganti desa Gadingwatu berdampak pada 136 rumah, 100 Ha Sawah, 17 Ha Tambak, 300 m Jalan Desa.
- 33) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Menganti desa Pranti berdampak pada 375 rumah, 45 Ha Sawah, 25 Ha Tambak, 1500 m Jalan Desa.
- 34) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Menganti desa Boteng berdampak pada, 60 Ha Sawah.
- 35) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Menganti desa Boboh berdampak pada 420 rumah, 70 Ha Sawah, 60 Ha Tambak, 170 m Jalan Desa, dengan kerugian sebesar 605 juta Rupiah.
- 36) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Menganti desa Beton berdampak pada 75 rumah, 70 Ha Sawah, 60 Ha Tambak.
- 37) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Menganti desa Hendrosari berdampak pada, 80 Ha Sawah, 61 Ha Tambak.
- 38) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Menganti desa Sidowungu berdampak pada, 70 Ha Sawah.

- 39) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Menganti desa Kapatihan berdampak pada, 62 Ha Sawah, 15 Ha Tambak.
- 40) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Menganti desa Setro berdampak pada, 50 Ha Sawah.
- 41) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Menganti desa Laban berdampak pada, 50 Ha Sawah.
- 42) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Menganti desa Mojotengah berdampak pada, 81 Ha Sawah, 6 Ha Tambak.
- 43) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Menganti desa Menganti berdampak pada, 75 Ha Sawah.
- 44) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Menganti desa Bringkang berdampak pada, 65 Ha Sawah, 6 Ha Tambak.
- 45) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Menganti desa Putatlor berdampak pada, 339 Ha Sawah, 80 Ha Tambak, 7 m Jalan Desa dengan kerugian sebesar 475 juta Rupiah.
- 46) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Kedamean desa Cermen berdampak pada 919 rumah.
- 47) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Kedamean desa Glindah berdampak pada 358 rumah, 10 Ha Sawah.
- 48) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Cerme desa Morowudi berdampak pada, 880 rumah, 100 Ha Sawah, 70 Ha Tambak, 800 m Jalan Desa, 2600 m Jalan Raya dengan kerugian sebesar 2 milyar 500 juta Rupiah.

- 49) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Cerme desa Sukoanyar berdampak pada, 300 rumah, 243 Ha Sawah, 6 Ha Tambak, 100 m Jalan Desa, 150 m Jalan Raya dengan kerugian sebesar 400 juta Rupiah.
- 50) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Cerme desa Ngembung berdampak pada, 35 rumah, 70 Ha Sawah, 3 Ha Tambak, dengan kerugian sebesar 200 juta Rupiah.
- 51) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Cerme desa Guranganyar berdampak pada 30 rumah, 75 Ha Sawah, 25 Ha Tambak, 20 m Jalan Desa, dengan kerugian sebesar 300 juta Rupiah.
- 52) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Cerme desa Dadapkuning berdampak pada, 98 rumah, 64 Ha Sawah, 7 Ha Tambak, 400 m Jalan Desa, 250 m Jalan Raya dengan kerugian sebesar 500 juta Rupiah.
- 53) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Cerme desa Dampaan berdampak pada, 350 rumah, 29 Ha Sawah, 10 Ha Tambak, 900 m Jalan Desa, 650 m Jalan Raya dengan kerugian sebesar 400 juta Rupiah.
- 54) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Cerme desa Lengkong berdampak pada, 50 rumah, 45 Ha Sawah, 270 m Jalan Desa, 200 m Jalan Raya dengan kerugian sebesar 250 juta Rupiah.
- 55) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Cerme desa Dooroo berdampak pada, 43 rumah, 35 Ha Sawah, 270 m Jalan Desa, 200 m Jalan Raya dengan kerugian sebesar 300 juta Rupiah.

- 56) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Cerme desa Dungus berdampak pada, 400 rumah, 135 Ha Sawah, 50 Ha Tambak, 900 m Jalan Desa, 650 m Jalan Raya dengan kerugian sebesar 800 juta Rupiah.
- 57) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Cerme desa Iker-Iker Geger berdampak pada, 260 rumah, 80 Ha Sawah, 70 Ha Tambak, 500 m Jalan Desa, 800 m Jalan Raya dengan kerugian sebesar 2 Milyar Rupiah.
- 58) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Cerme desa Betiting berdampak pada, 50 rumah, 40 Ha Sawah, 70Ha Tambak, 50 m Jalan Desa, 200 m Jalan Raya dengan kerugian sebesar 1 Milyar 500 Juta Rupiah.
- 59) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Cerme desa Cerme Kidul berdampak pada, 150 rumah, 10 Ha Sawah, 150 Ha Tambak, 300 m Jalan Desa, 200 m Jalan Raya dengan kerugian sebesar 1 Milyar Rupiah.
- 60) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Cerme desa Cerme Lor berdampak pada, 20 rumah, 5 Ha Sawah, 7 Ha Tambak, 600 m Jalan Desa, 300 m Jalan Raya dengan kerugian sebesar 1 Milyar 500 Juta Rupiah.
- 61) Tanggal kejadian 14 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Cerme desa Tambak Beras berdampak pada, , 350 Ha Tambak, 1000 m Jalan Desa, 4000 m Jalan Raya dengan kerugian sebesar 3 Milyar 500 Juta Rupiah.
- 62) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Manyar desa Morobakung berdampak pada, 20 rumah, 5 Ha Sawah, 4 Ha Tambak, dengan kerugian sebesar 175 juta Rupiah.
- 63) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Manyar desa Pejanganan berdampak pada, 20 rumah.

- 64) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Manyar desa Ngampel berdampak pada, 66 rumah, 4 Ha Sawah, 2 Ha Tambak, dengan kerugian sebesar 150 juta Rupiah.
- 65) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Sidayu desa Randuboto berdampak pada, , 42 Ha Sawah, 20 Ha Tambak, dengan kerugian sebesar 60 juta Rupiah.
- 66) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Manyar desa Ngawen berdampak pada, 26 Ha Tambak, dengan kerugian sebesar 40 juta Rupiah.
- 67) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Manyar desa Srowo berdampak pada, 400 Ha Tambak, dengan kerugian sebesar 4 Milyar Rupiah.
- 68) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Manyar desa Sedagaran berdampak pada, 50 Ha Tambak, dengan kerugian sebesar 85 juta Rupiah.
- 69) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Manyar desa Mriyunan berdampak pada, 100 Ha Tambak, dengan kerugian sebesar 1 Milyar Rupiah.
- 70) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Manyar desa Mojoasem berdampak pada, 70 Ha Tambak, dengan kerugian sebesar 150 juta Rupiah.
- 71) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Manyar desa Racikulon berdampak pada, 30 Ha Tambak, dengan kerugian sebesar 50 juta Rupiah.
- 72) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Bungah desa Bungah berdampak pada, 311 rumah, 30 Ha Sawah, 18 Ha Tambak.

- 73) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Bungah desa Sukorejo berdampak pada, 43 rumah, 9 Ha Sawah, 3 Ha Tambak.
- 74) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Bungah desa Sukowati berdampak pada, 15 Ha Sawah.
- 75) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Bungah desa Melirang berdampak pada, 25 rumah, 30 Ha Sawah.
- 76) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Bungah desa Mojopurogede berdampak pada, 20 Ha Sawah.
- 77) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Bungah desa Mojopurowetan berdampak pada, 15 rumah, 5 Ha Sawah.
- 78) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Bungah desa Bedaten berdampak pada, 293 rumah, 7 Ha Sawah.
- 79) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Bungah desa Indrodelik berdampak pada, 40 Ha Sawah, 20 Ha Tambak, dengan kerugian sebesar 325 juta Rupiah.
- 80) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Bungah desa Masangan berdampak pada, 40 Ha Sawah.
- 81) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Bungah desa Sidorejo berdampak pada, 9 Ha Sawah.
- 82) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Bungah desa Sungonlegowo berdampak pada, 123 rumah, 15 Ha Sawah.
- 83) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Bungah desa Sidomukti berdampak pada, 15 Ha Sawah.
- 84) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Dukun desa Teremenggal berdampak pada, 12 rumah, 28 Ha Sawah.

- 85) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Dukun desa Madumulyorejo berdampak pada, 18 rumah, 5 Ha Sawah.
- 86) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Dukun desa Jrebeng berdampak pada, 14 rumah, 9 Ha Sawah.
- 87) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Dukun desa Sekargadung berdampak pada, 3 rumah.
- 88) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Dukun desa Dukuanyar berdampak pada, 14 rumah.
- 89) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Dukun desa Gedong Kedoan berdampak pada, 35 rumah, 15 Ha Sawah.
- 90) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Dukun desa Kalirejo berdampak pada, 10 rumah.
- 91) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Dukun desa Karangcangkring berdampak pada, 10 rumah.
- 92) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Dukun desa Bangeran berdampak pada, 30 Ha Sawah.
- 93) Tanggal kejadian 18 Desember 2013 berlokasi di Kecamatan Dukun desa Bulangan berdampak pada, 5 rumah.

e. Bencana Kekeringan

Berkaitan dengan bencana kekeringan pada tahun 2013 di Wilayah Kabupaten Gresik ada 8 kecamatan yang ditetapkan dalam status keadaan darurat bencana kekeringan akibat musim kemarau kategori III (kering kritis). Adapun 8 kecamatan tersebut terdiri dari 82 desa dengan jumlah dusun sebanyak 200 dusun terdiri dari 40.260 kk dengan jumlah jiwa sebanyak 184.619 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

No.	KECAMATAN	DESA	DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
1	2	3	4	5	6
1.	BENJENG	1. LUNDO	6	558	2.475
		2. BALONGTANJUNG	3	244	1.227
		3. BALONGMOJO	3	352	1.829
		4. BULANGKULON	3	535	2.531
		5. GLURANPLOSO	4	392	1.799
		6. BENGKELOLOR	3	298	1.409
		7. MUNGUGIANTI	2	407	1.900
		8. BULUREJO	6	951	3.730
		9. KEDUNGRUKEM	4	622	2.557
		10. DELIKSUMBER	4	482	2.678
		11. SEDAPURKLAGEN	3	322	1.600
		12. KALIPADANG	5	626	3.116
		13. KARANGANKIDUL	3	634	2.832
		14. DERMO	1	298	1.348
		15. KLAMPOK	4	678	2.988
		16. SIRNOBOYO	5	1.229	5.150
		17. KEDUNGSEKAR	4	761	3.112
		18. METATU	3	1.030	4.594
		19. BANTER	2	531	2.408
		20. JOGODALU	3	930	3.643
		21. JATIRAMBE	1	651	2.529
		22. PUNDUTRATE	3	607	2.719
		23. MUNGUGEBANG	3	587	2.618
2.	CERME	1. DOORO	-	186	956
		2. DAMPAAN	-	270	1.353
		3. PANDU	3	432	1.937
		4. LENGKONG	-	203	990
		5. JONO	2	429	1.661
		6. KANDANGAN	4	967	4.017
		7. DUNGUS	3	570	2.783
		8. GEDANGKULUD	3	1.058	4.895
		9. KAMBINGAN	2	504	2.308
		10. SUKO ANYAR	4	760	3.514

No.	KECAMATAN	DESA	DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
1	2	3	4	5	6
3.	DUDUKSAMPEYAN	1. PANDANAN	3	387	1.920
		2. GLANGGANG	1	191	904
		3. KEMUDI	1	312	1.443
		4. SUMARI	3	948	3.933
		5. KANDANGAN	1	122	553
		6. TAMBAKREJO	3	1.034	5.582
		7. KAWISTO WINDU	2	196	915
		8. SETROHADI	2	417	1.796
		9. WADAK LOR	1	216	952
		10. KRAMAT	1	153	744
		11. PANJUNAN	1	283	794
		12. WADAK KIDUL	1	568	2.354
		13. GREDEK	2	538	2.567
		14. TUMAPEL	1	655	2.358
4.	KEDAMEAN	1. CERMEN	4	371	1.682
		2. KATIMOHO	2	493	1.855
		3. TULUNG	2	523	2.285
		4. GLINDAH	6	758	3.128
		5. LAMPAH	7	923	3.992
		6. TURIREJO	6	980	3.914
5.	DUKUN	1. BARON	2	404	2.353
		2. BABAKSARI	3	490	2.513
		3. PADANG BANDUNG	3	722	4.045
		4. KALIREJO	3	285	1.818
		5. JREBENG	2	244	1,172
		6. SEKARGADUNG	-	455	2.082
		7. MADUMULYOREJO	2	374	1.709
		8. BABAKBAWO	2	605	2.755
		9. DUKUHKEMBAR	2	247	1.279
		10. TIREMENGAL	2	439	2.537
6.	BL.PANGGANG	1. KEDUNGPRING	5	597	2.569
		2. BL.PANGGANG	5	1.169	5.123
		3. PACUH	3	428	1.902
7.	SIDAYU	1. NGAWEN	4	346	2.109
		2. MOJOASEM	-	106	511
		3. RANDUBOTO	4	727	3.605
		4. SIDOMULYO	-	202	1.003

No.	KECAMATAN	DESA	DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
1	2	3	4	5	6
		5. MRIYUNAN	-	429	2.149
		6. BUNDERAN	-	246	1.403
		7. RACIKULON	-	157	779
		8. PURWODADI	3	326	1.681
		9. ASEMPAPAK	-	189	1.034
		10. SROWO	-	231	1.070
		11. RACITENGAH	-	314	1.413
		12. SEDAGARAN	-	172	834
8.	BUNGAH	1. PEGUNDAN	1	254	1.178
		2. KEMANGI	2	301	1.682
		3. RACIWETAN	2	262	1.194
		4. GUMENG	1	367	2.240
Jumlah		82 Desa	200	40.260	184.619

2. Status Bencana

Status bencana angin puting beliung, kebakaran, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan tenggelam adalah bencana lokal

3. Sumber dan jumlah anggaran

Sumber dan jumlah anggaran bencana untuk angin puting beliung dan kebakaran dari dana tak terduga sebesar Rp584.182.500,00 terdiri dari anggaran untuk bencana angin puting beliung sebesar Rp286.850.000,00, anggaran bencana kebakaran rumah sebesar Rp237.332.500,00.

4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana di Kabupaten Gresik dilakukan antara lain:

- 1) Mengupayakan pembuatan tanggul untuk mengantisipasi luapan air bengawan solo dan kali lamong pada musim penghujan;

- 2) Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah untuk melaksanakan normalisasi sungai agar aliran air menuju muara menjadi lancar;
- 3) Mengusulkan pembuatan sumur bor dan normalisasi pada tiap-tiap daerah yang mengalami kekerigan;
- 4) Mensiagakan satuan petugas pemadam kebakaran Pemerintah Gresik dan berkoordinasi dengan satuan pemadam kebakaran untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran perusahaan di Kabupaten Gresik;
- 5) Menyediakan bantuan tendon, jurigen dan air bersih;
- 6) Menyediakan bantuan sembako.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Bencana

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.

BAB VII

P E N U T U P

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013 ini, pada dasarnya merupakan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2011-2015 yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Bhakti 2010-2015.

Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2013 merupakan hasil kerja sama yang baik antara eksekutif, legislatif maupun masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun demikian, Saya menyadari bahwa masih ada hal-hal yang belum memenuhi harapan dan memuaskan semua pihak.

Selanjutnya sebagai implementasi hubungan kemitraan yang setara antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif, diharapkan adanya saran konstruktif yang berupa rekomendasi dari DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Gresik ke depan. Dengan demikian hubungan timbal balik yang seimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terjalin dengan baik.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013 ini, semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan hidayah dan meridhloi usaha kita bersama untuk mewujudkan **"Gresik bisa lebih baik"**.

Gresik, Maret 2014

BUPATI GRESIK

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sambari Halim Radianto', is written over a faint, circular official stamp. The signature is stylized and cursive.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si